Dr. H. Zaini Fasya, S.Ag., M.Pd.I.
Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., M.A., M.Pd.

Historie Media

KONTEKSTUAL PANCASILA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Pengantar
Prof. Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I.
Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

KONTEKSTUAL PANCASILA
dalam PENDIDIKAN ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

Pasal 1:
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113:
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KONTEKSTUAL PANCASILA
dalam PENDIDIKAN ISLAM

Zaini Fasya
Muhsin Kalida

H!stor!e
Media

KONTEKSTUAL PANCASILA dalam PENDIDIKAN ISLAM

Copyright © Historie Media

ISBN: 978-623-10-9501-5

Cetakan Pertama: Mei 2025
Tebal: xiv, 255 hlm; ukuran buku (15,5 x 23 cm)

Penulis : Zaini Fasya
Muhsin Kalida
Pengantar : Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.

Layouter : Ladifa Nanda
Desain Cover : Dwi Prasetyo

Email : historiemedia@gmail.com
Website : historiemedia.com
Instagram : @historie_media
Facebook : Historie Media
WhatsApp : 0851-7691-7910

Penerbit:
Historie Media

Kantor Pusat:
Komplek Muntangsari No.81, Banjarnegara, Jawa Tengah

Kantor Operasional:
Perumahan GTSI No. T2, Purwokerto, Jawa Tengah

© Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan dan berbagai ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada *nabiyyullah* Muhammad SAW, sebagai *uswah* tauladan, berharap semoga kita diakui sebagai pengikut yang setia dan mendapat syafaat di *yaumil qiyamah*, *Amin.*

Buku ini sebenarnya merupakan gagasan kami berdua sejak lama, kemudian gayung bersambut kami sepakati dan bahkan kami tandatangani *letter of intent* (LoI), karena kami berdua sebagai kolega yang sama-sama sebagai dosen dan Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasrjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU) Jawa Timur dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami berdua sepakat, agar LoI tidak hanya tandatangan di atas kertas, maka minimal harus ada wujud nyata produk kerjasama. Sehingga buku yang berjudul *Kontekstual Pancasila dalam Pendidikan Islam*, yang diterbitkan ini merupakan hasil karya diskusi berkali-kali, baik di Yogyakrta maupun di Tulungagung, baik *online* maupun *off-line*, berbagai konferensi Pancasila yang diikuti, seminar, pengalaman organisasi dan dalam tema-tema diskusi pembelajaran secara regular mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian dikemas sedemikian rupa, menjadi karya tulis yang dibukukan ini.

Buku ini tentu tak bisa terwujud tanpa adanya dukungan dan campurtangan institusi kami dan *support* beberapa pihak, maka ungkapan terima kasih kami ucapkan, turatama kepada Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang telah meluangkan waktu untuk

membaca dan memberikan sambutan sekapur sirih sebagai pengantar, serta para kolega yang selama ini mendukung untuk terwujudnya karya tulis ini. Semoga pihak-pihak terkait dalam proses terbitnya buku ini, senantiasa mendapat limpahan kesehatan lahir batin dan kesuksesan dalam berkarir. Kami menyadari setulus hati, bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, tentu kami mohon maaf, namun berbagai masukan dan koreksi yang konstruktif dari banyak pihak tetap kami harapkan, demi perbaikan edisi revisi dan cetakan selanjutnya.

Akhirnya, dengan memohon kepada Allah SWT, semoga dengan terbitnya karya ini, menjadi cara kami untuk berbagi ilmu dan amal, serta memberi manfaat bagi para pembaca. *Wallahu 'alam bish-shawab*.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Tulungagung, Mei 2025

ttd

Zaini Fasya & Muhsin Kalida

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Bismillaahirahmanirrahiim

Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia.

Buku ini berjudul *Kontekstual Pancasila dalam Pendidikan Islam*, yang ditulis oleh Zaini Fasya dan Muhsin Kalida ini banyak hal yang dikaji secara mendalam diantaranya adalah Pancasila sebagai sistem etika, pancasila sebagai sistem nilai, sistem moral, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila di era globalisasi, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara, toleransi beragama, Pancasila dalam budaya kampus, karakter pelajar Pancasila dalam sekolah merdeka, Pancasila dan tri dharma perguruan tinggi dan Pancasila dan Ki Hadjar Dewantara.

Relasi utama dalam kontekstual pancasila selalu berkorelasi dengan hakikat kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Aktualisasi pancasila yang termaktub dalam batang tubuh pancasila menjadi hakikat dari paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila harus mendorong perubahan fundamental yang sesuai dengan dasar negara yang sesungguhnya. Internalisasi nilai–nilai Pancasila dalam pendidikan Islam merupakan proses mengimplementasikan serta membiasakan nilai–nilai Pancasila dalam kehidupan sehari–hari.

Membaca buku ini, minimal memberi dua apresiasi penting terhadap karya ini, yaitu:

Pertama: karya ini merupakan pengembangan pengajaran dan pengkajian dari mata pelajaran/kuliah Pancasila, terutama pada perspektif pendidikan Islam dengan mengangkat isu-isu terkini seperti era global, toleransi beragama, budaya kampus, dan lain-lain. Tentu ini menarik, karena karya, ide dan gagasan dengan berbagai perspektif yang telah didokumentasikan sangat sayang jika dibuang, sehingga tertuang menjadi kenangan dan produk pemikiran.

Kedua: dalam rangka pengembangan gerakan literasi dan *academic writing*, karya ini merupakan *uswah* dalam membumikan gerakan menulis bagi siapa saja, siswa, mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting, bukan sekedar tuntutan akademik semata, tetapi karena membaca dan menulis merupakan perintah agama yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Manusia yang literat dan dianggap mengalami kehidupan, adalah sejak mulai berani membaca dan menulis. Mengapa demikian, sebab membaca dan menulis adalah *fitrah* manusia. Tak tanggung-tanggung, wahyu Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, adalah memberi perintah untuk setidaknya dua hal penting, yaitu membaca dan menulis. Di sana tertulis kalimat yang sangat jelas, yakni *iqra'* (bacalah!) dan *al-qalam* (pena). Dua kalimat ini tak perlu tafsir panjang lebar, sekali orang baca, sudah jelas maksudnya, bahwa Allah melalui Al-Quran, memerintahkan untuk membaca dan menulis.

Bisa dibayangkan, andai kata Al-Quran itu tidak tertulis, tentu akan kepayahan mempelajari ajaran-ajaran suci agama Islam, jika para ulama-ulama shalih terdahulu (*salafunash-shalihun*) tidak menuliskan hadits, tentu sulit memahami apa dan bagaimana kalimat-kalimat dan akhlak Rasulullah SAW. Sejarah sudah memberi petunjuk bahwa dialog peradaban antara Islam dan peradaban lain terjadi, salah satunya, melalui karya tulis. Jadi, berdasarkan atas latar belakang di atas, bahwa membaca dan menulis adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan dalam pembentukan peradaban manusia. Termasuk sentuhan-sentuhan dan gesekan kritis dengan ilmu lain,

kontekstual Pancasila dalam perspektif pendidikan Islam, akan menambah peradaban keilmuan baru dalam pendidikan. Sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh penulis dengan menerbitkan buku ini, patut untuk diapresiasi.

Akhirnya, selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini, kami berbangga hati dan berdoa semoga tradisi mendokumentasikan karya tulis seperti ini bisa menular, dan memberi warna positif, dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Wallahu a'lam bish-shawab...
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Tulungagung, Mei 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **v**
KATA SAMBUTAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA **1**
Pancasila sebagai Sistem Etika 7
Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika 9
Implementasi Etika Pancasila pada Kehidupan 12
Penutup 18

BAB II PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI **21**
Pengertian Sistem Nilai 22
Nilai-Nilai dalam Pancasila 23
Sistem Nilai dalam Pancasila 28
Pancasila dalam Konteks Kehidupan 31
Penutup 32

BAB III PANCASILA SEBAGAI SISTEM MORAL **33**
Pengertian Sistem dan Moral 34
Makna Nilai - Nilai yang Terkandung dalam Pancasila 37
Ciri-Ciri Nilai Moral 41
Jenis- Jenis Nilai Moral 42
Sumber Nilai Moral 43
Fungsi Nilai Moral 44
Penutup 46

BAB IV PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN **47**
Kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan 53
Dinamika Pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan 61

Relevansi Pancasila dengan Konsep Otonomi Daerah 63
Pancasila dalam Ketatanegaraan pada Kehidupan 67
Penutup 68

BAB V PANCASILA DI ERA GLOBALISASI 69
Pengertian Globalisasi dan Dampak Globalisasi 74
Dampak Pasitif dan Negatif Globalisasi..... 75
Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat 77
Aktualisasi Pancasila di Era Globalisasi.....80
Tantangan Globalisasi terhadap Nilai Pancasila 82
Tantangan Aktualisasi Pancasila di Era Globalisasi 83
Mengatasi Dampak Globalisasi 85
Merubah Tatanan Hidup di Era Globalisasi 86
Implementasi Pancasila dalam Era Globalisasi pada Kehidupan... 87
Kontekstualisasi Pancasila di Era Globalisasi dalam Kehidupan ...88
Penutup 88

BAB VI AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA..... 91
Aktualisasi Nilai Pancasila.....94
Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 99
Penerapan Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan 103
Penutup 108

BAB VII TOLERANSI BERAGAMA DALAM PANCASILA..... 111
Pengertian Toleransi Beragama.....113
Indikator Toleransi Beragama 115
Nilai-Nilai Toleransi Beragama dalam Pancasila.....117
Pancasila dalam Beberapa Agama 125
Implementasi Nilai Pancasila dengan Pendidikan Pembentukan Sikap Toleransi 137
Pentingnya Toleransi Beragama di Indonesia.....138
Kontekstual Toleransi Beragama dalam Negara Pancasila 140
Penutup 141

BAB VIII PANCASILA DALAM BUDAYA KAMPUS 143
Pancasila dan Budaya Kampus.....145
Penerapan Pancasila dalam Budaya Kampus..... 149
Tujuan dan Implementasi Pancasila dalam Budaya Kampus 157
Aktualisasi Pancasila dan Budaya Kampus..... 161
Nilai Kontekstual Pancasila dalam Budaya Kampus 165
Penutup.....167

BAB IX KARAKTER PELAJAR PANCASILA DALAM SEKOLAH MERDEKA.....169
Pendidikan Karakter Pancasila..... 170
Kurikulum Merdeka dan Karakter Pelajar Pancasila dalam Sekolah Merdeka 172
Nilai Kontekstual 182
Penutup..... 184

BAB X PANCASILA DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI...187
Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi 191
Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila.....195
Implementasi Pancasila dalam Perguruan Tinggi 199
Makna dan Isi Tri Dharma Perguruan Tinggi.....202
Hubungan Pancasila dengan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi 207
Kontekstualisasi Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi..... 210
Penutup..... 210

BAB XI PANCASILA DAN KARAKTER TOKOH KEBANGSAAN ... 213
KI HAJAR DEWANTARA 213
Biografi Ki Hajar Dewantara.....214
Nilai-nilai Pancasila Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara.....217
Karakter Ki Hajar Dewantara 219
Pemikiran Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara..... 222
Metode Pembelajaran Ki Hajar Dewantara 230
Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Pancasila 232

Kontekstualitas Pancasila Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kehidupan 235
Penutup 237

DAFTAR PUSTAKA 239
PROFIL PENULIS 252

MWC NU
KOTA TULUNGAGUNG
بسم الله الرحمن الرحيم
Mengakui kesalahan adalah kepribadian utama dalam membangun harmonisasi sesama apalagi meminta maaf, tetapi kesalahan yang tidak pernah diakui dan dipelihara sampai dengan usia tua kata orang Jawa namanya *Keduwung*. Anehnya banyak yang bangga melakukan kesalahan itu... nauzubillah.
Dr.H. Zaini Fasya, M.Pd.I
Ketua MWC NU Kota Tulungagung

BAB I

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Pancasila, dalam diskursus filsafat kebangsaan, tidak dapat hanya dimaknai sebagai sekumpulan prinsip normatif yang bersifat dogmatis. Ia adalah *Weltanschauung* adalah suatu pandangan hidup komprehensif yang merepresentasikan nilai-nilai filosofis, historis, dan kultural bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar ideologi politik, Pancasila berperan sebagai sistem etika yang menjadi dasar dalam menstrukturkan kehidupan individu, masyarakat, dan negara secara menyeluruh dan integral. Pancasila memuat dimensi kritis, rasional, sistematis, dan fundamental sebagaimana karakteristik utama dari suatu philosophical system. Pancasila sebagai sistem etika dapat diposisikan sebagai axiological framework yang mendasari berbagai bentuk norma—baik hukum, sosial, maupun moral. Ia bukan hanya membimbing tindakan, tetapi juga menginspirasi cara berpikir dan merumuskan sikap hidup dalam realitas kebangsaan yang pluralistik.

Fundamentum dari kekuatan Pancasila terletak pada akar historis dan kulturalnya yang otentik. Ia bukan hasil copy-paste dari ideologi asing, melainkan hasil rekonstruksi nilai-nilai luhur yang telah hidup dan bersemayam dalam kesadaran kolektif bangsa sejak masa prasejarah. Nilai-nilai itu terejawantah dalam adat istiadat, agama-agama lokal, dan konsensus sosial yang telah lama menghidupi praktik kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, menjadi alasan mengapa Pancasila memiliki kekuatan legitimatif yang tidak sekadar legal-formal, melainkan juga moral-kultural.

Sebagai sistem etika, Pancasila mengandung orientasi moral yang memfasilitasi terbentuknya manusia yang beradab,

berkebajikan, dan bermartabat. Pancasila bukan hanya melarang yang buruk, tetapi mendorong kepada yang baik; bukan sekadar prohibitive ethics (etika larangan), tetapi juga prescriptive ethics (etika anjuran). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat reactive, melainkan constructive dalam membentuk struktur moral masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang tidak hanya lokal tetapi juga universal. Artinya, nilai-nilai tersebut memiliki jangkauan filosofis yang melampaui batas teritorial, etnis, maupun sektarian. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan memiliki kapasitas sebagai universal ethical paradigm yang bersifat kontekstual sekaligus transenden.

Pada praktiknya Pancasila sebagai sistem etika memberikan orientasi dalam pengambilan keputusan politik, pembangunan hukum, serta pembentukan karakter warga negara. Nilai-nilainya bersifat applicative dan operational, sehingga dapat diterjemahkan dalam kebijakan publik maupun dalam praktik pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga menjadi arsitektur moral bangsa. Lebih jauh lagi, Pancasila menjadi penjaga moralitas publik (*public morality*), serta instrumen untuk membangun *civic virtue* yakni karakter kebangsaan yang mendorong partisipasi aktif, kesadaran kritis, dan tanggung jawab sosial warga negara dalam kerangka negara demokrasi. Sehingga, etika Pancasila menjadi *leitmotiv* yaitu motif utama dalam simfoni pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar namun, juga realistis dan dapat diterapkan. (Issha Harruma, 2022)

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis memfokuskan ruang lingkup pembahasan pada aspek Pancasila sebagai suatu sistem etika serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam tindakan dan perilaku konkret, sehingga mampu merefleksikan karakter individu yang sejalan dengan nilai-nilai esensial dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

1. Pengertian Pancasila

Pancasila, sebagai grundnorm dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dari akar peradaban bangsa Nusantara. Secara etimologis, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pañca yang berarti lima dan śīla yang berarti prinsip atau norma moral. Oleh karena itu, secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip mendasar yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, Pancasila bukan sekadar doctrina formalis, ia adalah philosophia perennis, pandangan hidup bangsa yang terus relevan dan kontekstual sepanjang zaman. Ia bukan produk dari ruang steril politik praktis, tetapi merupakan hasil sintesis historis antara nilai-nilai adat, agama, budaya lokal, dan semangat kosmopolitanisme yang telah berakar sejak era pra-kolonial (Notonagoro, 1975). Sehingga, Pancasila layak disebut sebagai sociocultural construct yang lahir dari rahim sejarah bangsa dan bukan hasil adopsi ideologis dari kekuatan eksternal.

Pancasila mengandung dimensi ideational dan pragmatic secara bersamaan. Sebagai ideational construct, ia memuat sistem nilai normatif yang membentuk political ethos bangsa. Sementara sebagai pragmatic foundation, Pancasila menjelma dalam kebijakan, hukum, dan praktik kenegaraan. Ia menjadi guiding principle bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa: mulai dari pembentukan sistem hukum nasional, tata kelola pemerintahan, relasi antarwarga, hingga pembangunan karakter bangsa.

Rumusan Pancasila sebagai pedoman hidup bersama tidak hanya bersifat normatif-idealistik, tetapi juga memiliki kekuatan performatif yang membumi. Dalam konteks sosiopolitik, ia menjadi perekat keutuhan dalam keberagaman, serta pilar stabilitas dalam lanskap demokrasi Indonesia yang multikultural dan heterogen (Magnis-Suseno, 1997). Pancasila tidak hanya menjadi simbol konstitusional, tetapi sekaligus menjadi instrumen nation-building yang efektif dalam meredam potensi disintegrasi akibat polarisasi identitas.

Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah comprehensive doctrine yang melampaui sekadar asas hukum. Ia merupakan filsafat hidup bangsa (philosophical way of life) yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas, humanisme, solidaritas sosial, demokrasi deliberatif, serta keadilan substantif. Melalui kelima sila yang saling terhubung secara hirarkis-organis, Pancasila menjadi arsitektur moral dan politik bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, "Pancasila" dapat diterjemahkan sebagai "Lima Prinsip" atau "Lima Dasar". Bagi Bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. (Annisa Medina Sari, 2023)

Menurut Notonagoro, Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar filsafat dan ideologi nasional yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa, berfungsi sebagai pemersatu, simbol persatuan dan kesatuan, sekaligus sebagai benteng pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara (Irwan Gesmi, S,Sos., dkk, 2018: 1)

Menurut Muhammad Yamin Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila merupakan inti dari jiwa bangsa Indonesia yang telah hidup secara turun-temurun, namun untuk waktu yang lama terpendam dan terbungkam oleh dominasi kebudayaan Barat. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai falsafah negara, tetapi juga sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia secara menyeluruh.

2. Pengertian Sistem

Sistem dapat dipahami sebagai suatu integrasi dari berbagai komponen atau unsur yang saling terhubung, membentuk jaringan fungsional yang memungkinkan terjadinya aliran informasi, materi, maupun energi demi mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kelima silanya bukan entitas yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling terjalin secara holistik dan koheren, membentuk satu kesatuan nilai yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sila mengandaikan eksistensi sila yang lain, menciptakan struktur etis yang saling melengkapi dan memperkuat dalam membimbing arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Fat, sistem adalah suatu himpunan atau benda nyata yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, keseluruhan bersatu dalam kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif (Muhammad Alfan, 2011:17).

Menurut Abdul Kadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Menurut Sutarman, sistem merupakan himpunan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi dalam satu kesatuan yang terpadu, dengan tujuan untuk menjalankan proses guna mencapai sasaran utama secara efektif.

Menurut Fatansyah, sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan elemen atau komponen fungsional yang saling terhubung dan berinteraksi secara

terpadu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Fatansyah, 2020).

3. Pengertian Etika

Istilah etika berakar dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos, yang secara etimologis merujuk pada karakter, kebiasaan, moralitas, atau tata laku yang tertanam dalam budaya masyarakat. Dalam tradisi Latin, padanannya berasal dari kata ethica, yang juga merujuk pada pola perilaku atau kebiasaan hidup. Secara terminologis, etika dapat dimaknai sebagai cabang filsafat yang mengkaji dimensi normatif dari tindakan manusia—yakni bagaimana suatu perilaku dinilai sebagai baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu (Bertens, 2001). Dengan demikian, etika bukan hanya membahas perbuatan manusia secara empiris, tetapi menelaahnya dalam konteks nilai, tanggung jawab, dan kebajikan.

Menurut Aristoteles, etika merupakan cabang ilmu yang mengkaji tindakan-tindakan manusia dalam konteks baik dan buruk, sejauh hal tersebut dapat dijangkau dan dimengerti oleh akal budi manusia. Sementara itu, menurut H.A. Mustafa etika adalah ilmu yang menyelidiki suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia (David Nugroho, dkk, 2019:2).

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang fokus pada pembahasan nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan. Etika, yang juga dikenal sebagai filsafat moral, mengkaji pertimbangan moral atas tindakan manusia—apakah tindakan tersebut tergolong baik atau buruk, susila atau tidak—dalam konteks relasi antarindividu. Sebagai bagian dari filsafat, etika membahas sistem nilai, norma, dan prinsip moral yang berlaku dalam kehidupan sosial. Secara umum, etika terbagi ke dalam dua kategori utama:

a. Etika Deskriptif, lebih menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku dan membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama.

b. Etika Normatif, merupakan kajian terhadap ajaran norma baik-buruk sebagai suatu fakta dan tidak untuk diajukan secara rasional tetapi merefleksikan suatu keharusan. Etika ini terbagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus (Sri Rahayu Wilujeng, 2011). Secara garis besar etika dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Etika umum, merupakan kajian yang menyoroti prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap perilaku manusia secara universal, dan 2) Etika khusus, memfokuskan pembahasannya pada prinsip-prinsip moral dalam kaitannya dengan tindakan manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam perannya sebagai makhluk sosial.

Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya dipahami sebagai dasar normatif, melainkan sebagai way of life yang merefleksikan pandangan hidup bangsa Indonesia secara integral. Ia juga berfungsi sebagai kerangka berpikir normatif yang memberikan arah dalam bertindak dan bersikap, baik pada tataran personal maupun kolektif. Dalam perspektif etika terapan, Pancasila hadir untuk membentuk landasan moral dalam diri setiap individu, mendorong tumbuhnya spiritualitas yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik yang memiliki tanggung jawab intelektual kehadiran sistem etika yang komprehensif menjadi sangat vital. Etika Pancasila memberikan pijakan moral dalam setiap keputusan ilmiah yang diambil. Tanpa landasan nilai yang kokoh, keputusan-keputusan dalam ranah akademik dapat kehilangan arah dan berisiko mereduksi ilmu pengetahuan menjadi alat teknokratis semata, yang steril dari dimensi kemanusiaan dan kebajikan. Oleh karena itu, integrasi nilai etis dalam dunia akademik bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan dalam menjaga marwah dan kebermaknaan ilmu itu sendiri. (Rahmah Ningsih, 2019:2-3).

Memaknai Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai landasan normatif bagi perilaku dan sikap individu dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik secara etis apabila sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Meskipun nilai-nilai tersebut berakar kuat dalam realitas sosial, religius, dan adat budaya masyarakat Indonesia, esensinya bersifat universal—artinya, nilai-nilai itu melampaui sekat-sekat geografis dan temporal, sehingga dapat diterima oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini menjadikan Pancasila bukan sekadar konstruksi etika lokal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki daya jangkau global dalam menjawab persoalan moralitas lintas zaman dan lintas budaya. (Rahmanuddin Tomalili, 2019:64-66).

Etika Pancasila ini berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti:

1. Nilai Ketuhanan
   Nilai ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki nilai karena mengandung sifat yang absolut. Suatu tindakan dianggap baik apabila selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, norma, serta hukum yang berasal dari Tuhan.
2. Nilai Kemanusian
   Sebuah tindakan dapat dinilai baik apabila sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Inti dari nilai kemanusiaan terletak pada penerapan prinsip keadilan dan sikap yang beradab.
3. Nilai Persatuan
   Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Suatu sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan dikatakan perbuatan yang tidak baik.
4. Nilai Kerakyatan
   Nilai yang mengandung prinsip-prinsip, seperti hikmat, kebijaksanaan, dan semangat permusyawaratan. Suatu tindakan tidak dapat langsung dikatakan baik hanya karena disetujui banyak orang atau membawa manfaat umum, melainkan harus melalui proses musyawarah yang dilandasi oleh kebijaksanaan.

Dari nilai kerakyatan inilah lahir nilai-nilai turunan seperti penghargaan terhadap perbedaan, pengakuan atas kesetaraan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial lainnya.

Nilai kerakyatan dalam Pancasila dapat diartikan sebagai kualitas maupun sifat yang melekat pada suatu objek dan memiliki cita-cita, keharusan, harapan serta dambaan. Ada dua jenis nilai yang perlu dipahami, kedua nilai tersebut adalah nilai material dan nilai vital.

Nilai Vital adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi manusia untuk mengadakan aktivitas, sedangkan Nilai Material adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi kesehatan rohani dan jasmani. Karena Indonesia menjunjung tinggi nilai kerakyatan, maka dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di samping itu pula setiap warga negara harus saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, tanpa memandang status, ras, agama maupun jenis kelamin (Mochammad Aris Yusuf, 2023).

5. Nilai Keadilan

   Sebagaimana tercermin dalam sila kelima, menilai suatu tindakan sebagai baik apabila selaras dengan prinsip keadilan untuk kepentingan bersama. Menurut Lawrence Kohlberg, keadilan merupakan bentuk kebajikan paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu maupun masyarakat.

Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dimaksudkan untuk terintegrasi sebagai prinsip-prinsip penuntun (*guiding principles*) yang membimbing generasi muda dalam mengarahkan potensi kecerdasan dan kepribadiannya secara positif dan bermakna. Jika dilihat, Pancasila sebagai sistem etika ini ada beberapa masalah yang terjadi bagi bangsa Indonesia yakni:

1. Pertama, banyaknya masalah penggelapan yang mewabah di negeri Indonesia sehingga akibatnya bisa melunturkan sendi-sendi kehidupan warga negara.

2. Kedua, masih terjadinya aksi pelaku teror atau terorisme yang menggunakan simbol kepercayaan sehingga dapat menghambat semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, budaya, golongan, mengancam disintegrasi bangsa dan persatuan.
3. Ketiga, masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa.
4. Keempat, kesenjangan antara kelompok sosial masyarakat antara yang kaya dan miskin masih menandai kehidupan warga Indonesia sehingga tidak sama rata.
5. Kelima, ketidakadilan aturan yang masih terjadi pada proses peradilan di Indonesia, masih ada hukum yang tidak seimbang dan kadang melihat jabatan dan adanya kesenjangan antara miskin dan kaya.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, menunjukkan pentingnya peranan Pancasila serta kedudukan Pancasila menjadi sistem etika lantaran Pancasila menjadi arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara untuk beraktivitas serasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila (Fannia Sulistiani Putri, dkk, 2021:181-182).

Pancasila sebagai sistem etika tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons atas berbagai realitas yang mengharuskan kehadirannya dalam kehidupan bernegara. Salah satu alasan penting mengapa Pancasila perlu dijadikan sistem etika adalah karena terjadinya kemerosotan moral di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, yang dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sejalan dengan pancasila sebagai etika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 36 yang berbunyi:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri.

QS An-Nisa' ayat 36 menegaskan urgensi untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, serta mengaitkannya sebagai bagian dari kewajiban sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar etika negara Indonesia memberikan fondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan bertetangga yang dilandasi oleh saling menghormati, keadilan, dan keberlanjutan sosial.

Dekadensi moral adalah suatu keadaan kemunduran moral bahwa individu maupun kelompok tidak menaati peraturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Kemunduran moral ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang tidak sejalan dengan Pancasila, tetapi nilai dari luarlah yang berlaku dominan (Angga Dwi Prasetyo, 2022:108-109).

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti:

1. Masih terjadinya korupsi yang masih terjadi di Indonesia yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan.
2. Terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Banyak terjadinya pengingkaran pembayaran pajak dan ketidakadilan hukum di Indonesia.
4. Kesenjangan antar kelompok miskin dan kaya masih terjadi dan menjadi penanda kehidupan masyarakat Indonesia.

5. Aksi terorisme yang menjadi terbelahnya toleransi umat beragama.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu penyelesaian permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal-hal penting yang sangat penting bagi pengembangan sistem etika ini, meliputi:

1. Menjadikan Pancasila sebagai landasan moral sekaligus sumber inspirasi dalam menentukan sikap, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara
2. Memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi setiap tindakan sosial, sehingga masyarakat memiliki orientasi yang terarah dalam menjalin hubungan di tingkat lokal, nasional, regional, hingga global.
3. Menggunakan Pancasila sebagai kerangka analisis utama dalam perumusan kebijakan publik, agar setiap kebijakan tetap berpijak pada semangat nasionalisme dan nilai-nilai luhur Pancasila.
4. Berperan sebagai filter terhadap berbagai nilai dan pengaruh yang muncul akibat globalisasi, sehingga membentuk cara pandang warga negara yang tetap berakar pada identitas kebangsaan.

Implementasi Etika Pancasila pada Kehidupan

Etika Pancasila merupakan sistem penilaian moral yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur dalam menentukan kebaikan atau keburukan suatu perilaku. Perilaku dikatakan baik apabila suatu nilai yang dijunjung memberikan dampak positif kepada yang lain dan dikatakan buruk apabila memberikan dampak negatif. Berikut adalah contoh dari perilaku baik dan buruk dalam nilai Pancasila seperti yang telah dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang sejalan dengan implementasi etika dalam kehidupan berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan bahwa keluarga harus saling menjaga dan senantiasa saling menuntun atau meng-arahkan ke jalan yang benar. Ini tentunya sangat berkesinambungan antara isi kandungan ayat tersebut terkait etika Pancasila dalam keluarga. Dalam hal ini, keluarga merupakan pendidikan pertama khususnya dalam memberikan fondasi moral dan etika bagi anak, sehingga sangat berperan dalam pembentukan karakter anak. Keluarga juga berperan dalam menopang ketahanan nasional yaitu dengan cara menumbuhkan nilai-nilai moral dan adab sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila.

Etika Pancasila termanifestasi melalui nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam setiap sila, seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya memiliki kekuatan normatif yang sah menurut konstitusi, tetapi juga memiliki relevansi nyata dan aplikatif dalam dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Artinya, Pancasila sebagai sistem etika bersifat sah dari sisi hukum dan sekaligus dapat diimplementasikan dalam konteks sosial secara nyata. Apabila nilai-nilai tersebut dipahami secara menyeluruh dan diwujudkan dalam perilaku konkret, Pancasila memiliki kekuatan transformatif dalam menanggulangi kesenjangan sosial dan mengatasi berbagai bentuk krisis moral di tengah masyarakat. Keberadaan Pancasila sebagai kerangka etika semakin krusial ketika dihadapkan pada kompleksitas tantangan moral dan sosial yang tengah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara (Afrinida, 2021).

1. Nilai Ketuhanan

Sila pertama Pancasila menempatkan dimensi ketuhanan sebagai fondasi utama dalam kehidupan individu maupun kolektif. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia bahwa prinsip-prinsip moral tertinggi bersumber dari keberadaan Tuhan sebagai entitas transenden yang menjadi penjamin etika universal. Oleh karena itu, setiap perilaku warga negara idealnya dibangun di atas landasan nilai-nilai moral yang berakar dari ajaran agama, yang menjadi rujukan utama dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Contoh perilaku baik dalam nilai ketuhanan yaitu sebagai berikut:

a. Saling toleransi sesama umat beragama agar bisa mencapai sebuah kenyamanan bersama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
b. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
c. Menghargai hak setiap individu dalam menjalankan ibadah berdasarkan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.
d. Menjunjung tinggi keimanan serta menjalankan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh setiap orang.
e. Mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan.

Contoh perilaku buruk dalam nilai ketuhanan yaitu sebagai berikut:

a. Intoleransi terhadap agama lain, seperti menolak atau mengganggu adat budaya agama lain.
b. Memaksakan kehendak beragama pada orang lain.
c. Membatasi orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
d. Tidak mengakui keberadaan Tuhan.

e. Melakukan penistaan agama.

2. Nilai Kemanusian

Nilai kemanusiaan merefleksikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki posisi paling mulia di antara makhluk lainnya. Kedudukan istimewa ini mengimplikasikan bahwa setiap individu wajib diperlakukan secara bermartabat, adil, dan berperikemanusiaan. Individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong terbentuknya masyarakat yang mengedepankan perilaku manusiawi—yakni sikap yang menghargai, memahami, dan memperlakukan sesama dengan penuh empati. Sebaliknya, ia akan menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan, mendiskreditkan, atau menafikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Sila ini mewakili kemauan bangsa Indonesia untuk mendapatkan posisi yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Prinsip pada sila kemanusiaan yaitu etika dan tindakan kemanusiaan diwujudkan dengan sikap adil dan beradab guna menjamin hubungan antar manusia mencapai nilai kemanusiaan yang tertinggi yaitu kebajikan dan arif.

Contoh perilaku baik dalam nilai kemanusian:

a. Menghargai sebuah perbedaan dalam masyarakat yang terdiri atas suku, ras, agama, dan adat istiadat.
b. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
c. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan.
d. Bersikap adil kepada setiap orang.
e. Menolong sesama yang membutuhkan dan bersikap sopan & ramah.

Contoh perilaku buruk dalam nilai kemanusian:

a. Membeda-bedakan ras, agama, suku, dan adat istiadat orang lain.
b. Diskriminasi terhadap perbedaan derajat masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

c. Tidak puasa, tetapi makan dan minum diarea terbuka atau publik.
d. Menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat.
e. Enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan.

3. Nilai Persatuan

Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan rakyat Indonesia.

Persatuan di dalam rakyat Indonesia sebagai kekuatan dasar untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan Indonesia dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sistem etika dalam sila persatuan berlandaskan pada semangat, kebersamaan, serta solidaritas yang kuat sehingga muncul kekuatan untuk menghadapi nilai -nilai yang memecah bangsa dan negara (nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila).

Contoh perilaku baik dalam nilai persatuan:

a. Menggunakan dan mecintai produk dalam negeri agar perekonomian di Indonesia menjadi lebih maju.
b. Memajukan pergaulan untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhineka Tunggal Ika.
c. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
d. Cinta tanah air dan bangsa.
e. Menghargai pendapat sesama kelompok.

Contoh perilaku buruk dalam nilai persatuan:

a. Lebih bangga dengan menggunakan produk luar negeri.
b. Tidak adanya rasa persatuan untuk melindungi bangsa.
c. Memilih-milih dalam bergaul, seperti bergaul dengan membedakan warna kulit, ras, dan derajat.
d. Bersikap egois dan ingin menang sendiri.
e. Melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba.

4. Nilai Kerakyatan

Pancasila merupakan landasan fundamental negara Indonesia sekaligus menjadi pijakan ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila yang terkandung di dalamnya menjadi pilar utama dalam membentuk tata nilai dan etika kolektif masyarakat Indonesia. Salah satu sila yang memuat dimensi demokratis secara eksplisit adalah sila keempat, yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Frasa "kerakyatan" dalam sila tersebut menegaskan pentingnya prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme deliberatif—yakni musyawarah yang menjunjung kebijaksanaan kolektif.

Representasi visual Pancasila, kepala banteng dijadikan simbol sila keempat, melambangkan semangat kolektivitas dan diskusi publik. Banteng yang hidup berkelompok menjadi metafora dari manusia sebagai makhluk sosial yang mengambil keputusan tidak secara individualistik, melainkan melalui pertimbangan bersama. Etika yang terkandung dalam sila ini bertumpu pada asas musyawarah untuk mufakat, yang berarti setiap individu dihargai pandangannya, sehingga pengambilan keputusan harus mencerminkan kehormatan terhadap diri sendiri sekaligus penghormatan terhadap martabat orang lain.

Contoh perilaku baik dalam nilai kerakyatan:

a. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
b. Menghargai pendapat orang lain.
c. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
d. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab.
e. Musyawarah dilakukan dengan hati Nurani luhur.

Contoh perilaku buruk dalam nilai kerakyatan:

a. Tidak menghargai pendapat orang lain.
b. Tidak menjalankan tugas yang telah diemban.
c. Egois terhadap pendapatnya.

d. Main hakim sendiri.
e. Memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah.

5. Nilai Keadilan

Pada simbol padi dan kapas tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah keadilan sosial masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila keadilan perwujudan atau implementasinya lebih menonjolkan pada kebijaksanaan dan keadilan itu sendiri, bukan hanya sekedar menekankan kewajiban dan tujuan saja.

Contoh perilaku baik dalam nilai keadilan:

a. Keadilan dihadapan hukum tanpa membedakan derajat.
b. Memiliki hak dan kewajiban.
c. Mendapatkan keadilan dari segala bidang mulai dari kesehatan sampai hukum.
d. Mendukung kemajuan yang merata dan keadilan sosial, seperti membantu akses pendidikan dan mencukupi kebutuhan dasar untuk semua orang.
e. Bekerja keras untuk mencapai tujuan.

Contoh perilaku buruk dalam nilai keadilan:

a. Tidak mendapat keadilan dimata hukum.
b. Tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya karena perbedaan derajat.
c. Boros dan bermegah-megahan.
d. Tindakan diskriminatif dalam pendidikan atau lapangan kerja.
e. Pengabaian kesejahteraan masyarakat marginal.

Penutup

Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung guna memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, etika adalah cabang ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan nilai baik dan buruk. Oleh

karena itu, Pancasila sebagai sistem etika dapat dimaknai sebagai pedoman moral dalam bertindak dan berperilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dan di dalam setiap sila-sila Pancasila pasti ada sistem etikanya. Etika yang terkandung pada setiap nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di setiap nilai ada pengaturan etika pada kehidupan sehari-hari, seperti nilai ketuhanan yaitu saling toleransi pada semua umat beragama.

Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan karena masih banyak terjadi permasalah etika di Indonesia baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu permasalahan tersebut adalah kemunduran moral pada generasi muda yang merupakan dampak dari globalisasi. Dari penerapan sistem etika ini diharapkan mampu merubah etika bangsa.

Etika dan Pancasila merupakan dua entitas konseptual yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, ketika diposisikan sebagai sistem etika, memiliki fungsi utama dalam membentuk dan mengembangkan dimensi moralitas individu. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya memberikan kerangka normatif yang mendorong lahirnya sikap spiritualitas serta tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara.

Suatu tindakan dikategorikan sebagai baik secara etis bukan hanya ketika tidak melanggar nilai-nilai Pancasila, tetapi justru ketika selaras dan mampu menguatkan aktualisasi nilai-nilai tersebut. Meskipun Pancasila lahir dari konteks historis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia, nilai-nilainya tidak bersifat eksklusif. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila memiliki sifat universal sehingga dapat diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat lintas ruang dan waktu. Oleh karena itu, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan sistem moral yang hidup, membimbing, dan menyatukan bangsa dalam keberagaman.

BAB II

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI

Secara etimologis, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, pañca yang berarti lima, dan śīla yang berarti prinsip atau asas dasar. Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia, yang memuat lima nilai utama dan secara resmi disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kelima prinsip ini menjadi dasar normatif bagi seluruh warga negara Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai landasan filosofis dalam merumuskan berbagai norma, peraturan, serta sistem hukum yang berlaku di tanah air hingga kini.

Pada dasarnya, Pancasila merupakan sistem nilai yang utuh dan menyeluruh dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila tidak sekadar berfungsi sebagai lambang negara, tetapi juga sebagai landasan moral yang mengajarkan prinsip-prinsip utama seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pegangan yang kuat bagi seluruh warga negara Indonesia, baik dalam bentuk nilai dasar (*foundational values*), nilai instrumental (*instrumental values*), maupun nilai praksis (practical values) yang tercermin dalam tindakan dan kebijakan sehari-hari dalam kehidupan kebangsaan.

Pengertian Sistem Nilai

Menurut Fat, sistem adalah suatu himpunan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, berkaitan, saling mendukung, keseluruhan bersatu dalam kesatuan (*unity*) untuk mecapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga adanya sistem pancasila adalah bukti bahwa pancasila antara sila satu dan lainnya saling berhubungan, berkesinambungan, dan tidak bisa dipisahkan baik dari tujuan, fungsi, dan maknanya.

Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Nilai sendiri terbagi menjadi tiga, yakni:

a. Nilai Dasar yaitu nilai yang masih bersifat abstrak, paten, dan tidak terbantahkan.
b. Nilai Instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar dan bentuknya adalah norma-norma sosial dan hukum yang tercantum dalam peraturan lembaga negara, dan dapat berubah tergantung situasi dan waktu tertentu.
c. Nilai Praksis yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental yang berwujud indikator konkret dan langsung di aplikasikan dalam kehidupan masyrakat sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota Masyarakat, tentang apa yang dipandang baik, penting, dan berharga dalam tatanan kehidupan, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan

masyarakat, sehingga sistem nilai Pancasila adalah konsep menyeluruh tentang seberapa penting dan berharga Pancasila sehingga berhasil menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyakat. Banyak sekali nilai yang terkandung pada Pancasila.

Nilai-Nilai dalam Pancasila

Pancasila sebagai sistem nilai yang mengandung keterkaitan nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

1. Nilai Dasar
   a. Nilai Ketuhanan

      Sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, negara yang berlandaskan prinsip ini menjamin dan melindungi hak setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, negara juga memberikan kebebasan bagi seluruh individu untuk menjalankan ibadahnya secara aman, tertib, dan tanpa diskriminasi (Puspita Ratri & Najicha, 2022). Sehingga, secara tidak langsung Pancasila mengajak dan mengajarkan kepada seluruh warga Indonesia agar bertuhan atau beragama tanpa menjatuhkan agama lain, yang disebut dengan toleransi. Sehingga, sila pertama ini dianggap menjadi inti diantara sila-sila yang lain.

   b. Nilai Kemanusiaan

      Sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sila ini merupakan perwujudan nyata dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang setara. Dalam butir-butir pengamalannya, BPIP menekankan pentingnya mewujudkan nilai kemanusiaan melalui sikap menghargai kesetaraan

derajat, hak, dan kewajiban setiap individu, tanpa membedakan suku, ras, agama, keturunan, atau latar belakang lainnya. Selain itu, sila ini juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

c. Nilai Persatuan

Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, memuat makna dan nilai-nilai yang mendalam serta memiliki keterkaitan erat dengan sila-sila lainnya, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya. Esensi utama dari sila ini adalah kemampuan untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap ini menjadi fondasi krusial bagi terwujudnya keutuhan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Nilai Kerakyatan

Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung makna bahwa pemerintahan dijalankan oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Prinsip ini diwujudkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, karena keberadaan mereka merupakan hasil pilihan rakyat yang diberi mandat untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat kepada negara.

e. Nilai Keadilan

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan tujuan utama dari nilai-nilai Pancasila, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Keadilan dalam konteks ini mencakup kesetaraan dalam pelayanan, pemenuhan hak, serta pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau perbedaan budaya lainnya.

2. Nilai Instrumental
   a. Undang-Undang

      Adalah hukum atau norma yang tercipta dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya peraturan hukum di dalam undang-undang merupakan perwujudan nyata dari upaya pengamalan 5 sila. Nilai-nilai inti Pancasila secara utuh tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang diatur dengan ketentuan UUD 1945.

   b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

      Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memaksa. Presiden berhak mengeluarkan PERPPU karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan hukum Ini juga termasuk usaha pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum secara adil dan maksimal.

   c. Peraturan Daerah

      Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan Bupati/Wali Kota. Setiap daerah berhak untuk membuat aturan-aturan yang hanya berlaku di kawasannya saja, selama peraturan itu tidak merugikan pihak manapun dan pastinya sudah dengan persetujuan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah pusat.

   d. Peraturan Kepala Daerah

      Adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan PerDa. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan PerDa dan PerKaDa serta pengadilan dan pelaporan penegakan PerDa dan Perkada.

3. Nilai Praksis

   Adalah nilai-nilai yang diajarkan dan dilaksanakan masyarakat sehari-hari, sifatnya lentur, artinya dapat berubah sesuai kondisi zaman yang terus berjalan.

a. Sila Pertama
   1) Menumbuhkan perilaku saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
   2) Menumbuhkan perilaku saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
   3) Membina kerukunan di antara sesama umat beragama
   4) Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain
   5) Masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya,
   6) Menurut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
   7) Mengembangkan sikap hormat dan bekerjasama antara pemeluk Tuhan Yang Maha Esa yang satu dengan pemeluk agama lain
b. Sila Kedua
   1) Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan.
   2) Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan YME.
   3) Bersikap non-diskriminatif terhadap orang lain
   4) Bersikap Melindungi nilai-nilai kemanusiaan
   5) Semangat untuk kegiatan kemanusiaan
c. Sila Ketiga
   1) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
   2) Menjunjung tinggi Mengembangkan perilaku saling menghargai kebudayaan antardaerah
   3) Mendahulukan kepentingan bengsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
   4) Menjunjung persatuan dan kesatuan.
   5) Menumbuhkan rasa kebanggaan bangsa Indonesia dan kampung halaman
   6) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

d. Sila Keempat
   1) Ikut dalam pemilihan umum, pilpres, atau pilkada.
   2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
   3) Menghargai hasil musyawarah.
   4) Menghargai dan memghormati pendapat orang lain.
   5) Warga negara, semua orang Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
   6) Sebagai Memprioritaskan pertimbangan ketika membuat keputusan untuk keuntungan yang lebih besar
e. Sila Kelima
   1) Senantiasa saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
   2) Mengembangkan perbuatan luhur yang menggambarkan perilaku kekeluargaan serta gotong royong.
   3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
   4) Menghormati hak orang lain

4. Nilai Obyektif

   Nilai pancasila bersifat obyektif artinya:

a. Rumusan nilai-nilai dari sila-sila pancasila bersifat umum, universal dan abstrak
b. Nilai-nilai pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu
c. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memenuhi kualifikasi sebagai norma dasar (staatsfundamentalnorm) negara. Kedudukannya sebagai prinsip fundamental menjadikannya sumber utama dalam sistem hukum positif Indonesia sekaligus sebagai puncak dari hierarki norma hukum nasional. Karena sifatnya yang mendasar dan menyangkut eksistensi serta identitas negara, Pancasila tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum apa pun. Perubahan terhadapnya akan berdampak langsung pada keberlangsungan dan keutuhan negara itu sendiri.

5. Nilai Subjektif Pancasila

   Sifat subjektif Pancasila melekat erat pada para pendukung dan pelaksana nilai-nilainya, yaitu masyarakat serta pemerintah Indonesia. Menurut Darji Darmodiharjo dalam pembahasannya

tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional, aspek subjektif Pancasila tercermin dalam beberapa hal berikut:Nilai-nilai pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian dan refleksi filosofis bangsa Indonesia

a. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil dari proses pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia terhadap pengalaman historis dan kebudayaannya.
b. Pancasila merepresentasikan pandangan hidup bangsa Indonesia yang membentuk jati diri nasional, dengan kandungan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
c. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan suara hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian serta budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Sistem Nilai dalam Pancasila

Sila-sila pada pancasila saling berkaitan dan mengikat, sebab satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan. Pancasila juga suatu kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolak atau bertentangan.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

   Dianggap sebagai pondasi utama pada sila-sila berikutnya. Artinya manusia adalah makhluk yang bertuhan, sehingga segala aspek kegiatan sehari-harinya berpedoman pada baik dan buruk menurut agama yang dianutnya.

   Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kesadaran spiritual bahwa kehidupan di dunia ini sejatinya merupakan fase ujian bagi manusia. Setiap individu diposisikan sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan hasil dari ujian kehidupan tersebut akan menentukan nasibnya di alam akhirat yang bersifat kekal. Dalam konteks ini, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan perbuatan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang

menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nilai ini menegaskan dimensi etika transendental dalam kehidupan sosial dan ekologis umat manusia.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

   Sila kedua ini berkesinambungan dengan sila satu dan sila dua. Manusia yang bertuhan sudah pasti memperlakukan sekitarnya dengan cara adil dan beradab. Semua agama sudah pasti mewajibkan pemeluknya untuk berhubungan baik dengan sekitar, baik dengan hewan, tumbuhan, dan manusia. Dengan berhubungan baik dengan sesama adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur.

   Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan panduan etis yang bersifat universal sekaligus kontekstual bagi para ilmuwan dan praktisi teknik di Indonesia. Prinsip humanisme yang terkandung di dalamnya menuntut agar setiap manusia diperlakukan selaras dengan kodratnya sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya, perlakuan terhadap manusia harus mempertimbangkan kebutuhan dasarnya—seperti terpenuhinya aspek material, kebutuhan untuk bersosialisasi, pengakuan terhadap eksistensinya, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta kesempatan untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan potensi dan kapasitas terbaik yang dimilikinya.

3. Sila Persatuan Indonesia

   Sila ketiga ini dijiwai oleh sila dua dan menjiwai sila empat. Dengan memperlakukan manusia dengan adil dan beradab sudah pasti tercipta masyarakat yang bersatu. Dan upaya lain unuk mewujudkan masyararakat yang bersatu adalah dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam aspek kehidupan apapun musyawarah sangat diperlukan.

   Sila Persatuan Indonesia menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks profesional, para ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi prinsip persatuan ini dalam setiap praktik dan pengambilan

keputusan keilmuan mereka. Nilai ini menuntut agar setiap karya dan inovasi yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada kepentingan kolektif, memperkuat kohesi sosial, serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

   Sila keempat dalam Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, merupakan sila yang secara substansial dijiwai oleh sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sekaligus menjadi jiwa bagi sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Konsep musyawarah dalam sila ini bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bersatu, di mana setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan prinsip keadilan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat.

   Penegasan pada prinsip kedaulatan rakyat, yakni bahwa pembentukan dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia berakar pada kehendak seluruh rakyat, serta bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan bernegara, tanpa ada diskriminasi dalam partisipasi, kontribusi, maupun penerimaan manfaat dari sistem yang dibangun secara demokratis tersebut.

5. Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan puncak nilai yang secara substansial dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, serta Kerakyatan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Artinya, upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari dasar spiritualitas, penghargaan terhadap martabat manusia, semangat kebersamaan nasional, dan proses demokratis yang bijaksana.

Pancasila dalam Konteks Kehidupan

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus sebagai panduan moral bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan komunitas sekitar.. Nilai-nilai Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang sejalan dengan pancasila dalam konteks kehidupan berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: *Dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*

Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu, tanpa memandang suku, agama, atau kebangsaan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadits yang relevan dengan pembahasan tersebut adalah hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa yang tidak memperdulikan urusan umat Islam, bukanlah bagian dari mereka." Hadits ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap nasib umat atau bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai puncak perjuangan kemerdekaan mengandung makna solidaritas, kesatuan, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, sebagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Penutup

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai system nilai amat sangat penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Bersatu, dan Makmur. Pancasila secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai system nilai mengandung serangkaian nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar ini adalah tumpuan utama dalam Pancasila itu sendiri. Sedang nilai instrumental yang terkandung didalamnya, meskipun bersifat tidak permanen dan bisa diubah sewaktu-waktu juga tetaplah nilai yang juga harus di patuhi dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kewajiban penegakan hukum tidak hanya pada pemerintah, rakyat juga harus ikut berperan dengan mematuhi dan menjalankan hasil putusan dari para lembaga dan dewan perwakilan. Adanya Undang-Undang, PERPU, PERDA dan lainnya adalah upaya pemerintah utuk menciptakan masyarakat yang Makmur, adil, dan sejahtera. Dengan menjalankan nilai-nilai praksis Pancasila dalam keseharian juga salah satu upaya bersama antara warga masyarakat agar kehidupan bernegara ini sesuai dengan harapan bangsa dan negara.

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM MORAL

Pancasila merupakan ideologi fundamental bagi bangsa Indonesia yang sekaligus berfungsi sebagai pijakan bagi sistem nilai dan moralitas yang dianut dalam kehidupan berbangsa. Dalam kedudukannya sebagai sistem moral, Pancasila menyediakan kerangka etika yang menjadi rujukan normatif bagi perilaku individu dalam konteks sosial, politik, dan kenegaraan. Peran strategis Pancasila dalam membentuk tatanan moral kolektif menjadikannya instrumen utama dalam membangun relasi yang harmonis antara individu, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis, menjadi pedoman hidup yang mendorong warga negara untuk bertindak dengan tanggung jawab, kesadaran moral, serta orientasi pada kepentingan umum. Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan juga panduan etis yang hidup dan operasional dalam dinamika keseharian masyarakat Indonesia.

Selain keadilan sosial, Pancasila juga menekankan nilai-nilai seperti demokrasi, musyawarah, konsensus, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial dan politik. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Pancasila sebagai sistem moral mengajarkan kepada masyarakat pentingnya mendengarkan pendapat semua pihak, mencapai mufakat, dan bekerja sama secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (Kirdi Dipoyudo, 2023).

Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi spiritual dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam sila pertama mengarahkan setiap individu untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan ajaran agama masing-masing dengan penuh kasih, kedamaian, dan semangat toleransi. Prinsip ketuhanan ini menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan antarumat beragama serta antar kepercayaan di Indonesia, yang plural secara kultural dan spiritual. Pancasila sebagai sistem moral menyediakan kerangka etika yang kokoh dalam proses pembentukan karakter bangsa yakni karakter yang menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan semangat kebersamaan. Melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan setiap warga negara dapat mengambil peran aktif dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat.

Pancasila sebagai sistem moral meliputi hubungan individu dengan Tuhan, hubungan individu dengan sesama manusia, serta hubungan individu dengan lingkungan alam. Pancasila menjadi dasar moral bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memberikan arah dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, beradab, dan harmonis. Ruang lingkup dalam pancasila membahas mengenai sistem dan moral, makna nilai yang terkandung dalam pancasila, serta sumber fungsi dan juga jenis moral.

Pengertian Sistem dan Moral

Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga adanya sistem pancasila adalah bukti bahwa pancasila antara sila satu dan lainnya saling berhubungan, berkesinambungan, dan tidak bisa dipisahkan baik dari tujuan, fungsi, dan maknanya. Berikut adalah pengertian sistem menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir' sistem adalah sekumpulan elemen yang salingterkait atau terpadu yang dimaksutkan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ludwig Von Bertallanffy adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. Menurut R. Fagen dan A. Hall adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut, serta hubungan antara sifat yang mereka punya. Menurut Azhar Susanto, sistem merupakan sekumpulan subsistem, bagian, atau komponen baik yang bersifat fisik maupun nonfisik—yang saling terhubung dan bekerja secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Sutarman, sistem merupakan sebuah kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain, yang secara terpadu berfungsi untuk menjalankan suatu proses guna mencapai sasaran atau tujuan pokok yang telah ditetapkan.

Moral merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan dari unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai- nilai yang diajarkan agama. Kaitannya dengan kebudayaan, dimana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda- beda berdasarkan sistem nilai sosial yang berlaku dan dikonstruksikan sejak lama.

Moral tersebut sistem aturan yang mengatur interaksi sosial dan hubungan sosial individu dalam masyarakat dan didasarkan pada konsep kesejahteraan, kepercayaan, keadilan dan hak (A. Gunawan Setiardja, 1990:90).

Menurut Maria J. Wantah, Moral adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk menentukan nilai benar maupun salah dan baik buruknya suatu perilakuindividu yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Wila Huky, Wila Huky merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif sebagai berikut:

1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu (A. Gunawan Setiardja, 1990:90).
2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

3. Moral merupakan perilaku manusia dalam kehidupan yang didasari oleh kesadaran akan kewajiban untuk berbuat baik, selaras dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di lingkungan sosialnya.

Menurut Widjaja AW dalam buku Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Menurut Russel Swanburg, moral memiliki makna sebagai suatu pernyataan dari gagasan, ide atau bahkan pikiran yang berhubungan dengan dorongan dan menggelegak pada diri seorang individu dalam bekerja serta berfungsi sebagai suatu aspek yang dapat membangkitkan perilaku seseorang (Hamzah Ja'kub, 1978:10). Menurut Elizabeth B. Hurlock, moral merupakan suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan serta adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan yang memiliki orientasi pada perilaku yang telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dalam makna kebudayaan. Menurut Imam Sukardi, moral merupakan karakteristik yang melekat pada sesuatu yang mengandung nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan pada sistem nilai yang diterapkan secara bersama-sama.

Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 105 yang sejalan dengan pancasila sebagai suatu sistem dan moral berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan janganlah kamu bersikap sebagai orang-orang yang terbelah menjadi berbagai-bagai golongan sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, dan mereka itu mendapat azab yang berat.*

Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak terpecah belah menjadi berbagai golongan yang saling bertentangan, karena hal tersebut dapat merusak kerukunan umat dan menciptakan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Dengan memegang teguh ajaran Pancasila, umat dapat merajut persatuan dan menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis di tengah-tengah perbedaan. Secara mendasar, moral bersumber dari nilai tentang sesuatu kebaikan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan seseorang. Sehingga suatu moral dapat melekat erat dengan nilai dari perilaku tersebut. Di dalam kehidupan, tidak ada perilaku seseorang yang terlepas dari peranan nilai.

Proses penyadaran moral dalam kehidupan berjalan secara berangsur-angsur, dimulai melalui interaksi sosial pada lingkungannya dengan terdapatnya berbagai larangan, perintah, ancaman atau bahkan celaan, serta adanya sebab- akibat yang timbul dari perbuatan seseorang mungkin dapat meliputi sesuatu yang menyenangkan atau mungkin yang mengecewakan.

Pada realitas sosial, masyarakat menyadari setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu pasti memiliki dampak pada kehidupan. Sehingga dalam hal ini, pentingnya berpedoman pada moral dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitar.

Makna Nilai - Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berarti adanya pengakuan terhadap keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius dan bukanlah atheis. Nilai ini menjauhkan bangsa Indonesia dari sifat dan sikap diskriminatif. Itu berarti bangsa Indonesia ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan. Selain itu,Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilih (Meilani Teniwut, 2022).

a. Bangsa Indonesia telah menyatakan iman dan pengabdiannya kepadaTuhan Yang Maha Esa,
b. Masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, menurut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,
c. Mengembangkan sikap hormat dan bekerjasama antara pemeluk Tuhan Yang Maha Esa yang satu dengan pemeluk agama lain,
d. Mendorong terciptanya keharmonisan antarumat beragama serta memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
e. Agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan aspek penting yang memengaruhi relasi spiritual antara manusia dan Sang Pencipta,
f. Menjunjung tinggi sikap saling menghormati dalam menjalankan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing,
g. Tidak dibenarkan untuk memaksakan agama atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti rasa sadar akan sikap serta perilaku yang bermoral sesuai dengan dasar hati nurani dan tidaksemena-mena dalam memperlakukan satu hal. Adil berarti sama, seimbang,setara di semua aspek kehidupan. Sedangkan, Beradap memiliki makna etika, sopan santun, akhlak serta moral yang baik. Nilai keadilan dan nilai beradap harus terus berdampingan dalam kehidupan sehari-hari dan juga harus dijunjung oleh setiap rakyat Indonesia (Laila Destiana Ayu Santoso, 2022).

a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
b. Mengakui semua kesetaraan manusia, persamaan hak, dan tanggung jawab manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal usul, agama, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan sebagainya,
c. Menumbuhkan cinta timbal balik untuk rekan-rekan kita,
d. Menumbuhkan sikap saling toleransi dan saling menghargai
e. Bersikap non-diskriminatif terhadap orang lain,

f. Melindungi nilai-nilai kemanusiaan,
g. Semangat untuk kegiatan kemanusiaan,
h. Berani membela kebenaran dan keadilan,
i. Masyarakat Indonesia merasa menjadi bagian dari kemanusiaan secara keseluruhan,
j. Menumbuhkan sikap hormat dan bekerjasama dengan ras lain.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia memiliki makna untuk bersatu dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme dalam NKRI. Nilaiini juga mengakui dan menghargai keanekaragaman bangsa. Persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keamanan nasional dan nasional dapat diposisikan sebagai kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan kelompok.

a. Bersedia siap berkorban untuk kepentingan negara dan negara, bila diperlukan,
b. Menumbuhkan cinta untuk bangsa dan negara,
c. Menumbuhkan rasa kebanggaan bangsa Indonesia dan kampung halaman,
d. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
e. Pembangunan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika,
f. Memajukan perkumpulan-perkumpulan demi persatuan dan kesatuan umat,
g. Mengakui keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang sebagai kekayaan bangsa,
h. Menciptakan kerukunan antar sesama,
i. Mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia (Trisna Wulandari, 2022).

4. Nilai Kerakyatan

Nilai Kerakyatan memiliki makna sebuah pemerintahan negara yangdiatur oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat dengan jalan musyawarah melalui berbagai lembaga perwakilan. Sebagai warga

negara, semua orang Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain.

a. Memprioritaskan pertimbangan ketika membuat keputusan untuk keuntungan yang lebih besar,
b. Konsultasi konsensus ditutupi oleh semangat keluarga,
c. Menghormati dan mendukung keputusan yang dibuat sebagai hasil musyawarah,
d. Menerima dan melaksanakan hasil konsultasi dengan itikad baik dan tanggung jawab,
e. Keputusan yang diambil secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan umum,
f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur,
g. Mendengar dan menghargai saran atau kritik orang lain (Meilani Teniwut, 2023).

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan mencerminkan tujuan utama negara, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur secara lahir maupun batin. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara tanpa diskriminasi dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun bidang lainnya (Laila Destiana Ayu Santoso, 2022).

a. Melakukan perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong,
b. Bersikap adil terhadap orang lain,
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
d. Menghormati hak orang lain,
e. Jangan menggunakan kepemilikan untuk merugikan atau merugikan kepentingan umum,

f. Menikmati kegiatan untuk mencapai kemajuan yang adil dan keadilan social.

Nilai-nilai inti Pancasila di atas merupakan kajian ilmiah yang dilakukan dan diarahkan pada kegiatan sehari-hari yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Semoga generasi penerus tumbuh sebagai pribadi yang berwatak dan berjiwa Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Tumbuhnya mereka yang menjiwai Pancasila mendorong tumbuhnya manusia yang sehat dan bermartabat sesuai budaya dan adatistiadat yang berkembang di Indonesia sebagai jiwa kerakyatan Indonesia.

Ciri-Ciri Nilai Moral

1. Terkait dengan aspek tanggung jawab, nilai-nilai moral berhubungan erat dengan kepribadian individu, yang menentukan apakah seseorang dapat dinilai bersalah atau tidak, berdasarkan sejauh mana ia menjalankan tanggung jawabnya.
2. Salah satu karakteristik utama dari nilai moral adalah keterkaitannya dengan suara hati nurani. Nilai ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan reaksi batiniah: menimbulkan rasa bersalah ketika diabaikan, dan memberikan kepuasan moral atau kebanggaan diri saat berhasil diwujudkan dalam tindakan nyata.
3. Mewajibkan. Nilai-nilai moral yang satu ini mewajibkan secara absolut dan tidak bisa ditawar. Seorang filsuf asal Jerman bernama Immanuel Kant, pernah menjelaskan tentang *imperative hypothesis* dan *imperative categories*. Dalam nilai moral terkandung suatu *imperative categories*, sedangkan nilai- nilai lain hanya berkaitan dengan *imperative hypothesis*. Artinya, untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu, biasanya diperlukan syarat atau langkah-langkah tertentu terlebih dahulu. Sebaliknya, nilai moral bersifat imperative categories, yaitu menuntut atau mewajibkan manusia untuk melaksanakannya secara langsung tanpa prasyarat apa pun.

4. Ciri terakhir dari nilai moral adalah sifatnya yang bersifat moral secara menyeluruh, yang berarti bahwa nilai moral tidak pernah berdiri sendiri secara "murni", melainkan selalu terkait dan terintegrasi dengan nilai-nilai lainnya (Ilham Fikriansyah, 2023).

Jenis- Jenis Nilai Moral

1. Moral Ketuhanan
   Moral ketuhanan adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkat religius atau keagamaan seseorang berdasar pada ajaran agama tertentu serta pengaruhnya pada diri seseorang. Moral ketuhanan diwujudkan dalam caramenghargai sesama manusia, hidup rukun dengan orang lain yang memilikikeyakinan berbeda. Contoh: Melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik baiknya.
2. Moral Etika dan Kesusilaan
   Moral Etika dan Kesusilaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan etika yang dijunjung suatu bangsa, masyarakat, serta negara baik secara tradisi maupun budaya. Diwujudkan ketika seseorang menghargai orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Contoh: Bertutur kata baik, Sopan santun, saling menghargai (Hamid Darmadi, dkk, 2020:80-81).
3. Moral Disiplin dan Hukum
   Moral disiplin dan hukum merupakan semua hal yang berkaitan dengan kode etik dan profesionalitas serta hukum yang berlaku disuatu masyarakat atau negara. Contoh: adalah dengan melakukan aktivitas sesuai aturan yang berlaku seperti menggunakan perlengkapan sesuai dengan hukum lalu lintas ketika berkendara.
4. Moral Ideologi dan filsafat
   Moral ideologi dan filsafat adalah hal yang menyangkut semangat kebangsaan, loyalitas terhadap cita-cita bangsa dan negara (Hanif Sri Yulianto, 2022). Moral ideologi dan filsafat dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi dasar negara, yaitu Pancasila. Contoh:

menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia.

Sumber Nilai Moral

Beberapa sumber nilai moral yang umum sebagai berikut:

1. Agama, Contoh: melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing.
2. Tradisi, Contoh: tradisi tingkeban, pitonan, mauludan, dll
3. Norma-norma sosial, Contoh: menolong sesama, menghargai serta menghormati orang lain.
4. Pendidikan, Contoh: membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, memberi salam ketika bertemu orang yang lebih tua.
5. Pengalaman Pribadi, Contoh: seseorang yang pernah mengalami kehilangan mungkin mengembangkan empati yang kuat terhadap orang lain yang mengalami kesedihan serupa.
6. Keluarga, Contoh: nilai kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dipelajari dari hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara.
7. Tokoh Inspiratif, Contoh: seorang pemimpin yang menunjukkan integritas dapat menjadi contoh bagi banyak orang.
8. Media dan Teknologi, Contoh: film atau program TV yang menggambarkan perilaku positif dapat mempengaruhi pandangan moral seseorang.

Sumber nilai moral dapat bervariasi dari individu ke individu, tergantung pada pengalaman dan latar belakang mereka (Reksa, 2023). Nilai-nilai ini membantu membentuk pandangan etika dan moral seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi Nilai Moral

1. Memberikan landasan bagi tindakan seseorang. Nilai moral memberikan panduan bagi seseorang untuk menentukanapa yang benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan mereka.
2. Menjaga keharmonisan social. Nilai moral membantu memelihara keharmonisan dalam masyarakat dengan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kejujuran.
3. Menjadi pedoman dalam membuat Keputusan. Nilai moral membaantu seseorang dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil.
4. Mendorong perkembangan pribadi. Nilai moral membantu seseorang dalam mengembangkan kepribadian yang baik dan terpuji, seperti rasa tanggung jawab, empati, dan keberanian.
5. Menjadi dasar bagi hukum dan peraturan. Nilai moral dijadikan dasar dalam pembuatan hukum dan peraturan dalam masyarakat, sehingga dapat membantu menjaga keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.
6. Membentuk Identitas Individu. Nilai moral membantu membentuk identitas pribadi seseorang. Nilai- nilai tersebut sangat mendasari siapa individu tersebut dan tidak dapat dipisahkan dari siapa diri mereka sebenarnya.
7. Membangun kehidupan yang sehat. Nilai moral yang sama-sama dipegang oleh individu dan kelompok masyarakat memudahkan pembentukan hubungan yang sehat, karena ada dasar bersama untuk kepercayaan dan keterlibatan sosial
8. Mengatasi Perbedaan dan Konflik. Dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, nilai moral dapat berfungsi sebagai dasar untuk berdialog dan mencari solusi yang adil.
9. Menyediakan Landasan untuk Pembangunan Masyarakat. Nilai-nilai moral yang kuat dapat membantu membangun masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab (Reksa, 2023).

Secara keseluruhan, nilai moral memiliki peran penting dalam membentuk dasar perilaku manusia serta membentuk masyarakat yang berfungsi dengan baik. Beberapa Penerapan Moral yang ada, di:

1. Rumah / Keluarga
   Mengajarkan anak untuk selalu mengucapkan "terima kasih" saat diberisesuatu atau dibantu oleh orang lain, Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, Menghargai pendapat anggota keluarga, Memberi salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, Mengucapkan kata "tolong" saat meminta bantuan orang lain, Memasak bersama-sama atau membersihkan rumah, Memberikan dukungan kepada satu sama lain dalam segala situasi, baikdalam suka maupun duka, Saling berbicara dengan lembut, memberikan dukungan emosional, dan merayakan momen-momen penting bersama.
2. Sekolah / Lembaga Pendidikan
   Tidak mencontek, Tidak membully teman, Menghormati ibu atau bapak guru, Mengerjakan PR, Melaksanakan piket, Mematuhi peraturan dan tata tertib, Menghargai perbedaan budaya, agama dan latar belakang antar teman.
3. Masyarakat
   Mengikuti kerja bakti, Gotong royong, Menghargai pendapat orang lain, Menghormati antar sesama, Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat, Mencegah pertikaian dalam masyarakat.
4. Negara
   Membayar pajak, Menaati peraturan yang berlaku, Menghormati antar suku, agama, dan ras, Ikut pemilu, Tidak korupsi, Mendukung program pemberdayaan Masyarakat.

Penutup

Nilai moral adalah prinsip-prinsip yang memandu perilaku seseorang dan memberikan dasar bagi keputusan yang diambil. Nilai-nilai ini biasanya merupakan standar yang diakui oleh masyarakat atau oleh suatu kelompok tertentu dan sering dianggap sebagai dasar untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah.

Nilai-nilai moral dapat bervariasi antara satu masyarakat atau kelomkok dengan yang lainnya, tetapi beberapa nilai moral umumnya diakui secara universal, seperti kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan pengampunan.

Pada hakikatnya nilai-nilai moral adalah ciri-ciri kepribadian yang membimbing setiap orang untuk membuat penilaian dan keputusan berdasarkan apa yang dianggap benar atau salah. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, nilai-nilai moral dapat bervariasi pada setiap orang. Inilah sebabnya mengapa setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis dan situasi.

BAB IV

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

Istilah sistem ketatanegaraan terdiri dari dua unsur utama, yakni "sistem" dan "ketatanegaraan." Secara umum, sistem dapat dipahami sebagai kumpulan komponen atau elemen yang saling terhubung dan bekerja secara sinergis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam struktur sistem, jika salah satu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau mengalami kerusakan, maka tujuan yang hendak dicapai akan terganggu, bahkan mungkin tidak tercapai secara optimal.

Sistem memiliki karakteristik sebagai satu kesatuan yang saling terkait, di mana setiap unsur memiliki fungsi spesifik namun tetap berinteraksi secara harmonis untuk menghasilkan output sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem dapat pula didefinisikan sebagai sekumpulan bagian (baik alat, fungsi, maupun entitas lainnya) yang bekerja secara terkoordinasi untuk mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir.

Menurut Kaelan (2013), sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga membentuk suatu struktur yang menyatu dan terintegrasi secara menyeluruh. Ketatanegaraan, pengertian sistem ini menjadi landasan penting dalam memahami mekanisme dan fungsi-fungsi lembaga negara yang harus berjalan selaras untuk menjamin kestabilan serta

efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, dapat mengerti bahwa bahwa karakteristik dari suatu sistem meliputi hal-hal berikut:

a. Merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur atau komponen,
b. Setiap komponen dalam sistem memiliki fungsi dan peran masing-masing,
c. Unsur-unsur tersebut saling terintegrasi dalam satu struktur yang utuh,
d. Setiap bagian berkontribusi secara spesifik untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan.

Unsur-unsur ketatanegaraan adalah elemen-elemen yang penting dalam membentuk suatu negara. Unsur-unsur ketatanegaraan dapat mencakup beberapa hal, seperti sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Secara tradisional, konstitusi negara-negara modern mengatur tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sementara itu, menurut Kaelan, sistem dipahami sebagai suatu integrasi dari berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja secara sinergis demi mencapai tujuan tertentu, di mana keseluruhan elemen tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah sistem adalah sebagai berikut:

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia meliputi:

a. Hukum adat ketatanegaraan,
b. Konvensi ketatanegaraan,
c. Yurisprudensi ketatanegaraan,
d. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan,
e. Doktrin ketatanegaraan,
f. Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945.

Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dapat mengalami beberapa jenis perubahan, antara lain:

a. Perubahan paradigma.
b. Menyempurnakan ketentuan yang sudah ada.
c. Meniadakan ketentuan yang tidak jelas.
d. Menambah ketentuan atau mengganti ketentuan lama.
e. Menegaskan hal-hal yang tidak dapat diubah.

Istilah trias politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya "politik tiga serangkai". Secara sederhana trias politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Trias Politica merupakan suatu gagasan tentang perlunya pemisahan kekuasaan dalam suatu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dua atau lebih lembaga yang independen dan saling mengimbangi. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang bersifat absolut dalam satu tangan pemerintahan.

Konsep trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sebagai tanah air tercinta kita merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut konsep ini.

Teori pembagian kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang yang independen. Konsep ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balances. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut juga model trias politica.

Gagasan pengungkapan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu. Mereka percaya bahwa dengan memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, negara akan menjadi lebih stabil dan pemerintahan akan lebih adil.

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan organ negara yang berfungsi menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang. Lembaga ini berada di bawah kepemimpinan seorang presiden atau raja, yang dibantu oleh kabinet atau jajaran menteri. Selain melaksanakan fungsi eksekutif atau pelaksanaan kebijakan, lembaga eksekutif juga memiliki sejumlah wewenang tambahan yang diberikan berdasarkan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga eksekutif memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, serta legislatif dan militer. Kewenangan diplomatik adalah kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sedangkan kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum.

Sementara itu, kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.

2. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki

oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah otoritas yang berwenang mengawasi dan mengoreksi tindakan lembaga-lembaga negara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga ini dibentuk sebagai institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi pengujian materiil, penyelesaian sengketa hukum, serta memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan atau membatalkannya apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi atau nilai-nilai dasar negara.

Berikut ini kami jelaskan satu per satu penerapan Trias Politica di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya:

1. Kekuasaan Eksekutif

   Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Kekuasaan ini di Indonesia dipegang oleh presiden. Namun, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, presiden mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantunya, yaitu para menteri (Mochamad Aris Yusuf, 2023). kekuasaan eksekutif di Indonesia meliputi: Presiden Republik Indonesia, Menteri Kabinet, Gubernur Provinsi, Bupati / Wali Kota, dan Aparat Birokrasi (Salsabila Syahira, 2023).
2. Kekuasaan Legislatif

   Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat tiga lembaga yang diberikan kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Kekuasaan Yudikatif

   Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan

peradilan kepada rakyatnya atau secara sederhana disebut dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan jika kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Sementara itu, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Mochamad Aris Yusuf, 2023).

Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup (*modus vivendi*) berbangsa dan bernegara yang secara yuridis-konstitusional sudah diterima dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai filsafat dan ideologi negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "...dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai-nilai pancasila tersebut harus sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis (Abdul Sakban, 2017).

Sebagai fondasi utama negara, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian yang dalam studi kenegaraan dikenal dengan istilah philosophische grondslag atau dasar filsafat negara. Dalam posisinya ini, Pancasila menjadi sumber esensial bagi seluruh nilai dan norma yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk sebagai pijakan mendasar dalam perumusan dan pelaksanaan sistem hukum nasional.

Konsekuensinya, setiap produk hukum — baik berupa peraturan perundang-undangan maupun regulasi turunannya —

wajib merujuk dan selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dalam kerangka ini, Pancasila bukan sekadar fondasi spiritual negara, tetapi juga sumber utama dari norma-norma moral dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan puncak dalam hirarki hukum nasional, yang keberadaannya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan tidak hanya bagi konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar, tetapi juga bagi hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam praktik kenegaraan Indonesia.

Kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan

1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Hukum

Pancasila adalah ideologi fundamental yang memiliki peran vital dalam membentuk jati diri dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara etimologis, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Lima asas tersebut disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai landasan pokok dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, seluruh peraturan dan produk hukum yang diberlakukan di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta tidak boleh bertentangan dengan esensi ideologisnya.

Pancasila tertuang secara resmi dalam dokumen tertinggi negara, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilainya kemudian dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran yang mencerminkan suasana kebatinan UUD 1945, dan selanjutnya dituangkan secara konkret dalam pasal-pasal UUD serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filsafat negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi resmi negara

Indonesia.bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. konsep negara yang digunakan di Indonesia popular dengan nama rechtsstaat, Sementara itu untuk memberikan ciri "ke Indonesianya", juga dikenal dengan istilah Negara hukum dengan menambah atribut "pancasila' sehingga menjadi "negara hukum Pancasila".

Pancasila, sebagai dasar negara, menegaskan kedudukannya sebagai sumber utama dari seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap bentuk regulasi dan perundang-undangan baik itu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, hingga berbagai aturan pelaksana lainnya harus disusun dan dijalankan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Setiap produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila secara otomatis kehilangan legitimasi dan dapat dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, apabila Pancasila sebagai fondasi hukum negara diubah atau dikesampingkan, maka keseluruhan sistem hukum yang telah dibangun sejak kemerdekaan Indonesia akan kehilangan dasar pijakannya, dan dengan sendirinya gugur atau batal demi hukum.

Sebagai ideologi sekaligus falsafah hidup bangsa, Pancasila mengakar kuat dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukanlah hasil adopsi dari luar, melainkan tumbuh dari pengalaman dan kearifan lokal bangsa yang telah melebur dalam kesadaran kolektif masyarakat. Nilai-nilai ini tampak nyata dalam perilaku, kebijakan, dan tata kelola berbagai institusi sosial serta lembaga negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi cita moral bersama, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu yang mengikat setiap warga negara, baik secara individu maupun dalam konteks kehidupan berbangsa.

Namun, agar perannya sebagai dasar negara tetap hidup dan relevan, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasinya perlu tercermin dalam perumusan hukum,

kebijakan publik, dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menjadi fondasi utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara substansial memuat kelima sila Pancasila. Rumusan ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dianggap sebagai perwujudan kehendak kolektif seluruh rakyat Indonesia yang telah merdeka.

Lebih lanjut, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ditegaskan melalui sejumlah ketetapan resmi, antara lain Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau pondasi dari sistem hukum nasional Indonesia.

Penegasan tersebut juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa proses pembentukan regulasi dimulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan, dan seluruhnya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pedoman ideologis dan moral, Pancasila juga memiliki kekuatan hukum yang diatur secara formal dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, Pasal 7 dalam undang-undang yang sama menguraikan hierarki peraturan perundang-undangan yang mencakup:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden; dan
e. Peraturan Daerah.

Keseluruhan sistem hukum ini wajib berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstitusional tertinggi.

Mengelaborasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu proses yang memiliki dimensi luas dan bersifat dinamis. Keluasan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan, sementara sifat dinamisnya memberi ruang adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan strategis. Dengan kata lain, proses pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah upaya berkelanjutan yang akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Dimensi keluasaan dan kedinamisan ini tercermin dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Realisasi dari nilai-nilai tersebut tampak dalam sikap, tindakan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi (Dani, Ram, 2013).

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh para pendiri bangsa merupakan esensi dan puncak dari warisan sosial budaya yang terus menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sistem nilai budaya yang telah tumbuh dan mengakar dalam masyarakat, serta dianggap baik dan diyakini kebenarannya, dijadikan sebagai pedoman hidup sekaligus sumber nilai utama bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah:

a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktikkan jauh

sebelum Indonesia merdeka. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ
إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*

Bisri Musthafa menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

> "*Hai poro menungso kabeh! temenan ingsun Allah nitahake siro kabeh sangking siji wong lanang (iyo iku Nabi Adam) lan siji wong wadon (iyo iku ibu Hawwa') lan ingsun endade'ake siro kabeh dadi pirang-pirang cabang. Lan dadi pirang-pirang pepantan supoyo siro kabeh podo kenal mengenal (ojo unggul-unggulan nasab). Sejatine kang luwih mulyo sangking siro kabeh mungguh Allah ta'ala iku wong kang luwih taqwa temenan Allah Ta'ala iku tansah mirsani lan tansah waspodo*".

Dalam tafsiran tersebut menunjukkan adanya sikap nasionalisme untuk menghargai sesama manusia, walaupun berbeda golongan, karena kita diciptakan Allah dalam keturunan yang sama yaitu dari Nabi Adam dan Hawwa. Hal ini demi terciptanya tujuan yang sama yaitu kedamaian.

Pandangan hidup suatu bangsa, seperti halnya Pancasila bagi Indonesia, memiliki peranan yang sangat vital karena menjadi pedoman yang kokoh dalam menghadapi berbagai dinamika, termasuk tantangan era globalisasi. Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia, dengan menyaring dan menyeleksi mana yang sesuai dengan jati diri bangsa serta

norma-norma yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila berperan sebagai benteng tangguh yang melindungi bangsa dari ancaman eksternal, sekaligus sebagai pilar utama yang menopang keberlangsungan negara. Ia menjadi arah bagi perjalanan kehidupan berbangsa serta fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan elemen fundamental bagi eksistensi suatu negara, karena berfungsi sebagai fondasi utama, landasan cita-cita, dan arah tujuan suatu bangsa. Setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda sesuai dengan identitas dan nilai-nilainya masing-masing. Di Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tercantum secara resmi dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai landasan yuridis-konstitusional sekaligus sebagai ideologi negara yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara mutlak, sehingga setiap bentuk peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk peraturan perundang-undangan memiliki sifat imperatif (memaksa) dan berlaku secara menyeluruh bagi:

a. Penyelenggara pemerintahan negara,
b. Seluruh lembaga kenegaraan,
c. Organisasi atau lembaga kemasyarakatan,
d. Setiap warga negara Indonesia di mana pun berada, serta
e. Penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila menempati kedudukan sebagai norma objektif sekaligus norma tertinggi dalam tatanan hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang kemudian dikuatkan melalui Tap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara juga dinyatakan secara eksplisit dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya, setiap aspek pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Konsekuensinya, seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan sejalan dengan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan merupakan hasil perenungan mendalam dan perjuangan panjang para pendiri bangsa. Beberapa pertimbangan utama yang melatarbelakangi dipilihnya Pancasila antara lain:

a. Aspek pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia
b. Aspek alamiah ketahanan nasional
c. Aspek budaya
d. Aspek agama
e. Aspek persamaan nasib

Oleh karena itu, Pancasila merupakan intelligent choice, yaitu pilihan yang cerdas dan strategis yang mampu menjembatani keragaman dalam masyarakat Indonesia tanpa meniadakan perbedaan. Penetapan Pancasila bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan perbedaan (indifferentism), melainkan untuk mempersatukannya dalam satu semangat kebangsaan yang khas, sebagaimana termaktub dalam semboyan luhur bangsa: Bhinneka Tunggal Ika (Dekker, dkk, 1997).

4. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) mengandung makna bahwa nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam setiap silanya menjadi landasan fundamental bagi seluruh sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Noor Bakry, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil refleksi mendalam dari para pendiri bangsa. Hasil pemikiran tersebut bukan hanya mencerminkan kebijaksanaan historis, tetapi juga membentuk suatu sistem nilai yang menyeluruh dan terstruktur, yang menjadi fondasi ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu:

a. Sistem filsafat harus bersifat koheren, setiap unsur saling terkait secara logis dan berurutan, tidak terdapat kontradiksi antar bagiannya. Meskipun memiliki perbedaan, masing-masing unsur saling melengkapi serta memiliki fungsi dan peran yang khas dalam keseluruhan sistem.
b. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, Pancasila mencakup seluruh aspek dan fenomena dalam kehidupan manusia. Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila menjadi kerangka pemikiran yang mampu mengakomodasi berbagai dinamika dan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
c. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, merupakan hasil perenungan yang mendalam hingga menyentuh inti paling mendasar dari suatu persoalan, sehingga mampu mengungkap aspek-aspek yang bersifat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat disusun berdasarkan hakikat terdalam dari kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan, dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara.
d. Sistem filsafat bersifat spekulatif, bahwa berangkat dari hasil perenungan mendalam yang bersifat apriori sebagai suatu praanggapan yang menjadi titik tolak dan kerangka dasar berpikir, disusun melalui proses penalaran logis. Spekulasi filosofis ini menjadi landasan awal dalam membangun pemahaman terhadap realitas tertentu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, pada mulanya merupakan hasil pemikiran reflektif dari para tokoh

pendiri bangsa yang merumuskan kerangka dasar ideologis negara. Gagasan tersebut kemudian mengalami proses validasi rasional melalui diskusi intensif dan dialog konstruktif dalam forum resmi seperti sidang BPUPKI, hingga akhirnya memperoleh legitimasi dalam pengesahan oleh PPKI (Riska Dwi Febriyanti, 2023).

Dinamika Pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Struktur UUD 1945 terdiri atas bagian Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat 37 Pasal, serta 4 ketentuan dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, disertai dengan penjelasan resmi yang disusun oleh Prof. Mr. Soepomo. Namun, pada masa awal kemerdekaan, pelaksanaan UUD 1945 belum berjalan secara optimal karena Indonesia masih berada dalam situasi darurat mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial. Adapun kondisi pemerintahan pada saat itu adalah sebagai berikut:

a. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
b. Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensil dimana para menteri bertanggung jawab pada presiden bukan pada DPR.
c. Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubah kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badan legislative (DPR).
d. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah kabinet presidensil menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dari UUD 1945. Sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi Liberal.

Akibat dari kondisi diatas menimbulkan, pemerintah tidak stabil seiring pergantian kabinet, Terjadinya pemberontakaan PKI Madiun, karena keadaan genting maka kabinet kembali ke presidensil lagi, diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) sehingga Indonesia harus menerima berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS).

2. Konstitusi RIS

Sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang disepakati pada 27 Desember 1949, Indonesia diwajibkan menerima pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Konsekuensinya, Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berubah, yakni menggunakan Konstitusi RIS. Dalam periode ini, seluruh wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan Konstitusi RIS, sementara UUD 1945 hanya berlaku secara terbatas di wilayah Negara Bagian Indonesia yang mencakup sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta.

Pemerintahan pada masa itu menerapkan sistem parlementer dengan dasar Demokrasi Liberal. Bentuk negara RIS adalah federasi (serikat) dan sistem pemerintahannya bersifat demokratis. Namun, bentuk federasi ini tidak bertahan lama. Berkat kesadaran nasional para pemimpin bangsa, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi yang baru.

3. Undang-Undang Dasar Sementara

Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950 serta dengan bentuk pemerintahannya ialah republik dengan sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa diganggu gugat dan menteri bertanggung jawab pada presiden. (Pada masa ini berlaku demokrasi liberal dan telah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante).

Undang-undang Dasar Sementara (UUD 1950), dimana dalam konstitusinya mengatur dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan keadaan darurat terdapat dalam Pasal 96 yaitu (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. (2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan derajat undang-undang ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut (Achmad Alif Nurbani, dkk, 2023).

Karena sistem pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer, maka peran presiden dan wakil presiden bersifat simbolis sebagai kepala negara konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat. Seluruh tanggung jawab pemerintahan berada di tangan para menteri yang langsung bertanggung jawab kepada parlemen. Konsekuensi dari sistem ini adalah ketidakstabilan politik, yang ditandai dengan seringnya pergantian kabinet, serta memburuknya kondisi ekonomi dan keamanan nasional. Selain itu, Konstituante mengalami jalan buntu dalam menjalankan tugasnya merumuskan Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Meskipun kondisi politik pada masa itu tidak stabil, semangat persatuan bangsa tetap terjaga, yang terlihat dari bergabungnya kembali berbagai negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fakta inilah yang mendorong Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kembali negara dalam bentuk kesatuan (Sri Hudiarini, 2000).

Relevansi Pancasila dengan Konsep Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yaitu berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam

pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence.* Jadi, ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni *the legal self sufficiency* (hukum yang mengatur kehidupan sendiri) dan *actual independence* (kemerdekaan yang nyata).

Dalam kaitannya dalam politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self goverment* atau *the condition of living under one's own laws* (kondisi kehidupan dibawah satu undang-undang). Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *the legal self sufficiency* yang bersifat *self goverment* yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*) (Rahmat Yuseib, 2003:9).

Tujuan Otonomi Daerah digariskan sebagai berikut:

a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peringkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Purnama, dkk, 2022:111-118).

Dalam membentuk, mengatur, dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan, diperlukan landasan hukum yang jelas, tegas, dan memiliki kekuatan mengikat. Tujuan dari dasar hukum ini adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bersatu, tertib, dan harmonis. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Tentu bukan perkara mudah untuk menata negara sebesar Indonesia, yang

terdiri atas ribuan pulau dengan populasi mencapai 237.641.326 jiwa pada tahun 2010, serta dihuni oleh beragam suku, bahasa, dan budaya yang tersebar luas di seluruh penjuru nusantara. Dengan kondisi geografis yang demikian kompleks, sistem pemerintahan yang hanya terpusat di tingkat nasional tidak akan efektif dalam mengelola seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sila keempat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", mengandung makna sebagai berikut:

a. Menempatkan kepentingan negara dan masyarakat sebagai prioritas utama,
b. Menghindari tindakan memaksakan pendapat atau kehendak kepada pihak lain,
c. Menjunjung tinggi budaya musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan bersama,
d. Melakukan diskusi hingga tercapai kesepakatan bersama (mufakat) dengan dilandasi semangat kekeluargaan.

Sejalan dengan kutipan di atas, makna pertama dari sila keempat adalah mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa, dan karakteristik di setiap daerah, maka sudah sewajarnya jika yang paling memahami kondisi suatu wilayah adalah masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan bangsa secara merata, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah, yang secara prinsip berarti kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan lokal.

Pemerintahan daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat wilayah. Struktur kepemimpinannya dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Gubernur memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan dan membina Bupati serta Wali Kota. Selanjutnya, Bupati dan Wali Kota memiliki otoritas atas Camat, yang dalam

pelaksanaannya juga bertanggung jawab terhadap pembinaan Kepala Desa. Kepala Desa sendiri memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan perangkat di tingkat dusun, RW, dan RT.

Pemerintahan daerah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Adapun tujuan utamanya meliputi:

a. Pertimbangan politk,
b. Pertimbangan sosial dan budaya,
c. Pertimbangan ekonomi.

Berdasarkan tujuan tersebut, setiap daerah diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran politik serta berpartisipasi aktif dalam membangun wilayahnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang demokratis dan harmonis. Selain itu, otonomi daerah memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk membentuk sistem sosial yang selaras dengan adat istiadat serta keragaman budaya lokal yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Otonomi ini juga membuka peluang bagi daerah untuk menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi lokal yang belum banyak dikenal secara luas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", mengandung makna cinta tanah air yang dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan pemerintahan otonom. Salah satu bentuk nyatanya adalah pengelolaan usaha-usaha mandiri yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari munculnya wirausaha desa yang mandiri dan berhasil mengangkat perekonomian lokal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk memperluas jangkauan pasar, pemerintah turut mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memanfaatkan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam menjalankan usahanya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena lebih memahami kondisi, potensi, serta arah pengembangan wilayahnya secara menyeluruh (Wendi, 2011).

Pancasila dalam Ketatanegaraan pada Kehidupan

Kontekstualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan keseluruhan dalam menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi dan praktik hidup bagi masyarakat, berbangsa, dan benegara Indonesia.

Tujuan dari kontekstualisasi Pancasila adalah untuk menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya, serta menghidupkan pemahaman dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa aspek penting dalam kontekstualisasi Pancasila meliputi:

a. Keharusan moral: Pancasila harus menjadi landasan dalam kehidupan individu dan masyarakat, yang melibatkan keinginan dan kesadaran moral. Contohnya, dengan menghargai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
b. Subyektif: Pancasila harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Contohnya, dengan menghargai perbedaan pendapat dan menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda.
c. Ketaatan moral: Pancasila harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan moral dan etis, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Contohnya, dengan menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan beragama.
d. Kesadaran moral: Pancasila harus menjadi pengaruh dalam pemikiran dan perilaku individu dan masyarakat, yang mencakup aspek keadilan sosial, ekonomi, budaya, dan perlindungan keamanan. Contohnya, dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga kebersihan lingkungan (I Wayan Tagel Eddy, 2018).

Dalam proses kontekstualisasi Pancasila, penting untuk memperhatikan perubahan dan pembaharuan dalam

mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup, serta menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya.

Penutup

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala hukum, yang berarti seluruh peraturan dan norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam peranannya tersebut, Pancasila bertindak sebagai filter yang menyaring setiap kebijakan atau rencana strategis agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Pancasila juga berfungsi sebagai fondasi utama yang menopang struktur kebangsaan dan menjamin keberlanjutan kehidupan nasional.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan tidak dapat hanya dipahami secara dangkal atau simbolis, melainkan harus dijabarkan ke dalam bentuk regulasi yang konkret dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang hanya dimiliki Indonesia. Karena hanya cocok dengan budaya Indonesia, seperti pemerintahan otonom yang cocok dengan keadaan geogerafis Indonesia. Indonesia memiliki daerah otonomi yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Dan daerah otonom memudahkan mengontrol ekonomi, sosial dan politik di negara yang memiliki banyak pulau yang dihuni lebih dari 300 juta jiwa dengan budaya yang beragam serta pemerintahan daerah sangat efisien dalam pengembangan usaha mikro.

Penyelenggaraan otonomi daerah seharusnya dijalankan oleh individu-individu yang kompeten dan berintegritas, agar mampu mengembangkan berbagai aspek yang membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Otonomi daerah tidak boleh disalahgunakan oleh wakil rakyat yang justru terlibat dalam praktik korupsi.

BAB V

PANCASILA DI ERA GLOBALISASI

Pancasila dan globalisasi merupakan dua entitas yang memiliki keterkaitan dinamis dan saling memengaruhi. Seiring dengan lajunya perkembangan zaman, struktur kehidupan global mengalami transformasi yang berdampak langsung pada tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia, di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu dampak nyata dari proses globalisasi adalah munculnya gejala penurunan kualitas moral, atau yang sering disebut dengan degradasi moral.

Globalisasi sendiri dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi kebudayaan yang ditandai oleh kecenderungan unifikasi wilayah-wilayah di dunia—baik secara geografis maupun struktural—ke dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang seragam. Meskipun membawa sejumlah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, globalisasi juga menghasilkan efek samping yang signifikan, baik positif maupun negatif. Salah satu implikasi yang paling mengkhawatirkan adalah berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang menyimpang dari nilai-nilai luhur, termasuk meningkatnya perilaku destruktif terhadap lingkungan alam dan sosial.

Alih-alih berperan sebagai penjaga dan pengelola bumi sebagaimana mestinya, manusia justru sering kali menjadi aktor utama dalam kerusakan lingkungan dan punahnya berbagai bentuk kehidupan yang bernilai tinggi. Selain itu, di tengah arus deras globalisasi dan revolusi digital, degradasi moral di kalangan

masyarakat—khususnya generasi muda—semakin mencemaskan. Fenomena seperti penyalahgunaan narkoba kian merebak dan sulit dikendalikan oleh aparat, terutama karena kemajuan teknologi telah mempermudah akses distribusi dan promosi zat terlarang tersebut, yang secara agresif menyasar kalangan remaja.

Gejala sosial lain yang mencuat adalah meningkatnya perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan seks di luar pernikahan. Ironisnya, sebagian remaja perempuan lebih takut terhadap kehamilan dibandingkan dengan risiko penyakit menular seksual, menunjukkan pergeseran nilai yang cukup ekstrem. Hal ini menjadi sinyal bahwa kontrol sosial dari orang tua terhadap anak-anak mereka semakin melemah. Selain itu, marak pula perilaku generasi muda yang dengan mudah melanggar norma hukum dan sosial tanpa menunjukkan rasa bersalah, yang diperparah oleh konsumsi media digital yang bersifat pasif dan hedonistik.

Fenomena seperti meningkatnya kekerasan, sikap egois, pemikiran instan, dan lemahnya kemampuan berpikir kritis, merupakan sebagian dampak dari globalisasi yang tidak disaring oleh nilai-nilai moral bangsa. Akibatnya, generasi muda rentan menjadi bagian dari sistem industri digital global yang memanfaatkan ketidaksiapan mental dan etis mereka. Mereka kehilangan daya kreasi, bersikap reaktif negatif, serta minim refleksi dan solusi positif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Pancasila sebagai sistem nilai dan moralitas bangsa memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk diinternalisasikan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya menjadi identitas ideologis, tetapi juga sebagai benteng kultural dan spiritual untuk menjaga bangsa dari erosi nilai akibat pengaruh globalisasi yang tidak terkendali.

Fenomena yang terjadi di berbagai sektor kehidupan bangsa menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin, politisi, dan pelaku usaha di negeri ini mulai menjauh dari norma sosial, etika, serta nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi moral dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Di ranah politik, etika kepemimpinan dan integritas politik kian terdegradasi, tergantikan oleh praktik-praktik

kekuasaan yang oportunistik. Sementara dalam dunia ekonomi, tidak sedikit pelaku bisnis yang mengesampingkan prinsip-prinsip etika bisnis dan cenderung menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan semata. Kondisi serupa juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana nilai-nilai kesopanan, tata krama, dan etika pergaulan mulai terkikis. Gejala ini menunjukkan kemunduran moral yang mengkhawatirkan serta menandakan tergerusnya nilai-nilai kehidupan yang selama ini menjadi dasar etis dalam masyarakat Indonesia. Keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut komitmen kolektif untuk kembali menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai sistem etika dan filosofi kehidupan bangsa, Pancasila merupakan pilar utama yang mampu membentengi masyarakat dari arus destruktif global, serta menjadi pedoman dalam membangun tatanan sosial yang berkeadaban, adil, dan berintegritas. Sehingga mengharuskan kita untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan kehidupan masyarakat seperti yang terdapat dalam QS. Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Artinya: *Dia berkata, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah suatu kebaikan (darimu). Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang – orang yang baik.*

Pengamalan Pancasila secara baik dan benar sesungguhnya merupakan bagian dari paradigma ini, sebab jika seluruh sila dari Pancasila itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka di sana

banyak norma agama yang membimbing manusia ke jalan yang benar, manusia harus berbuat baik terhadap sesama

Pancasila adalah ideologi fundamental yang menjadi landasan utama bagi bangsa dan negara Indonesia. Secara etimologis, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri atas dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila dapat dimaknai sebagai lima prinsip dasar yang menjadi fondasi ideologis dan filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wibiowo, dkk, 2022: 22-31) Pancasila memuat seperangkat nilai fundamental yang meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pancasila bukanlah hasil formulasi yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa landasan yang kuat, melainkan merupakan hasil perumusan yang bersumber dari nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup dimensi religius, sosial, dan kultural yang telah hidup dan berkembang seiring dengan sejarah panjang keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu entitas yang berdaulat dan berbudaya. (Aulia dalam seminar nasional: aktualisasi nilai–nilai Pancasila di era reformasi). (Savitri, dkk, 2021: 165-176)

Dari pembahasan di atas, ruang lingkup pembahasan mengenai pancasila sebagai aktualisasi dan implementasi nilai dalam masyarakat di era globalisasi, Pancasila sangat diperlukan karena menjadi pembatas bagi untuk memilih kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menyikapi era globalisasi ini agar pengaruh-pengaruh yang datang dapat memberikan manfaat dan menjadikan bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang.

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan dalam melakukan realisasi antara pemahaman nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila menjabarkan tentang nilai-nilai

Pancasila dalam bentuk norma kemudian merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengaktualisasian Pancasila, nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma dan dapat dijumpai dalam bentuk norma hukum kenegaraan dan norma moral. Kemudian pengaktualisasianya dikaitkan dengan tingkah laku atau perilaku semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta seluruh aspek penyelenggaraan negara (Dinie Anggraeni Dwi, dkk, 2022:79-87).

Nilai dalam bahasa Latin berasal dari kata Valere yang berarti kuat, baik dan berharga. Nilai adalah sesuatu yang berguna, berharga, dan baik bagi kehidupan manusia. Terdapat tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sampai kapanpun. Dimana baik nilai dasar ataupun nilai instrumen semuanya bersifat abstrak maka perlu dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tarwan, dkk (2022:84), Pancasila merupakan pedoman fundamental bagi Negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai esensial yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
c. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

d. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah (Herwan Parwiyanto, 2022).

Pengertian Globalisasi dan Dampak Globalisasi

Pengertian Globalisasi

Kata globalisasi diambil dari global yang artinya atau maknanya universal. Globalisasi adalah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran seseorang. Sedangkan menurut Lyman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat yang saling ketergantungan dan hubungan antar negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Globalisasi adalah fenomena dalam kehidupan manusia yang bergerak dan berkembang secara terus menerus.

Globalisasi merupakan gejala meleburnya budaya-budaya dunia akibat dari sosio-cultural antar bangsa yang mendunia. Oleh karena itu, hubungan antar negara menjadi erat. Globalisasi sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, perkembangan ekonomi, pemanasan global, dan lain-lain. Sebagai masyarakat, kita tidak bisa menghentikan arus globalisasi karena bersifat progresif dan erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang ditimbulkan tidak bisa dihindari bagi masyarakat, globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun masyarakat juga merasakan dampak negatifnya (Savitri, dkk, 2021:171-172).

Dampak Pasitif dan Negatif Globalisasi

Dampak positif globalisasi yaitu sebagai berikut.

a. Semangat berkompetisi, Karena melihat arus globalisasi yang terus berkembang, masyarakat dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya di dalam Negara, namun di dunia internasional. Sehingga timbul kemandirian serta kemajuan pribadi yang ikut membantu memajukan negara juga.
b. Kemudahan dan Kenyamanan hidup, dengan kemajuannya di bidang teknologi komunikasi, informasi dan transportasi telah memberti kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan masyarakat.
c. Tumbuhnya sikap toleransi dan solidaritas antar manusia, seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat lebih mudah mengakses segala informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Informasi kemanusiaan mengenai keprihatinan dan penderitaan sekelompok manusia di suatu negara, memotivasi pemerintah negara lain untuk membantu meringankan penderitaan sesamanya. Akhirnya, timbul sikap toleransi dan solidaritas antar manusia karena bantuan dari teknologi yang mempersatukan manusia antar negara.
d. Kesadaran dalam kebersamaan, Toleransi dan solidaritas antar bangsa berkembang menjadi kesadaran dalam kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah, dimana ancaman dan bencana bagi keselamatan dunia sebagai satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia.
e. Menumbuhkan sikap terbuka, Sikap terbuka ini untuk mengenal dan merhormati perbedaan, kelebiham, dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di wilayah Negara lain.
f. Globalisasi memberi tawaran baru, Globalisasi memberikan tawaran baru berupa akses ilmu pengetahuan seluas – luasnya melalui jaringan internet. Hal ini bermanfaat bagi generasi yang akan datang untuk lebih mudah dalam mencari ilmu yang berdampak pada kemajuan Negara.

g. Terbukanya mobilitas social, Kemajuan transportasi mendorong mobilitas social yang semakin terbuka dimana jarak tidak lagi menjadi permasalahan.

Dampak negatif globalisasi yaitu sebagai berikut

a. Pergeseran nilai, karena sesuatu yang baru (nilai, teknologi, budaya, dan lainnya) dari luar secara tidak otomatis diintergrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya.
b. Pertentangan nilai, dengan masuknya nilai – nilai baru yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan nilai luhur dari pandangan hidup masyarakat Indonesia menyebabkan lunturnya nilai luhur bangsa.
c. Perubahan gaya hidup (life style), perubahan gaya hidup ke arah negatif sangat merugikan negara seperti hedonis, yang selalu menghambur – hamburkan kekayaan dan konsumtif yakni membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhannya serta individualis.
d. Menurunnya tingkat kedaulatan negara menuntut pemerintah untuk mengakui realitas bahwa kebijakan dan penyelesaian berbagai persoalan tidak lagi dapat sepenuhnya dirumuskan secara mandiri. Sehingga pemerintah dituntut untuk beroperasi dalam konteks yang saling terhubung secara internasional, di mana sebagian besar solusi atas permasalahan nasional harus mempertimbangkan dinamika dan tuntutan global (Asmaroini, dkk, 2017:56–58).
e. Sikap Individualistik Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.
f. Kesenjangan Sosial Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga Indonesia. Berbicara mengenai sikap moral Lickona membaginya kedalam tiga komponen (*component of good character*) yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral (Lickona, 2012). Sikap moral tersebut mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebaikan. Ketiga unsur moral tersebut bertujuan pada terbentuknya individu-individu yang memiliki kematangan terhadap moral dalam kehidupannya. Moralitas berujung pada tingkah laku yang ditampilkan oleh individu dalam kehidupan kesehariannya yang mana seseorang dapat dikatakan memiliki karakter apabila perilakunya sesuai dengan kaidah-kaidah moral.

Perwujudan aktualisasi nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma-norma dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara serta saling keterikatannya satu dengan yang lain. Selain itu, dalam mengaktualisasikan Pancasila juga diperlukan suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya proses aktualisasi Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Lickona (2013:16) menjelaskan setidaknya terdapat 10 (sepuluh) nilai-nilai harus ditanamkan kepada anak-anak dan generasi muda bangsa dalam bermasyarakat dan berbangsa, yaitu:

Kebijaksanaan (*wisdom*), keadilan (*justice*), keteguhan (*fortitude*), kontrol diri (*selfcontrol*), cinta dan kasih sayang (*love*), perilaku positif (*positive attitude*), kerja keras (*hard work*) dan kemampuan mengembangkan potensi (*resourcefulness*), integritas (*integrity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan kerendahan hati (*humility*).

Sepuluh nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan substansi dan arah pendidikan karakter yang mampu mengembangkan kepribadian personal warga negara. Maka perlu disadari oleh setiap warga Negara

Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga Negara memiliki sifat dan kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat. berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan, bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat mengalami sejumlah hambatan, terutama dalam konteks era globalisasi yang tengah berlangsung. Globalisasi, di satu sisi, menghadirkan peluang besar, namun di sisi lain juga membawa tantangan yang kompleks bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memicu berbagai dampak globalisasi -baik yang bersifat positif maupun negatif- yang turut memengaruhi dinamika kehidupan manusia secara menyeluruh.

Sebagai kausa materialis, Pancasila merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, yang digali dari akar tradisi, kearifan lokal, serta sistem nilai masyarakat nusantara. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari komunitas sosial. Namun demikian, dalam era globalisasi yang ditandai dengan arus nilai-nilai global yang cepat dan masif, standar nilai sosial dan budaya internasional kerap kali memengaruhi bahkan menggeser eksistensi kepribadian bangsa. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menjaga identitas nasional dan mengaktualisasikan Pancasila secara konsisten di tengah derasnya penetrasi budaya luar.

Kesadaran subjektif merujuk pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap individu baik warga negara, penduduk, aparatur negara, maupun seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam ranah subjektif ini memiliki peran yang sangat

penting, karena menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan aktualisasi Pancasila secara objektif dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Realisasi subjektif ini berkaitan erat dengan tingkat kesadaran, ketaatan, dan kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila secara konsisten. Dalam kerangka ini, pelaksanaan Pancasila secara subjektif membentuk suatu tatanan hidup di mana kewajiban hukum tidak hanya dijalankan sebagai tuntutan yuridis, melainkan telah menyatu dengan kesadaran moral. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengabaikan pelaksanaan Pancasila tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berimplikasi pada aspek moralitas yang lebih dalam.

Kesadaran secara objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2008) bahwa "Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara (state policies) dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat umum dan belum operasional". Artinya terbentuknya nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam haluan negara dalam rumusan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dilakukan oleh dan melalui lembaga permusyawaratan rakyat, sedangkan upaya untuk mengawal dalam praktik, agar nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara dilakukan oleh lembaga peradilan konstitusi. Dengan kata lain, fungsi "*state policy making*" berupa Pancasila dan UUD Tahun 1945 itu dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan fungsi pengawalan atas pelaksanaannya dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan (*state policy adjudication*) dalam rangka pengawasan melalui penegakan hukum (*enforcement*). Di antara kedua kutub fungsi *policy making* dan *policy enforcing/controlling* terdapat wilayah *policy executing* yang merupakan wilayah tanggungjawab eksekutif kekuasaan pemerintahan negara.

Bagaiamana cara kita untuk menyikapi tantangan aktualisasi yang dapat membahayakan ideologi Pancasila? Yaitu dengan cara pendidikan dan pemahaman ideologi Pancasila, Promosi nilai-nilai Pancasila, partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, menjaga kesatuan dan persatuan, pengawasan terhadap penyebaran konten negatif, kolaborasi dan kemitraan.

Aktualisasi Pancasila di Era Globalisasi

Saat ini globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi oleh seluruh masyarakat dunia. Dewasa ini, teknologi semakin berkembang pesat disertai nilai interistik yang ada didalamnya, membuat munculnya isu mengenai globalisasi dan menimbulkan nilai baru tentang tatanan dunia. Untuk itu diperlukannya aktualisasi Pancasila untuk menghindarkan masyarakat dari degradasi moral dan untuk menjaga nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri.

1. Menurut Damanhuri (2016), Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental sebagai landasan dan panduan bagi warga negara dalam membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan sosial, yang dalam konteks modern sering dikaitkan dengan konsep *good citizenship*. Melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diharapkan masyarakat mampu mengembangkan pola pikir dan sikap yang selaras dengan ideologi nasional. Dengan demikian, kehidupan sosial dapat berlangsung secara konstruktif, harmonis, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
2. Menurut Alim (2011), aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai upaya konkret, antara lain dengan membangun semangat nasionalisme yang kuat—misalnya melalui kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Selain itu, penguatan internalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi aspek penting dalam membentuk karakter kebangsaan. Hal ini perlu disertai dengan penerapan nilai-nilai keagamaan secara utuh, serta komitmen terhadap

supremasi hukum dengan menegakkan aturan secara adil dan konsekuen. Masyarakat juga dituntut untuk bersikap selektif terhadap pengaruh dari luar, baik dalam aspek politik, ideologi, ekonomi, maupun sosial budaya, agar tetap sejalan dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Standar nilai sosial dan budaya masyarakat global turut memberikan pengaruh signifikan terhadap karakter dan identitas bangsa lain, termasuk Indonesia. Sebagai sumber nilai fundamental, Pancasila telah mengadopsi warisan nilai-nilai luhur bangsa yang dipilih melalui pertimbangan rasional dan relevansi kontekstual. Penggunaan nilai-nilai tersebut dalam merespons berbagai tantangan modern menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya aktualisasi Pancasila di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.

Beberapa peran individu yang sanagat penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dalam era globalisasi yaitu sebagai berikut.

1. Memahami Nilai-Nilai Pancasila. Contohnya gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesatuan.
2. Menjadi Teladan: Individu dapat menjadi teladan bagi orang lain dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan berperilaku jujur, adil, menghormati keberagaman, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang menguatkan persatuan dan kesatuan.
3. Menggunakan Teknologi dengan Bijak: Di era globalisasi yang didorong oleh teknologi, individu perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Contohnya, dengan mempromosikan penggunaan media sosial yang positif, menyebarkan informasi yang akurat dan berguna, serta berpartisipasi dalam diskusi online yang memperkuat nilai-nilai Pancasila.

Tantangan Globalisasi terhadap Nilai Pancasila

Tantangan yang harus dihadapi masyarakat di era globalisasi adalah munculnya paham-paham yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Dalam memfilter hal tersebut, dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai pancasila yang ada di dalam diri masyarakat. Berikut tantangan globalisasi berdasarkan nilai pancasila:

a. Nilai kesatu. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan beragama di. Tantangan globalisasi terhadap nilai kesatu pancasila dapat dilihat dan dicermati melalui fenomena agama KTP yang diperlihatkan oleh sebagian masyarakat. Tantangan aktualisasi nilai spiritualitas tersebut terkait adanya perspektif sebagian anak bangsa yang melihat alternatif ideologi agama bagi negara. Tantangan lain yakni munculnya nilai komunisme/sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kesatu.
b. Nilai kedua. Tantangan nilai kedua dapat dicermati dari perilaku anak bangsa. Di era globalisasi ini yang sangat terbuka dalam informasi diartikan dengan kebebasan tanpa batas, sehingga terjadi perilaku perundungan, persekusi, dan menghujat orang. Tantangan yang perlu diperhatikan juga terkait sila kedua ini yaitu, pada dinamika terorisme yaitu adanya sebagian anggota masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme. Peledakan bom dan bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia menjadi bukti dari pengabaian nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua pancasila ini. Pelaku teror yang terlibat telah menagabaikan nilai-nilai kemanusiaan karena operasinya merugikan hak kemanusiaan dan membuat rasa takut.
c. Nilai ketiga. Tantangan dalam mengaktualisasikan nilai sila ketiga Pancasila pada masyarakat, dapat dicermati dari munculnya hegemoni komunitas, dan pesimisme. Sementara itu hegemoni sektarian/ komunitas adalah paham yang didasarkan pada

pemikiran kelompok tertentu dengan label sebagai komunitas mayoritas memiliki Keeksklusifan.

d. Nilai keempat. Dalam sila keempat ini terkandung nilai penghormatan terhadap demokrasi dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh persatuan dan kesatuan negara, serta mewujudkan kesejahteraan bersama praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia.
e. Nilai kelima. Tantangan masyarakat yang berkaitan dengan nilai dalam sila kelima ini adalah muncul paham kapitalisme, kapitalisme, hedonisme, dan individualism. Padahal sila kelima ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sebagian masyarakat terkesan memaksakan diri untuk ikut dalam hidup yang serba mewah tersebut sehingga menimbulkan masalah baru yakni korupsi. Dengan demikian, kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran perekonomian bangsa. Selain itu, masyarakat banyak menderita karena perilaku korupsi antara lain kehilangan lahan, pekerjaan, dan tanah kelahiran Faktor materialism berpengaruh dan dapat terus-menerus mengikis nilai-nilai luhur (Savitri, dkk, 2021:173-174).

Tantangan Aktualisasi Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi pada masa kini telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, menciptakan tantangan-tantangan baru sekaligus menghadirkan permasalahan yang perlu dihadapi dengan bijak demi memperoleh manfaat optimal bagi kesejahteraan umat manusia. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat turut mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam tatanan kehidupan global, yang pada gilirannya membawa dampak langsung terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di berbagai negara. Pancasila sebagai ideologi nasional tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh rakyat Indonesia, baik

dalam perannya sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas sosial

Bangsa Indonesia memikul tanggung jawab strategis untuk terus membangun kesadaran nasional serta memperkuat ketahanan spiritual dan ideologis demi menjaga stabilitas jangka panjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lanskap global yang kian kompleks dan tak menentu, peningkatan kapasitas kolektif dalam merespons tantangan mendasar menjadi prasyarat mutlak—terutama dalam menghadapi gelombang perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus bergulir. Sehingga, Pancasila harus menjadi *kompas moral* sekaligus *filter ideologis* dalam menyikapi ragam fenomena transnasional. Sebab, ancaman terhadap keutuhan bangsa tak lagi bersifat konvensional, melainkan kerap kali hadir dalam bentuk gerakan-gerakan militan, propaganda berbasis isu SARA, penyebaran hoaks secara masif di ruang digital, hingga provokasi publik yang menggerus solidaritas sosial. Tantangan semacam ini tidak hanya mengganggu harmoni masyarakat, tetapi juga berpotensi merongrong eksistensi ideologi negara.

Posisi Indonesia yang saat ini berada di episentrum globalisasi menuntut kewaspadaan ekstra agar jati diri bangsa tidak tergerus oleh dominasi nilai-nilai eksternal yang tidak selaras dengan kepribadian nasional. Dalam konteks inilah, Pancasila harus dipahami bukan sekadar sebagai simbol ideologis, tetapi sebagai *defensive wall* atau benteng kokoh yang mampu menangkal berbagai infiltrasi nilai asing yang berpotensi mendistorsi fondasi kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila, yang tersusun secara hierarkis dan saling terintegrasi, menawarkan landasan etis dan politis yang sangat relevan untuk menghadapi ancaman era kontemporer. Dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam bertindak, berpikir, dan merumuskan kebijakan, bangsa ini tidak hanya akan bertahan, tetapi juga mampu tumbuh menjadi negara berdaulat secara nilai di tengah kompetisi global yang semakin ketat dan ideologis.

Mengatasi Dampak Globalisasi

Cara mengatasi dampak globalisasi dalam Pancasila, yaitu:

1. Penguatan identitas Nasionalisme, karena sangat penting untuk memperkuat dan mempertahankan identitas nasional dalam menghadapi globalisasi, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang diberikan pemahaman kuat tentang nilai-nilai pancasila, sejarah, budaya, dan bahasa Indonesia.
2. Perlindungan ekomoni, dengan cara mengembangkan potensi Indonesia untuk bersaing di pasar global dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, serta mendorong masyarakat untuk mendukung produk local untuk menjaga perekonomian Indonesia.
3. Penguatan kemandirian yang memperkuat kemandirian sebagai sektor dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, peningkatan inovasi dan teknologi serta membangun infastruktur yang memadai.
4. Pengembangan industri kreatif, karena dibutuhkan inovasi, kreatifitas, kolaborasi, kreatifitas, dan dukungan pemerintah untuk menagkap peluang dan mengatasi tantangan. Industri ini meliputi seni, musik, film, fesyen, kerajinan dan sektor kreatif lainnya yang dapat menambahkan nilai ekonomi, mempromosikan keunikan budaya Indonesia ditingkat global dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
5. Kolaborasi dan diplomasi antar negara, hal ini sangat penting agar Indonesia terjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan budaya.
6. Pengaturan regulasi, kebijakan regulasi yang tepat dapat melindungi hak asasi manusia, lingkungan, memastikan bahwa globalisasi berjalan sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan kepentingan nasional. Contoh dari aktualisasi ini ialah pada YouTuber yang menjatuhkan pesawat demi konten yang berujung terancam penjara selama 20 tahun yang mengakibatkan rusaknya pesawat ringan bermesin tunggal hingga hancur berkeping-keping di area hutan Los Padres, California, tahun 2021 lalu.

Merubah Tatanan Hidup di Era Globalisasi

Cara merubah tatanan hidup manusia di era globalisasi adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi, pendidikan dan kesadaran yang baik dapat membantu individu dan masyarakat beradaptasi, memahami, dan mengambil manfaat dari proses globalisasi. Pendidikan yang berkualitas dan kesadaran akan dampak globalisasi penting untuk mengubah tatanan hidup manusia.
2. Peningkatan Keterampilan: Di era globalisasi, keterampilan menjadi sangat penting karena dapat membantu manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan mempertahankan identitas diri atau bangsanya. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk meningkatkan keterampilan seperti keterampilan dalam berinovasi dan berkreativitas, serta pengetahuan manusia agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi.
3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi: Perubahan tatanan hidup manusia di era globalisasi juga melibatkan pengembangan teknologi dan inovasi. Melalui penelitian dan pengembangan, serta promosi kewirausahaan dan inovasi teknologi, kita dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk tantangan global, contohnya perubahan iklim, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Dalam era globalisasi, penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah, memberikan akses ke modal dan pasar, serta mengurangi hambatan birokrasi untuk mengembangkan usaha.
5. Perlindungan Lingkungan: Dalam mengubah tatanan hidup manusia di era globalisasi, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas. Melalui kebijakan yang berkelanjutan, contohnya penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah,

dan konservasi sumber daya alam, kita dapat meminimalkan dampak negatif globalisasi terhadap lingkungan.

6. Kolaborasi dan Diplomasi Global: Mengubah tatanan hidup manusia di era globalisasi memerlukan kolaborasi dan diplomasi global yang erat. Negara-negara dan aktor-aktor global perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, contohnya perubahan iklim, kemiskinan dan konflik.

Implementasi Pancasila dalam Era Globalisasi pada Kehidupan

Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa pancasila belum mendapatkan kedudukan yang tepat di hati bangsa Indonesia. pemahaman nilai-nilai pancasila belum benar-benar dipahami atau dihayati, terbukti dari banyaknya implementasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu, pancasila perlu ditanamkan kembali khususnya bagi generasi muda dalam proses mengembangkan dirinya yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

1. Sebagai pribadi, seseorang dapat bersikap sebagai hamba tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang mampu bersyukur dan menghargai ciptaan tuhan yang lainnya, sehingga tercipta keadilan di dalam kehidupannya.
2. Sebagai anggota keluarga dan masyarakat, seseorang dapat menempatkan dirinya dengan benar sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ia harus paham dan mampu menempatkan hak dan kewajiban dalam kebersamaan hidup.
3. Sebagai warga negara, seseorang harus mampu memahami hak dan kewajiban sesuai dengaan peraturan yang berlaku, mampu membawa dirinya secara tepat dalam hubungan dengan warga lain (Savitri, dkk, 2021:175).

Kontekstualisasi Pancasila di Era Globalisasi dalam Kehidupan

Kontekstualisasi dan Pancasila menjadi kebutuhan bagi bangsa ini karena setiap zaman selalu menghadirkan nuansa dan tantangan yang berbeda-beda. Konteksualisasi Pancasila menjadi sangat penting agar relevansi Pancasila tidak sekadar pada tataran konsep, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana Pancasila itu diamalkan, diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adapun kontekstualisasi Pancasila di era globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan rasa toleransi dan tolong- menolong.
3. Mencintai dan bangga akan kearifan lokal negeri sendiri.
4. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat.
5. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal.
6. Mendahulukan kepentingan, persatuan, keamanan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individua atau kelompok.

Penutup

Pancasila adalah dasar filosofis Negara memiliki akar keberadaan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sejak bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila penuh arti dan maknanya sendiri. Nilai Pancasila sangat penting Oleh karena itu, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat bisa lebih memahami serta mampu menerapkannya. Apalagi sekarang Arus globalisasi tidak dapat dihentikan, dengan segala dampak yang ditimbulkan seharusnya memberikan pengaruh positif. Namun, pengaruh globalisasi ternyata banyak menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia.

Globalisasi telah membawa gelombang perubahan signifikan dalam tatanan kehidupan internasional, yang secara langsung berdampak pada dinamika sosial, politik, dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menghadirkan tantangan dan ancaman nyata terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan strategi adaptif dan bijak dalam meresponsnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai luhur Pancasila harus tetap dijadikan pegangan utama agar arus globalisasi tidak mereduksi jati diri bangsa. Sikap selektif terhadap perkembangan global menjadi penting agar identitas dan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak terkontaminasi oleh ideologi asing yang tidak sejalan dengan karakter kebangsaan. Sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki peran sentral sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang bersifat normatif sekaligus kontekstual. Oleh karena itu, mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi tidak hanya cukup dengan penghafalan lima sila secara tekstual, melainkan harus disertai dengan upaya kritis dan rasional dalam menelaah esensi nilai-nilainya. Proses aktualisasi ini perlu diarahkan pada solusi konkret terhadap berbagai tantangan kontemporer agar Pancasila tetap hidup, relevan, dan operasional dalam menjawab problematika zaman modern tanpa kehilangan akar historis dan filosofisnya.

Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh

Nahdlatul Ulama

BAB VI

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA

Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir dari ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Seiring berkembangnya zaman Pancasila mendapati tantangan seperti mulai melemahnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, bukan hal penting untuk memperingati hari lahirnya Pancasila tetapi mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya untuk rakyat tapi seluruh bangsa Indonesia, Pancasila itu sebenarnya adalah kita. Pancasila sebagai alas pijakan atau landasan dari berbagai perbedaan, kemudian atas nama Pancasila orang-orang dilarang bicara tentang suku bangsanya karena ada dalam konstitusi. Pancasila hadir sebagai fasilitator tumbuh kembangnya agama dan kepercayaan.

Generasi masa kini menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang secara tidak langsung menjauhkan mereka dari pengalaman hidup bernegara secara nyata. Setiap bangsa di dunia pasti memiliki cita-cita dan pandangan hidup yang berfungsi sebagai landasan nilai dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Keberadaan suatu bangsa dalam wilayah negara tidaklah terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang—sebagaimana dijelaskan oleh Ernest Renan dan Hans Kohn—yang menegaskan bahwa bangsa terbentuk melalui dinamika sejarah.

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan reformasi, bangsa Indonesia perlu bertumpu pada kerangka pemikiran yang kokoh, sistem nilai yang kuat, serta arah yang jelas dalam implementasi kebijakan. Semua itu harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis yang mengarahkan proses aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Nur Syamsa Mutiara Tarwan, 2023)

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan merupakan suatu keharusan, agar eksistensi Pancasila tetap kontekstual dan bermakna. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pancasila terus berfungsi secara efektif sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan publik serta dalam merespons berbagai tantangan dan dinamika permasalahan bangsa. Upaya juga bertujuan untuk menjaga tingginya loyalitas warga negara terhadap Pancasila serta mengurangi sikap apatis dan resistensi terhadapnya. Esensi dari dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila terletak pada proses perubahan dan pembaruan yang terus berlangsung, di mana nilai-nilai Pancasila ditransformasikan ke dalam norma-norma serta praktik kehidupan nyata. Proses ini harus dijalankan dengan tetap menjaga konsistensi, relevansi, serta kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Namun, perubahan dan pembaruan yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila terdapat dinamika internal (*self-renewal*) dalam diri bangsa, serta adanya keterbukaan terhadap nilai-nilai asing yang relevan dan konstruktif untuk memperkaya dan mengembangkan ideologi Pancasila. Inti dari seluruh proses perubahan dan pembaruan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila adalah terpeliharanya tingkat akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila di mata seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia (I Wayan Tagel Eddy, 2018:116).

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir dari kemerdekaan yang penuh dengan perjuangan oleh anak bangsa yaitu merupakan bangsa yang besar dengan berbagai macam bahasa dan etnis yang beragam. Dengan demikian bangsa ini dikenal dengan

bangsa yang sangat ramah dan berbudi pekerti luhur. Tapi seharusnya keberagaman itu yang menghasilkan kebudayaan dan adab yang mulia. Dan juga membawa nalar yang tinggi membentuk sikap anak bangsa hidup pada kebersamaan antar masyarakat yang plural tersebut. Juga adanya peran Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa memengaruhi anak bangsa untuk bisa saling menjaga dan hidup dalam kerukunan. Peran penting Pancasila hadir sebagai dasar negara dan ligatur (pemersatu) pada peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan pergantian pemerintahan, persatuan dan kesatuan bangsa serta rasa nasionalisme mengalami defisit yang luar biasa (Kristoforus Kopong, 2021:48-69).

Dari pembahasan di atas, penulis menjelaskan aktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai Pancasila bisa dilakukan dengan cara yang sederhana serta melalui aktivitas yang rutin dilakukan sehari-harinya.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia yang memiliki akar historis panjang dalam perjalanan bangsa. Untuk memahami kedudukannya secara utuh, penting untuk meninjau kembali dinamika sejarah Indonesia, baik sebelum, saat, maupun sesudah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan erat dengan perjuangan berbagai kerajaan nusantara dalam mempertahankan eksistensi bangsa, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, serta periode kebangkitan nasional Indonesia. Pancasila sebagai fondasi negara tidak muncul secara instan, melainkan melewati proses sejarah yang panjang dan penuh tantangan. Dalam kurun waktu tersebut, banyak peristiwa penting yang turut membentuk dan mengukuhkan posisi Pancasila sebagaimana dikenal saat ini yakni sebagai simbol pemersatu dan penuntun kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika zaman.

Sejak pertama kali dicetuskan, proses perumusan Pancasila tidak terlepas dari dinamika dan perdebatan yang cukup tajam di kalangan para perumusnya. Bahkan hingga kini, di era reformasi dan globalisasi, Pancasila tetap menjadi topik diskusi hangat di berbagai

kalangan, khususnya di lingkungan akademisi, politisi, dan mahasiswa. Salah satu aspek yang kerap menjadi sorotan dalam diskursus ini adalah rumusan sila pertama, yang sejak awal telah menimbulkan perbedaan pandangan antara dua kekuatan besar yang membentuk fondasi sosial bangsa Indonesia—yakni kelompok agamis, yang sebagian besar berasal dari kalangan umat Islam, dan kelompok nasionalis. Kedua kelompok tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam proses perumusan dasar negara. Oleh sebab itu, penting untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang

Pancasila dari masa ke masa, guna memperkuat kesadaran historis bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dokumentasi sejarah ini juga berfungsi sebagai rujukan dalam menghadapi perbedaan pendapat mengenai dasar negara, agar semangat persatuan dalam keragaman, sebagaimana termaktub dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, tetap terjaga. Lebih jauh, pemahaman atas sejarah dan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di lingkungan sekitar kita.

Aktualisasi Nilai Pancasila

Pancasila merupakan fondasi ideologis yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keberadaan Pancasila tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memiliki makna yang sangat mendalam sebagai panduan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Reza Septiadi, 2023).

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata: panca yang berarti lima, dan sila yang bermakna prinsip atau dasar. Menurut Darji Darmodiharjo (dalam Kaderi), konsep Pancasila telah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Gagasan ini tercantum dalam karya sastra klasik seperti Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, serta

Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam Sutasoma, istilah Pancasila dimaknai sebagai *berbatu sendi yang lima*, suatu simbol kekuatan dan keteguhan nilai.

Kemudian, istilah Pancasila kembali diangkat oleh Soekarno dalam proses perumusan dasar negara pasca proklamasi kemerdekaan. Secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip fundamental yang menjadi fondasi negara Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 guna meresmikan perangkat-perangkat konstitusional negara. Dalam sidang tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berhasil disahkan dan kemudian dikenal sebagai UUD 1945, yang di dalamnya tercantum Pancasila sebagai dasar negara.

Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian Pembukaan UUD 1945 meliputi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Pesatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam karya Amalia Rizki dan Dinie Anggraeni (2021:35) ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian Pancasila, diantaranya yaitu:

a. Ir. Soekarno, mengemukakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa negara Indonesia yang sudah ada dari masa ke masa berabad-abad lamanya yang terkubur tak bersuara akibat adanya kebudayaan barat. Sehingga pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Notonegoro, menyatakan Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang diinginkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mampu menjadi pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan juga dapat menjadi pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila secara ilmiah menurut Notonegoro ialah dasar negara yang mutlak dan objektif melekat pada kelangsungan negara, tidak bisa diubah dengan jalan hukum. Notonegoro mengembangkan Pancasila dari sudut "filsafati" sehingga melahirkan filsafat Pancasila yang sampai sekarang wajib dipelajari setiap perguruan tinggi. Filsafat Pancasila gagasan Notonegoro menguraikan dan menjelaskan peranan Pancasila dalam berbangsa bernegara.
c. Muhammad Yamin, menyatakan Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bagi Yamin, Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia (Salsabila Syahira, 2023). Pancasila ialah lima dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik.

Pada hakikatnya, kedudukan Pancasila saat ini tidak hanya terbatas sebagai dasar negara, tetapi juga telah berkembang menjadi cita ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi sekaligus menjadi arah dan tujuan yang hendak dicapai, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, seluruh langkah, metode, dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Secara sederhana, dapat dirumuskan bahwa: dari Pancasila, melalui Pancasila, untuk Pancasila. Apabila salah satu unsur dari rangkaian ini tidak dijalankan secara konsisten, maka visi tentang masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Pancasila akan sulit

untuk direalisasikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus menjadi dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup, tetapi juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang terdapat dalam QS. Muhammad ayat 7 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

Artinya: *Wahai orang – orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*

Ayat ini mengajarkan pentingnya berkontribusi dan berjuang untuk kebaikan dan kebenaran, termasuk dalam konteks pendidikan nilai-nilai luhur seperti Pancasila. Siswa diajarkan untuk berperan aktif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

> *Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga* (HR. Muslim).

Hadits ini menekankan pentingnya mencari ilmu dan pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk menghargai dan mengejar ilmu, termasuk pemahaman tentang nilai-nilai luhur Pancasila.

Aktualisasi Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dianalisis melalui berbagai dimensi, antara lain dorongan moral sebagai kewajiban etik, sikap subyektif warga negara, ketaatan terhadap prinsip-prinsip moral, kesadaran etis, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, serta implementasi konkret nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional, merupakan hasil konsensus politik para pendiri bangsa (*founding fathers*) saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, dalam dinamika sejarah perjalanan bangsa, aktualisasi nilai-nilai Pancasila kerap menghadapi berbagai bentuk penyimpangan atau deviasi, baik dalam tataran kebijakan maupun dalam praktik kehidupan sosial-politik masyarakat.. Penyimpangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penambahan, pengurangan, maupun pengaburan makna aslinya. Kondisi ini kerap kali mendorong munculnya upaya-upaya rekontekstualisasi untuk mengembalikan Pancasila pada esensi dasarnya.

Pancasila kerap dikategorikan sebagai ideologi moderat yang berada di tengah-tengah dua kutub besar: komunisme dan kapitalisme. Oleh sebab itu, Pancasila tidak berafiliasi pada paham komunisme maupun kapitalisme; ia juga tidak memihak pada ideologi individualistik ataupun kolektivistik, serta tidak menganut prinsip teokratis maupun sekuler sepenuhnya. Kedudukan unik dan fleksibel inilah yang sering kali menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bersifat khas dan kontekstual, namun justru karena kekhasan itulah, penerjemahan nilai-nilainya ke dalam praksis kebijakan dan tatanan sosial-politik membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman mendalam (I Wayan Tegel, 2023).

Secara harfiah, aktualisasi berarti pengaktualan atau mengaktualkan. Dalam hal ini, aktualisasi Pancasila bermakna bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut secara nyata dapat tercermin

dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pejabat hingga masyarakat biasa. Tujuan dari aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut tidak stagnan serta dapat tetap terjaga dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki seseorang Untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya untuk mencapai sebuah bentuk hal yang ingin dilakukan (Estri Dwi Nurlaily, 2020:11). Sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang ini mudah sekali terjadi benturan antar agama, etnis dan golongan jika tidak ada yang mempersatukan, yakni Pancasila. Dalam hal melakukan perdamaian antar umat beragama, Pancasila berfungsi sebagai bagian terpenting dari adanya faktor-faktor pemersatu bangsa. Pancasila juga merupakan satu-satunya asas yang digunakan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Oleh Karena hal tersebut dianggap penting, maka perlu adanya pelaksanaan (aktualisasi) dari Pancasila.

Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Eksistensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu keharusan, agar tetap relevan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga dan memperkuat loyalitas masyarakat serta warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila.

Aktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara dapat dilakukan dengan dua pendekatan secara objektif dan secara subjektif (Wibowo, dkk, 2022:5-6). Aktualisasi Pancasila

secara objektif mengandung makna bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai landasan idiil dan materiel dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Artinya, setiap tindakan, kebijakan, dan perilaku baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh rakyat dalam kerangka negara hukum harus selaras dan tunduk pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila. Sementara itu, aktualisasi Pancasila secara subjektif bergantung pada kesadaran individual, ketaatan moral, serta kesiapan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, perilaku dan sikap personal menjadi faktor krusial yang menentukan sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada tataran normatif dalam sistem hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang merata dan berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi sarana strategis untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi fondasi yang mengarahkan perjalanan bangsa menuju keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan beradab yang berkelanjutan. Berikut nilai yang terdapat dalam setiap sila sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menegaskan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menaati perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beserta pengakuan atas sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, menjadi landasan utama dalam kehidupan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap individu dituntut untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya dengan penuh keyakinan dan konsistensi,

sekaligus menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda keyakinan. Praktik keberagamaan yang dijalankan dengan tulus dan bertanggung jawab tidak hanya berdampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap harmoni sosial dan keharmonisan kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengandung ajaran moral bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memperlakukan sesama dengan adil dan berperikemanusiaan, tanpa memandang perbedaan latar belakang, baik agama, ras, maupun golongan. Sila kedua menekankan bahwa setiap individu, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat, dan nilai kemanusiaan yang setara. Dengan demikian, semua orang memiliki kedudukan yang seimbang, serta hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai, tercermin melalui sikap saling menghormati antarsesama, pengakuan atas kesetaraan derajat manusia, serta jaminan atas keadilan di hadapan hukum. Ketika nilai-nilai ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari, akan tercipta suasana sosial yang harmonis, penuh kasih sayang, dan selaras dalam bingkai keberagaman masyarakat Indonesia.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila merefleksikan nilai fundamental mengenai semangat persatuan dan prinsip kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan di negara ini harus selalu konsisten agar tidak terpecah belah, apalagi di era globalisasi ini, semakin mudahnya akses internet, banyak berita-berita hoax yang mengancam integrasi nasional Indonesia. Selain itu, dalam sila ketiga ini juga terkandung nilai nasionalisme dan pratriotisme. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan, kesatuan,

kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila memuat nilai-nilai demokrasi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam prinsip ini, setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang setara dalam proses pemerintahan. Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, menjadikan demokrasi sebagai prinsip yang dikedepankan dalam sistem politik Indonesia. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Setiap keputusan yang dihasilkan secara kolektif wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kepentingan umum dan persatuan nasional.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila merepresentasikan tujuan utama dari pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai yang terkandung dalam sila ini menekankan pentingnya membangun kehidupan bersama yang adil dan beradab, melalui penguatan sikap kekeluargaan serta semangat gotong royong sebagai karakter khas bangsa Indonesia. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan negara, sehingga perlu diwujudkan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, dengan tetap menghargai hak-hak orang lain. Sila ini juga mendorong praktik keadilan sosial melalui pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara proporsional dan berkeadilan. Selain itu, pengamalan sila kelima mencakup pengembangan tindakan-tindakan luhur yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan

kebersamaan, serta kontribusi aktif dalam mendukung kemajuan dan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Alya Zulfikar, 2023).

Penerapan Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan

Contoh pengamalan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan pejabat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   a. Membina kerukunan hidup sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Bersikap toleran kepada umat beragama lainnya.
   c. Membina kerjasama dan tolong menolong antar pejabat dan rakyat biasa.
   d. Tidak menyinggung perasaan rakyat kecil.
   e. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
   a. Senang membantu rakyat yang kesusahan.
   b. Tidak semena-mena terhadap rakyat kecil.
   c. Saling kerjasama dan menghormati dengan masyarakat.
   d. Tidak pilih kasih terhadap rakyatnya.
   e. Memberi keputusan yang adil dalam keputusan tentang urusan bersama.
3. Persatuan Indonesia
   a. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
   b. Selalu mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi.
   c. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa agar lebih maju
   d. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   a. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
   b. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.

c. Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat.
d. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, dari pada kepentingan pribadi.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   a. Peduli terhadap penderitaan yang dialami rakyat.
   b. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum.
   c. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
   d. Melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial.
   e. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan Masyarakat.

Contoh pengamalan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan pedagang:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   a. Menghargai dan menghormati perbedaan agama antar sesama pedagang saat bertemu dipasar maupun diluar pasar.
   b. Berdagang sesuai dengan tuntutan agama seperti jujur dan tidak curang.
   c. Berteman baik dengan pedagang lainnya tanpa membeda-bedakan kepercayaan.
   d. Membina kerukunan antar pedagang.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   a. Saling membantu antar pedagang jika dalam kesulitan.
   b. Menjadi pedagang yang beradab dan berakhlak baik.
   c. Mengerjakan kewajiban dan mendapat hak sebagai seorang pedagang.
   d. Jujur ketika berdagang.
3. Persatuan Indonesia
   a. Selalu menjaga kerukunan antar pedagang.
   b. Menjaga kebersihan lingkungan pasar bersama para pedagang.
   c. Menunjukkan rasa cinta tanah air dengan menjual produk-produk atau hasil buatan dalam negeri.

   d. Menjalin hubungan yang harmonis, supaya tidak saling menjatuhakan antar pedagang.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   a. Menyelesaikan masalah dipasar atau antar pedagang dengan melakukan musyarawah mufakat.
   b. Menghargai perbedaan pendapat antar pedagang.
   c. Bertanggungjawab dan menghormati keputusan bersama.
   d. Setiap pedagang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   a. Bersikap adil dalam setiap kegiatan antar pedagang.
   b. Bekerja sama dengan baik antar sesama pedagang.
   c. Berteman dengan sesama pedagang tanpa membeda-bedakan.
   d. Tidak melakukan perbuatan curang dalam berdagang.

Contoh pengamalan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan petani:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   a. Mengembangkan sikap saling menghormati kepada sesama para petani saat bertemu di sawah
   b. Membina sikap kerjasama antar sesama para petani saat berada di sawah
   c. Membina kerukunan kepada para petani saat di sawah
   d. Bersikap toleransi antar petani yang berbeda agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   a. Membantu para petani di sawah saat terjadi kesusahan
   b. Tidak melakukan hal yang semena-mena kepada para petani saat di sawah
   c. Memberi bantuan kepada para petani yang terkena musibah di sawah
   d. Tidak membeda-bedakan yang mampu dan yang kurang mampu.

3. Persatuan Indonesia
   a. Membina hubungan baik dengan para petani saat bertemu di sawah
   b. Mengembangkan sikap saling menghargai kepada para petani saat di sawah
   c. Mengutamakan kepentingan orang lain di banding kepentingan pribadi waktu berada di sawah
   d. Menjaga kerukunan antar petaani.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
   a. Musyawarah pemilihan kelompok tani
   b. Menghargai pendapat petani lain saat mengutarakan pendapatnya
   c. Melaksanakan keputusan musyawarah kelompok tani dengan baik dan tepat
   d. Menekankan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   a. Peduli terhadap sesama petani lain
   b. Tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dapat merugikan para petani yang ada di sawah
   c. Suka memberi pertolongan kepada para petani jika terjadi kesusahan waktu ada di sawah
   d. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. (Fria sumitro , 2023)

Pancasila mengandung lima konsep dasar yang ditegaskan dalam lima prinsip. Konsep adalah gagasan dasar yang bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenoma yang dihadapinya. Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau *axioma* atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau

landasan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).

Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi konsep religiusitas, konsep humanitas, konsep nasionalitas, konsep soverinitas, dan konsep keadilan sosial, yang secara holistik menyatu dalam konsep kekeluargaan dan kegotong-royongan Bangsa Indonesia. Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik, setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain.

a. Konsep Religiositas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, termasuk manusia.
b. Dalam konsep religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling istimewa di antara ciptaan-Nya. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk memwujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan.
c. Konsep Humanitas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia bahwa sebagai Sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun.
d. Oleh karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani dan menjaga keutuhan ciptaanNya Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera.
e. Konsep Nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi Kebangsaan.
f. Konsep nasionalis ditunjukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.

g. Konsep Soverenitas menegaskan gagasan dasar bangsa Indonesia bahwa kedaulatan pada dasarnya memang berada di tangan rakyat, akan tetapi Diejawantahkan demi perwujudan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu kedaulatan rakyat diselenggarakan atas dasar aturan-aturan dasar yang disepakati dan ditetapkan bersama.
h. Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap gagasan/pikiran wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Maksudnya disini kerakyatan/demokrasi tidak didasarkan pada dominasi mayoritas maupun minoritas.
i. Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran (G. Seto Harianto, 2015:2-3).
j. Konsep ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menjamin hak-hak yang sama dan perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam konsep keadilan sosial, tidak ada deskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, gender, atau latar belakang lainya. Semua orang dianggap setara di depan hukum dan memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak (Aca Davino, 2023).

Penutup

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan aktualisasi pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat.

Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam menstranformasikan nilai pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relefansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penerapan terhadap nilai-nilai asing untuk pengembangan dan pengayaan idiologi Pancasila.

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

BAB VII

TOLERANSI BERAGAMA DALAM PANCASILA

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik kemajemukan yang tinggi, baik dari segi budaya, etnis, bahasa, maupun agama. Dalam aspek keagamaan, Indonesia menjadi tempat bersemainya berbagai agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman ini di satu sisi merupakan aset kebudayaan yang sangat bernilai, sekaligus menjadi sumber inspiratif yang kaya dalam memperkuat proses konsolidasi demokrasi di tanah air. Namun demikian, di sisi lain, keberagaman tersebut juga mengandung potensi konflik sosial, khususnya antarumat beragama, yang dapat mengganggu stabilitas dan bahkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apabila tidak dikelola secara bijak dan inklusif. Dalam konteks pluralitas agama ini, maka penguatan nilai-nilai toleransi menjadi sangat krusial. Toleransi antarumat beragama -yang berarti kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan keyakinan- merupakan isu strategis yang harus terus diperjuangkan demi menjaga harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Toleransi merupakan fondasi utama dalam membangun sikap saling menghormati dan memahami perbedaan yang ada di tengah masyarakat yang plural. Nilai ini berperan sebagai pintu masuk bagi terciptanya ruang dialog yang sehat serta terciptanya harmoni antarumat beragama. Guna mencegah terjadinya konflik horizontal yang berbasis perbedaan keyakinan, toleransi harus diinternalisasikan sebagai kesadaran kolektif oleh seluruh elemen

masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, termasuk pelajar, mahasiswa, aparatur negara, dan masyarakat umum. Lebih jauh, prinsip-prinsip toleransi tidak hanya cukup dipahami secara teoritis, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dan fungsional dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Dalam hal ini, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling mendasar karena bersumber langsung dari hak ilahiah yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman keyakinan yang ada. Penanaman nilai-nilai toleransi pun idealnya dimulai sejak usia dini, agar generasi muda tumbuh sebagai insan yang mampu menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya berbagai keberagaman agama yang ada dengan begitu kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan hidup di negeri ini. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Namum perbedaan ini tidak menjadikan alasan untuk berpecah belah, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar Negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan adanya toleransi antar umat neragama dengan begitu sikap manusia sebagai umat beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain (Devi Kusumawati, 2023).

Ruang lingkup dari pembahasan di atas, dibagi ruang lingkup pembahasan mengenai toleransi beragama dalam pancasila. Toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat supaya lingkungan terasa aman dan damai dengan adanya perbedaan tidak membuat perpecahan dalam kehidupan Masyarakat.

1. Pancasila sebagai Landasan Toleransi Beragama
   Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, memiliki potensi untuk menjadi dasar beragama yang kokoh dan inklusif. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menyiratkan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan. Namun, sila ini tidak mengikat pada suatu agama tertentu, melainkan mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama. Oleh karena itu, berpancasila dalam konteks beragama adalah menerima keberagaman dan mengakui bahwa ketaatan pada agama masing-masing merupakan hak asasi yang harus dihormati.
2. Toleransi Keberagaman dalam Pancasila
   Keragaman agama di Indonesia adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan bijak. Pancasila, dengan sila-silanya yang mendorong persatuan dan kesatuan, seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai keyakinan agama. Berpancasila dalam konteks beragama berarti menghilangkan sekat-sekat pemisah antaragama dan membangun dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut.
3. Bersikap Toleran dan Menghormati
   Berpancasila hakekatnya beragama yang benar juga mencerminkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama yang dianut. Masyarakat Indonesia seharusnya mampu melampaui perbedaan dan memahami bahwa ajaran agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti menerima bahwa setiap agama memiliki kontribusi untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis (Riswadi, 2023)

Pengertian Toleransi Beragama

Istilah toleransi berakar dari bahasa Latin tolerare, yang mengandung makna kesabaran dalam menerima perbedaan. Dalam

konteks kebangsaan, toleransi beragama dapat dimaknai sebagai kemampuan kolektif untuk mengakui, menghargai, dan menghormati keragaman keyakinan, sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi setiap pemeluk agama. Lebih dari sekadar sikap pasif, toleransi menuntut sikap aktif untuk membangun jembatan pemahaman dan solidaritas antarpemeluk agama.

Dalam Riswadi (2023:30), menyebutkan toleransi bukan sekadar pilihan moral, tetapi keniscayaan strategis dalam menjaga pilar kebangsaan. Ia menjadi benteng pertama dalam memperkuat kohesi sosial dan mencegah potensi konflik yang bisa meretakkan tenunan persatuan bangsa. Dalam Indonesia yang majemuk, toleransi bukan sekadar etika, melainkan napas kebhinekaan yang menjaga kita tetap satu dalam kemajemukan.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam KBBSI toleransi yaitu sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri (Rhifky Arfiansyah, dkk, 2022:163).

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya. Toleransi adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial dimasyarakat.

Menurut Umar Hasyim, toleransi beragama diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing (Asmarita, 2023).

Dalam kehidupan sosial beragama, manusia bisa bergaul, baik dengan kelomoknya sendiri atau dengan kelompok lain yang kadang berbeda agama atau keyakinan, dengan fakta demikian sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk saling memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi sehingga kestabilan

sosial dan gesekan-gesekan atau permasalahan ideologi antar umat beragama tidak terjadi (Graham C. Kinloch, 2005:35).

Menghidupkan semangat keberagamaan yang moderat di bumi Nusantara bukanlah sekadar tugas satu-dua pihak, melainkan panggilan kolektif seluruh elemen bangsa. Di tengah kompleksitas dinamika sosial yang terus berubah, peran strategis para tokoh agama dan pemangku kebijakan menjadi jangkar moral sekaligus kompas kebangsaan. Moderasi beragama tidak cukup hanya menjadi wacana elite atau slogan di spanduk, tapi harus ditanamkan dalam nadi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, menyalakan obor moderasi bukan perkara sederhana. Ia ibarat menanam benih di tanah yang kadang subur, kadang berbatu. Mengarusutamakan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keseimbangan dalam praktik keagamaan memerlukan kesabaran sejarah, keteladanan nyata, serta keberanian moral. Karena di era yang penuh gempuran narasi ekstrem dan polarisasi sosial, sikap tengah yang arif justru menjadi jalan sunyi yang sering diabaikan, padahal di sanalah letak kekuatan sejati bangsa ini: Indonesia yang ramah dalam keberagaman, kokoh dalam kemanusiaan. Butuh usaha perjuangan kolektif yakni seluruh elemen masyarakat melalui pelbagai medium dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dan sosial bangsa yang moderat, seperti halnya melalui lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Indikator Toleransi Beragama

Kementerian Agama Republik Indonesia telah merumuskan pilar-pilar utama yang menjadi fondasi dalam penguatan moderasi beragama. Pilar-pilar tersebut mencakup: komitmen terhadap keutuhan bangsa, semangat toleransi yang inklusif, penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, serta keterbukaan dalam merespons dan menghargai kearifan lokal. Adapun penjabaran dari masing-masing prinsip tersebut disampaikan sebagai berikut:

a. Komitmen Kebangsaaan. Sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial individu atas komitmennya dengan konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia serta pelbagai prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan merupakan bagian indikator moderasi beragama yang penting untuk mengidentifikasi paham dan sikap keberagamaan individu terkait kehidupan sosial keberagamaannya.
b. Toleransi. Manifestasi sikap toleransi menjadi bagian dari indikator paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial seseorang dalam menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat beragama di Indonesia khususnya menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia yang harmonis. Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu (kelompok) dapat bersikap toleran dalam merespons kemajemukan yang ada.
c. Radikalisme. Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah radikalisme dalam pembahsan tentang toleransi beragama, yakni sebuah paham maupun sikap (aksi) individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui berbagai kekerasan atas nama ajaran agama. Secara umum, berbagai bentuk radikalisme atas nama agama mengharapakan perubahan signifikan secara cepat kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial masupun norma di suatu tempat (negara). Argumen mendasar mengapa komitmen kebangsaan sangat urgen untuk dijadikan sebagai nilai dalam pembentukan sikap toleransi beragama, disebabkan dalam perspektif toleransi beragama, kesadaran untuk mengimplementasikan ajaran agama sama halnya dengan mengimplementasikan kewajiban sebagai warga negara.

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal. Indikator toleransi beragama ini dapat menjadi basis nilai dalam pembentukan karakteri keberagamaan individu agar dapat bersikap moderat dalam merespons pluralitas kearifan lokal yang sudah mentradisi, yakni membudaya pada pelbagai daerah di Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap tradisi lokal diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap moderasi beragama individu yang ramah terbuka dan toleran dalam merespons ragam praktik tradisi kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Nilai-Nilai Toleransi Beragama dalam Pancasila

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga kini masih terdapat gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat beragama, terkait posisi Pancasila sebagai ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realitas ini tentu menjadi ironi tersendiri, mengingat sejak awal bangsa ini mendeklarasikan dirinya sebagai nation state—negara bangsa yang dibangun di atas fondasi solidaritas dan kesadaran kolektif—diperlukan satu nilai pemersatu yang mampu menyatukan keberagaman dalam satu semangat kebangsaan. Pancasila, dalam konteks tersebut, seharusnya berfungsi sebagai nilai universal yang merangkul seluruh unsur bangsa, termasuk mereka yang berasal dari spektrum keyakinan dan latar belakang agama yang berbeda. Ia bukan sekadar ideologi negara, melainkan jembatan integrasi nasional yang dirancang untuk menjamin kohesi sosial dan harmoni kebangsaan dalam keragaman.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar negara menjadi representasi konkret dari kebutuhan akan pedoman universal tersebut. Di tengah kemajemukan sosial, budaya, dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, Pancasila hadir sebagai simpul pemersatu sekaligus sebagai ideologi nasional yang mampu mengakomodasi pluralitas bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai refleksi jiwa bangsa,

pandangan hidup bersama, filsafat nasional, dan instrumen pembentuk karakter masyarakat Indonesia.

Sebelum menelaah lebih jauh nilai-nilai toleransi beragama yang terkandung dalam Pancasila, penting untuk memahami makna terminologis dari istilah tersebut. Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri atas dua unsur: panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Berdasarkan asal-usul etimologinya, Pancasila mengandung pengertian sebagai lima dasar fundamental yang menjadi pondasi bagi berdirinya Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi sekaligus pandangan hidup yang menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia. Ia lahir dari konsensus historis yang melibatkan unsur politik, budaya, dan agama, menjadikannya sebagai kesepakatan nasional yang bersifat final dan tidak dapat ditawar.

Keberadaan Pancasila membawa pesan penting tentang urgensi menghargai keragaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, terutama dalam hal keberagaman agama. Keberagaman kepercayaan harus disikapi dengan sikap terbuka, toleran, dan senantiasa mengedepankan semangat kerukunan. Dalam wacana pluralisme agama, yang seharusnya dikedepankan adalah kepentingan sosial dan kemanusiaan, bukan semata-mata perbedaan teologis. Oleh karena itu, Pancasila sepatutnya diposisikan sebagai fondasi moral dan teologis yang dapat menaungi semua agama, guna membentuk kesadaran kolektif untuk saling menghargai, menjaga sopan santun, serta membangun kehidupan keagamaan yang damai dan harmonis. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran beragama yang inklusif, visi kebangsaan Indonesia dapat terwujud secara holistic yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam semangat persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial demi kemajuan bangsa (Silvi, 2023). Hal ini sejalan dengan pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara seperti yang terdapat dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi:

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: *Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*

Dari ayat di atas menggambarkan pengakuan terhadap eksistensi agama lain, dengan catatan bahwa sesungguhnya agama Islam dalam pandangan kaum Muslimin merupakan satu-satunya agama yang hak. Dimana, kaum Muslimin menyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, sehingga dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, dalam hal ini Islam sebagai agama yang damai dan menebar kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain. Toleransi dalam beragama tidak lantas mengharuskan seseorang untuk mengakui kebenaran ajaran agama lain atau mempercayai bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju Tuhan. Esensi dari sikap toleransi terletak pada penghargaan terhadap hak dan keberadaan pihak lain, bukan pada penyeragaman keyakinan. Maka, yang dibutuhkan dalam membangun semangat toleransi adalah kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan menjunjung penghormatan terhadap perbedaan, bukan membaurkan prinsip akidah yang justru dapat mengaburkan jati diri keyakinan masing-masing.

Perlu dipahami pula bahwa Pancasila bukanlah kumpulan nilai yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah sistem nilai yang utuh dan saling terintegrasi. Setiap sila saling menopang dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan. Dalam konteks inilah, nilai-nilai toleransi beragama menemukan pijakan

yang kokoh di dalam setiap sila Pancasila, yang secara substansial menjadi fondasi bagi harmoni sosial dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Adapun dimensi-dimensi toleransi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Nilai Toleransi dalam Sila Pertama

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan aspek ketuhanan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan, melainkan negara yang menjunjung tinggi peran transendensi dalam kehidupan publik. Realitas ini tercermin dari adanya keberagaman agama yang tumbuh dan berkembang secara harmonis di Indonesia, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini menjadi panggilan moral bagi setiap warga untuk menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap keyakinan dan praktik keagamaan yang dianut oleh sesama anak bangsa. Prinsip ini juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang secara tegas menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.

Lebih dari itu, sila pertama mengandung pesan etis bahwa setiap insan berkewajiban menjalankan ajaran agamanya dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi larangan-Nya. Namun, pelaksanaan kewajiban keagamaan ini tetap berada dalam koridor kebebasan individu, tanpa tekanan atau pemaksaan dari pihak manapun. Di sinilah letak nilai luhur dari moderasi beragama: menghormati perbedaan, merawat kerukunan, dan mengedepankan toleransi sebagai landasan kokoh dalam merajut hubungan antarumat beragama. Implementasi dari nilai ini memerlukan kekuatan kultural yang melekat dalam karakter bangsa, agar nilai-nilai toleransi tidak hanya hidup dalam teks konstitusi, tetapi juga mengalir dalam keseharian warga negara. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi wujud nyata dari semangat

toleransi dan penghormatan terhadap spiritualitas lintas agama, sekaligus pilar utama dalam merawat persatuan dalam kebhinekaan (Azka Aulia Azzahrah, 2021:173-178).

2. Nilai Anti Radikalisme dalam Sila Kedua

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mengandung pesan mendalam bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan. Kesadaran akan kesetaraan kodrati ini menjadi fondasi moral untuk menegakkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia secara bermartabat dan berperikemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya sebagai representasi dari prinsip humanism bukan hanya menjadi gagasan ideal, tetapi juga landasan praksis dalam membentuk paradigma sosial yang inklusif dan adil. Dalam konteks keberagamaan di masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai ini menjadi pilar penting dalam membentuk karakter keberagamaan yang moderat.

Keberagamaan yang moderat tidak semata didasarkan pada kekokohan iman, melainkan juga diperkaya oleh kesadaran sosial bahwa hidup dalam masyarakat plural mengharuskan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, seseorang yang menginternalisasi semangat moderasi akan senantiasa menjunjung tinggi ajaran agamanya, sekaligus menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan solidaritas dalam setiap relasi sosial. Kombinasi nilai-nilai tersebut menjadi fondasi esensial dalam merawat etika publik dan harmoni sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sejatinya sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menolak segala bentuk kekerasan, termasuk ideologi radikalisme. Dalam konteks kebangsaan, radikalisme kerap dimaknai sebagai paham ekstrem yang menghendaki perubahan tatanan sosial-politik secara revolusioner, bahkan destruktif. Sikap ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia, radikalisme yang mengatasnamakan agama—terutama yang berseberangan dengan Pancasila dan menolak eksistensi NKRI—dapat dilawan melalui penguatan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Ironisnya, sebagian kelompok radikal memandang Pancasila sebagai bentuk sekularisme politik, padahal sejatinya Pancasila tidak memisahkan agama dari negara, melainkan menjembatani keduanya secara proporsional dan harmonis. Dalam kerangka itulah, Pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara, tetapi juga instrumen strategis untuk melawan ideologi yang merusak integritas nasional dan semangat kebangsaan (Desilia Rahmadani).

Salah satu motif yang kerap dituding sebagai pemicu lahirnya gerakan radikalisme maupun aksi terorisme adalah motif keagamaan. Fenomena ini sering menjadi sorotan media, baik dalam pemberitaan cetak maupun digital. Dalam konteks tertentu, khususnya terkait aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, istilah "jihad" kerap dimanipulasi menjadi dalih ideologis bagi para pelaku. Meskipun justifikasi semacam itu tidak dapat diterima secara normatif dalam ajaran agama yang autentik, namun jika ditelaah melalui perspektif psikologi agama, motif tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan pemaknaan religius. Dengan kata lain, penggunaan simbol-simbol agama sebagai pembenar kekerasan lebih merupakan hasil dari proses distorsi kognitif dan krisis identitas spiritual, ketimbang refleksi sejati dari nilai-nilai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

3. Nilai Persatuan dalam Sila Ketiga

Nilai moderasi beragama sejatinya berjalan seiring dengan semangat komitmen kebangsaan atau nasionalisme. Kesadaran akan pentingnya menumbuhkan komitmen terhadap bangsa dan negara menjadi landasan fundamental dalam menjaga kohesi sosial dan keutuhan nasional. Dalam praktiknya, sikap kebangsaan ini diharapkan mampu membentuk pola pikir dan perilaku keberagamaan yang moderat—yakni tidak mudah terpengaruh oleh ajaran atau ideologi keagamaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme.

Nilai persatuan yang termaktub dalam sila ketiga Pancasila memiliki korelasi langsung dengan semangat komitmen kebangsaan, yang menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana moderasi beragama telah melekat pada individu maupun kelompok masyarakat. Komitmen terhadap kebangsaan juga dapat dilihat dari kepatuhan terhadap konsensus dasar bernegara, yakni penerimaan yang utuh terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, serta pengakuan atas UUD 1945 dan regulasi konstitusional lainnya sebagai landasan sah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah derasnya arus globalisasi, yang membuka pintu lebar bagi masuknya berbagai ideologi transnasional—baik yang konstruktif maupun yang destruktif—komitmen kebangsaan menjadi benteng strategis yang melindungi integritas bangsa. Sebab, tidak semua nilai asing sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang berakar pada ideologi Pancasila. Oleh karena itu, peneguhan kesadaran kebangsaan dan sikap nasionalisme yang inklusif merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga persatuan serta memperkuat identitas bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks.

4. Nilai Toleransi Terhadap Kearifan Lokal dalam Sila Keempat

Nilai-nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk paradigma dan sikap keberagamaan yang moderat, khususnya dalam menyikapi keragaman kearifan lokal yang menjadi bagian dari realitas sosial Indonesia. Dalam konteks ini, musyawarah tidak sekadar menjadi mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi fondasi etik dalam membangun harmoni antaragama dan antarkelompok budaya.

Penting untuk disadari bahwa budaya musyawarah bukanlah produk politik modern yang lahir setelah kemerdekaan, melainkan warisan leluhur yang telah mengakar jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Ia menjadi bagian dari konstruksi identitas kultural bangsa, melintasi batas suku, bahasa, dan agama. Maka, ketika nilai musyawarah diterima sebagai norma kolektif, sejatinya Indonesia

telah lama mengembangkan prototipe demokrasi deliberatif yang khas dan berakar kuat dalam kearifan lokal.

Keberagamaan, nilai-nilai ini mendapatkan artikulasi praksis melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif. Salah satu contoh reflektif dapat ditemukan dalam gagasan cemerlang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memperkenalkan konsep pribumisasi Islam. Gagasan ini merupakan upaya cerdas dan arif untuk merekatkan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal secara dialogis dan kontekstual, tanpa harus mengorbankan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Pribumisasi Islam menjadi model moderasi yang mengedepankan akomodasi budaya tanpa kehilangan arah spiritualitas. Dengan demikian, sila keempat Pancasila, melalui spirit musyawarah dan kebijaksanaan, menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan kearifan lokal. Ini bukan sekadar wacana normatif, tetapi aktualisasi nyata dari demokrasi Pancasila yang hidup dalam denyut nadi masyarakat Indonesia sebuah corak keberagamaan yang toleran, dialogis, dan penuh *welas asih*.

5. Nilai Toleransi Beragama pada Sila Kelima

Sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", mengandung makna mendalam bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kemakmuran secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sila ini menjadi refleksi komitmen negara terhadap pencapaian kesejahteraan kolektif serta kebahagiaan yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, sila kelima juga mengukuhkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang lainnya. Dalam kerangka ini, setiap individu dipandang secara egaliter, yakni sejajar di hadapan hukum dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sila kelima tidak hanya menjadi cita ideal, tetapi juga pedoman konkret dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Berpancasila hakekatnya beragama yang benar juga mencakup prinsip kemanusiaan yang universal. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan bersama dan mengatasi kesenjangan sosial. Dalam konteks beragama, ini mengingatkan kita bahwa ajaran agama sejatinya mengajarkan empati, keadilan, dan perhatian terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, berpancasila dalam beragama adalah berpraktik agama dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Riswadi, 2023).

Implementasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan nyata diharapkan mampu membentuk cara pandang dan perilaku sosial masyarakat Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak individu dalam mengekspresikan dirinya. Dalam konteks indikator moderasi beragama di Indonesia, baik sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan" maupun sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memuat nilai-nilai luhur yang selaras dengan semangat akomodasi terhadap kearifan lokal.

Sehingga menegaskan bahwa prinsip kebijaksanaan dan semangat permusyawaratan tidak hanya menjadi pilar dalam praktik demokrasi deliberatif, tetapi juga landasan penting dalam membentuk watak keberagamaan yang moderat—yakni keberagamaan yang inklusif, terbuka, dan menghargai dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam bingkai tersebut, moderasi beragama menemukan relevansinya sebagai jembatan antara nilai-nilai universal dan konteks lokal yang kaya akan kearifan.

Pancasila dalam Beberapa Agama

1. Agama Islam

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam kehidupan beragama di Indonesia, termasuk dalam agama yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Hal ini selaras dengan pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ayat 163:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

Artinya: "*Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Penyayang lagi Maha Penyantun*."

Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah dan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Penyantun. Selain ayat tersebut, terdapat juga ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang menekankan tentang ketuhanan yang Maha Esa.

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur’an dengan (87,2%). Mengacu data demografis, memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa (Mastuki, 2023).
Berikut merupakan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam moderasi beragama di Indonesia:

a. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutui-Nya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara (M. Saifullah Rohman, 2013:209).

b. Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusian yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, prinsip ini terlihat dalam ayat al-Qur'an surat al-Maa'idah, ayat 8 yang artinya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (QS. al-Maa'idah 8).

c. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi Ukhuwah Islamiyah (persatuan sesama muslim) dan juga Ukhuwah Insaniyah (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an;

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

Artinya: *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."* (Q.S. Ali Imran 103).

d. Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi dimana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan.
e. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada al-Qur'an;

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi*

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl [16]: 90).

Analisis data penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: Mengetahui hakikat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, Penjelasan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Hubungan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai tuntunan dalam moderasi beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan negara Indonesia yang bersifat majemuk sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kericuhan dan diskriminasi atas perbedaan dalam keyakinan dan beragama kerap jadi pemicu perpecahan antar masyarakat.

2. Agama Kristen Protestan

Kebebasan beragama Kristen di Indonesia diakui dan dijamin dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini mengakui keberagaman agama di Indonesia sebagai kekayaan budaya dan spiritualitas bangsa yang harus dijaga dan dihormati.

Peran agama Kristen di Indonesia, berdasarkan Pancasila, meliputi kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, advokasi hak asasi manusia, dan pembangunan sosial. Agama Kristen berusaha untuk menciptakan harmoni dan toleransi antar umat beragama dalam semangat kebhinekaan Indonesia. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen, yang muncul setelah protes Marthin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Al-Kitab dengan (6,9%).

Berikut merupakan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam moderasi beragama di Indonesia:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dapat memberikan suatu kebebasan ruang gerak bagi kemerdekaan beragama, setiap orang harus meyakini adanya Tuhan Yang maha Esa dan memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Penjelasan

Al-Kitab: *Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Penolong, Tuhan Khalik Langit dan Bumi beserta segala isinya.*

b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia harus meningkatkan martabat manusia dan dapat menikmati hak-haknya serta melaksanakan tanggung jawabnya. Penjelasan Al-Kitab: *Manusia itu agung dan mulia karena manusia adalah satu-satunya mahluk hidup yang dibentuk atau diciptakan Allah.*
c. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini menjelasakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi keselamatan bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi walaupun berbeda-beda kita tetap satu.
   Penjelasan Al-Kitab: *"Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang* hidup untuk dirinya sendiri..."
d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini menjelaskan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mancapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
   Penjelasan Al-Kitab: *"Kasih itu sabar, Kasih itu murah hati..." "Tidak mengambil keuntungan diri sendiri."*
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjelaskan, untuk bersikap adil, suka memberikan pertolongan kepada orang lain.
   Penjelasan Al-Kitab: *"Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim belalah hak orang-orang yang sengsara dan orang yang kekurangan."*

Dengan demikian menurut orang Kristen sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Kitab bahkan dalam pelaksanaannya secara konsekuen/mendukung apa yang terdapat dalam Al-Kitab. Penjelasan di atas menurut pandangan T.B. Simatupang Pancasila adalah lebih dari sekedar payung, Pancasila mempunyai daya tarik emosionalnya tersendiri. Pancasila sebuah ideologi dan sebuah pandangan hidup (Zilfaroni, 2018)

3. Agama Buddha

Agama Buddha memiliki peranan penting di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, dasar negara Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, agama Buddha juga diakui sebagai salah satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menghormati semua agama yang ada di Indonesia, termasuk agama Buddha. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, memberikan dasar yang kokoh bagi penyebaran dan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Peranan agama Buddha di Indonesia sesuai dengan Pancasila meliputi:

a. Kehidupan Beragama yang Damai: Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara Indonesia. Hal ini memungkinkan umat Buddha untuk menjalankan praktik keagamaan mereka dengan damai, mengadakan ibadah, dan membangun tempat-tempat ibadah Buddha seperti vihara.
b. Kontribusi terhadap Keadilan Sosial: Agama Buddha mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan empati terhadap sesama. Prinsip-prinsip ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, yang menuntut adanya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.
c. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Agama Buddha juga berperan dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Melalui ajaran Buddha, umat Buddha mendorong nilai-nilai kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran spiritual masyarakat.
d. Dialog Antaragama: Agama Buddha turut aktif dalam dialog antaragama di Indonesia. Kerjasama antara umat Buddha dengan umat agama lainnya mendorong pemahaman dan toleransi antar umat beragama, membangun kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Praktik pañca-sīla buddhis mengarah pada peningkatan pengendalian diri dan kekuatan kepribadian. Tujuan pelaksanaan pañca-sīla buddhis sebagai landasan moral bagi umat Buddha memuat dua tujuan, yaitu memungkinkan manusia untuk hidup bersama dalam komunitas beradab dengan saling percaya dan menghormati serta menjadi titik awal perkembangan spiritual menuju pembebasan.

Meskipun Pancasila tidak berafiliasi dengan agama tertentu, nilai-nilai dalam Pancasila sejalan dengan ajaran semua agama, termasuk agama Buddha. Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyampaikan bahwa Pancasila mempersatukan berbagai keragaman yang Indonesia miliki, baik dari segi agama, budaya, bahasa, suku, etnis, dan keragaman lainnya. Pancasila sendiri dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang termasuk di dalamnya ahli agama (Lisniasari, dkk, 2023)

Dengan demikian, peranan agama Buddha di Indonesia sesuai dengan Pancasila adalah sebagai agama yang diakui dan dihormati secara resmi, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan beragama yang damai, keadilan sosial, pendidikan, dan dialog antar agama. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dengan (0,7%).

4. Agama Konghucu

Agama Konghucu memiliki peranan yang penting di Indonesia, terutama dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang mencakup lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Agama Konghucu memiliki peran penting dalam Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Tim Mimbar Khonghucu, 2022). Beberapa nilai

yang terdapat dalam ajaran Konghucu dan sejalan dengan Pancasila antara lain adalah ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan sebagainya. Selain itu, ajaran Konghucu juga menekankan pentingnya etika dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Darwis Muhdina, 2020:35).

Meskipun agama Konghucu bukan agama mayoritas di Indonesia, namun pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan agama Konghucu. Pendidikan agama Konghucu diselenggarakan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi agama Konghucu yang berstatus negeri. Pemerintah juga memberikan pelayanan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum, dan pendidikan agama bersifat wajib (Imam Suprayogo, 2014)

Dalam konteks Pancasila, peranan agama Konghucu di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Ketuhanan Yang Maha Esa: Agama Konghucu memandang adanya kekuatan yang transenden yang disebut Tian (Langit). Meskipun tidak ada ritual formal ibadah dalam Konghucu, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Konghucu, seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan sikap hormat terhadap leluhur dan alam semesta, dapat membantu memelihara hubungan manusia dengan Tuhan dan mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Agama Konghucu menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, kesetiaan, dan kedisiplinan diajarkan dalam agama Konghucu. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila, yang mendorong setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi martabat manusia, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat.
c. Persatuan Indonesia: Agama Konghucu mendorong penghormatan terhadap leluhur dan keluarga. Konsep keluarga luas (*clan*) dalam agama Konghucu dapat berperan dalam

membangun persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Meskipun agama Konghucu memiliki keberagaman tradisi dan praktik di Indonesia, prinsip-prinsip seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat mendukung persatuan Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

5. Agama Kristen Katolik

Peranan Kristen Katolik dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, tidak spesifik untuk satu agama tertentu, termasuk agama Kristen Katolik. Pancasila adalah ideologi dasar yang menjadi dasar negara Indonesia, dan didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia, termasuk yang menganut agama Kristen Katolik. Pancasila diakui dan dijadikan dasar negara oleh Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, perwakilan dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen Katolik, juga turut serta dalam menyusun dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka.

Sebagai agama yang diakui di Indonesia, Kristen Katolik memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Umat Kristen Katolik berkontribusi dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan upaya memajukan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Al-Kitab dengan (2,9%).

Agama Kristen Katolik turut berkontribusi secara signifikan dalam membangun dan mewujudkan Pancasila sebagai konsensus fundamental bangsa Indonesia dalam membina kehidupan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaizan Dzakwan, 2023) Berikut adalah beberapa peran agama Kristen Katolik dalam Pancasila:

a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Umat Katolik turut berperan serta dalam bidang usaha demi pembangunan nasional dengan memangku suatu kedudukan tertentu dan memberikan sumbangan (Universitas Terbuka, 2023). Agama Kristen Katolik juga memiliki peran sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat (Subadi, 2018)
b. Mendukung nilai-nilai dasar hidup bernegara. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam.
c. Mewujudkan keadilan sosial. Gereja Katolik memiliki peran yang amat menentukan dalam meletakkan kerangka landasan moral dan etik masyarakat di tengah-tengah bangsa. Gereja juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. (Perobahan Nainggolan, 2019) Sebagai umat beriman, gereja Katolik layak bersyukur bahwa para pendiri republik Indonesia menyadari pentingnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan bercita-cita untuk mencapainya (Al. Purwa Hadiwardoyo, 2013:17-26).
d. Menghargai nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan unsur kunci kesatuan bangsa. Semua komponen bangsa akan bersatu dalam satu bangsa dan Negara apabila semua memiliki komitmen menerima keberadaan Pancasila. Agama Kristen Katolik juga menghargai nilai-nilai Pancasila dalam terang iman Kristian (Ghaizan Dzakwan, 2023).

Dalam kesimpulannya, agama Kristen Katolik memiliki peran penting dalam mewujudkan Pancasila sebagai kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Agama Kristen Katolik turut berperan serta dalam bidang usaha demi pembangunan nasional, mempersatukan masyarakat, mendukung nilai-nilai dasar hidup bernegara, mewujudkan keadilan sosial, dan menghargai nilai-nilai Pancasila.

6. Agama Hindu

Agama Hindu memiliki peranan penting dalam pembentukan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila (prinsip) yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan agama Hindu dalam Pancasila terlihat pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu memiliki konsep tentang Tuhan yang dikenal dengan istilah "Brahman", yang merupakan prinsip tunggal yang mencakup segala sesuatu di alam semesta. Konsep ini sejalan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Dalam pandangan Menteri Agama RI, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila sejalan dengan ajaran semua agama. Pancasila sebagai sebuah ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antar kelompok yang beragam. Lahirnya Pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja, melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasionalis. Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama mana pun (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023).

Dalam pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melaksanakan penataan kehidupan beragama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lebih harmonis. Pemerintah juga memberikan pelayanan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan agama di negara Pancasila ini memiliki dasar yang sangat kuat, artinya memang harus diberikan kepada seluruh warga negaranya.

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran agama Hindu dalam Pancasila adalah sebagai salah satu keyakinan dalam melaksanakan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, nilai-nilai dalam ajaran agama Hindu sejalan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Konsep Tri Hita Karana dalam ajaran agama Hindu juga mengandung nilai Pancasila. Pemerintah Indonesia juga memberikan pelayanan pendidikan agama Hindu di

lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi (Imam Suprayogo, 2014).

Peresmian pengakuan agama Hindu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia terjadi pada 24 Januari 1959. Pada tanggal tersebut, Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, menandatangani Keputusan Presiden yang mengakui enam agama sebagai agama resmi di Indonesia, termasuk agama Hindu. Keputusan Presiden tersebut juga dikenal sebagai Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1965. Pengakuan ini memberikan jaminan hak-hak bagi umat Hindu dalam menjalankan ibadah, merayakan hari raya, serta memelihara dan mengembangkan kehidupan keagamaan mereka.

Dengan pengakuan ini, agama Hindu diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia dan dijamin kebebasannya untuk beribadah dan beraktivitas keagamaan. Hal ini mencerminkan semangat toleransi dan pluralisme dalam negara Indonesia, yang menghormati keberagaman agama dan keyakinan masyarakatnya.

Implementasi Nilai Pancasila dengan Pendidikan Pembentukan Sikap Toleransi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give partical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Menurut KBBI implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam *oxford advance learner's dictionary* bahwa implementasi adalah *"put something into effect",* penerapan sesuatu yang memberikan dampak dan efek (Mulyasa, 2012:93).

Melalui pendidikan pancasila diera global ini dengan mengimplementasikannya dan menuangkannya dalam bentuk tindakan yang dilakukan sehari-hari dan berkesinambungan sangatlah efektif dalam upaya pembentukan sikap toleransi pada mahasiswa yang pluralisme dan majemuk dibandingkan hanya penyampaian teori saja tanpa ada tindakan actual nya yang dilakukan oleh mahasiswa yang bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila ini untuk membentuk sikap toleransi mahasiswa di universitas potensi utama dilakukan tidak hanya dalam mata kuliah pendidikan pancasila akan tetapi dilakukan secara kontinu mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma agar lebih efektif yakni dengan adanya kebijakan positif (Islamy, dkk, 2021).

Dampak implementasi nilai-nilai pancasila dalam pendidikan pancasila sebagai upaya mewujudkan sikap toleransi mahasiswa. Dampak dari mengimplementasikan nilai-nilai pancasila berpotensi utama sebagai upaya mewujudkan sikap toleransi memberikan dampak positif yakni bertambahnya rasa dan sikap perduli kepada teman dan sesama yang membutuhkan, terwujudnya sikap kebersamaan dalam setiap tindakan yang dapat dilihat di tempat-tempaat seperti kelompok diskusi, tempat ibadah, tempat organisasi, ruang kelas dan lainnya dimana mahasiswa berbaur antar sesama dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan bahasa.

Pentingnya Toleransi Beragama di Indonesia

Negara Indonesia memiliki 6 macam agama terdiri dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu dan agama Khong Hu Chu. Walaupun dalam beragama kita berbeda-beda agama tapi kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, saling membantu, dan memberi salam agar terciptanya hubungan

yang harmonis dan rukun dalam beragama. Sikap toleransi mengajarkan kita untuk saling menghargai dengan perbedaan yang ada dan hidup dalam bingkai kebersamaan tanpa menghina dan tidak menghormati sesama meskipun beda agama, suku, bahasa (Fitri Yani, dkk, 2020:54-55). Lalu mengapa toleransi dalam beragama itu penting? Alasannya yaitu:

1. Toleransi di Indonesia sangatlah diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat Indonesia sebagai negara multikultural, para pendiri bangsa sejak awal sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa, bernegara dan beragama, yaitu Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara fakta telah berhasil menyatukan seluruh kelompok agama, etnis, bahasa bahkan budaya di Indonesia. Indonesia memang bukanlah negara agama, namun dalam kehidupan sehari-hari agama menjadi tuntunan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal bahkan beberapa hukum agama dikembangkan oleh negara dalam Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah.
2. Hadirnya agama dalam kehidupan manusia adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai mahkluk yang mulia serta menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah sebabnya, setiap agama itu membawa misi perdamaian dan keselamatan. Agama mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjaga nyawa seorang manusia menjadi prioritas, karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa semua umat manusia. Oleh karena itulah dengan adanya moderasi bergama ini hendaknya menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya serta agama benar-benar menjadi ruh dalam kehidupan sehingga harkat dan martabat manusia akan terjaga.
3. Seiring perkembangan zaman setelah ribuan tahun agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, beraneka warna kulit, berbangsa-bangsa dan terus berkembang. Keilmuan juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab problem kemanusiaan. Teks-teks agama pun

menjadi multitafsir, kebenaran menjadi relatif, bahkan sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya, sehingga menjadi fanatisme terhadap kebenaran versi yang disukainya. Oleh karena itu, terjadilah konflik yang tidak bisa dielakkan. Kompleksitas masalah kehidupan manusia serta agama ini terjadi tidak hanya pasa satu daerah/ negara, bahkan berbagai dibelahan dunia lainnya. Maka untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi problem ini, moderasi beragama menjadi solusinya dan penting untuk diterapkan sehingga tidak ada lagi konflik yang berlatar agama terjadi dan terjagalah eksistensi kemanusiaan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan: Toleransi beragama dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa Indonesia kedepannya.
5. Menghargai perbedaan: Toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain.
6. Mencegah terjadinya konflik: Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai.

Kontekstual Toleransi Beragama dalam Negara Pancasila

Nilai kontekstual dalam Pancasila merujuk pada nilai instrumental, yang merupakan bentuk penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang bersifat kontekstual dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Nilai instrumental ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan seperti UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya

a. Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual yang memungkinkan peserta didik untuk aktif,

berkembang, dan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

b. Nilai-nilai Pancasila perlu disampaikan secara kontekstual agar hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c. Sebagai ideologi dinamis, Pancasila mengandung tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, yang bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman.
d. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual menjadi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat (Muhammad Yunus, 2017).

Penutup

Dimensi toleransi beragama yang terkandung dalam Pancasila dapat diurai secara sistematis sebagai berikut: Pertama, pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, termuat nilai-nilai toleransi yang membentuk paradigma serta sikap sosial keberagamaan yang menjunjung pluralitas dan keberagaman dalam kehidupan antarumat beragama. Kedua, dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung semangat anti-radikalisme yang berorientasi pada nilai-nilai humanisme universal. Ketiga, sila Persatuan Indonesia memuat nilai komitmen kebangsaan yang mendorong terbentuknya kesadaran nasionalisme dalam ekspresi keberagamaan. Keempat dan kelima, pada sila Kerakyatan serta Keadilan Sosial, termanifestasi nilai akomodasi terhadap kearifan lokal yang mendorong sikap musyawarah serta keadilan sebagai landasan sosial dalam merespons keberagaman budaya dan agama yang hidup di tengah masyarakat.

Secara teoritik, temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki muatan nilai-nilai universal yang dapat dijadikan sebagai landasan ideologis dan etis bagi penguatan sikap moderasi beragama di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif,

melainkan aplikatif dalam membentuk watak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan damai. Meskipun demikian, ruang penguatan penelitian ke depan masih terbuka lebar, khususnya dalam mengkaji peran strategis pemerintah dalam mendiseminasikan nilai-nilai toleransi beragama yang terinternalisasi dalam Pancasila ke seluruh lapisan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ini menjadi agenda penting dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus deras globalisasi dan polarisasi identitas.

Agama dan Pancasila saling melengkapi dan nilai-nilai Pancasila yang disetujui oleh semua ajaran agama. Integrasi Pancasila dan Moderasi Beragama dapat membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan Indonesia, memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat yang beragam, dan mengakui nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila. Sikap toleransi sangat penting bagi seseorang dan harus ada di dalam diri setiap individu, begitu juga dengan seorang siswa yang harus memiliki kesadaran akan pentingnya sikap toleransi sejak dini bukan hanya kepada teman namun kepada orang lain dan masyarakat luas.

BAB VIII

PANCASILA DALAM BUDAYA KAMPUS

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia merupakan salah satu pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Pancasila sebagai dasar filosofi dalam negara sangat menarik untuk kita kaji dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali pendidikan (Habibul Umam Taqiuddin, dkk, 2022:15).

Kampus ialah pusat peradaban manusia karena masa perkuliahan merupakan awal dari berbagai gagasan serta inspirasi tercipta sehingga nantinya akan menghasilakan sebuah generasi yang menentukan arah gerak bangsa. Pendidikan menjadi penting, karena merupakan proses dalam menciptakan sumber daya manusia dan masa depanlah yang akan menguasai zaman (Bramma Aji Putra, 2023).

Sayangnya dengan berkembangnya era globalisasi membuat mahasiswa yang dahulunya mampu aktif serta berpikir secara kritis sekarang menjadi mahasiswa lemah yang mudah terjerumus dalam perkembangan arus budaya tanpa selektif untuk memilah mana yang baik dan buruk. Sekarang mahasiswa semakin sulit untuk lepas dari *smartphone* miliknya dan menjadikan konten sebagai makanan sehari-hari mereka. Rasa cinta tanah air semakin pudar dan idealisme juga akan luntur dari benak para mahasiswa yang menjadikanya semakin kehilangan arah (Nailah Husna, 2023)

Setiap mahasiswa seharusnya bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan masyarakat karena mereka sudah mempunyai bekal yang cukup yang didapat dibangku perkuliahan. Apabila seorang mahasiswa mampu mengamalkan semua sila yang ada pada Pancasila maka mereka pasti akan mampu bersosialisasi dengan lancar di masyarakat, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka peranan Pancasila dalam kehidupan kampus sangatlah dibutuhkan dan harus selalu dipertahankan, supaya para mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia yang berjiwa Pancasila serta mampu berpikir, bersikap, dan bertindak yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Arini Nuranisa, 2023).

Akan tetapi dalam realitanya banyak di kalangan berbagai mahasiswa tidak paham akan nilai-nilai Pancasila serta hubungannya dengan yang disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman yang tumbuh dalam diri mahasiswa bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila (Habibul Umam Taqiuddin, dkk, 2022:16).

Mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam budaya kampus merupakan salah satu cara melestarikan warisan para pejuang pendiri negara. Hal ini juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan jiwa mahasiswa yang dikenal dengan sifat kritis, idealis, serta akademis.

Dari pembahasan diatas penulis membagi ruang lingkup pembahasan mengenai Pancasila dalam Budaya Kampus. Mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam budaya kampus merupakan salah satu cara melestarikan warisan para pejuang pendiri negara. Hal ini juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan jiwa mahasiswa yang dikenal dengan sifat kritis, idealis, serta akademis.

Dalam hal ini Pancasila memiliki peran penting dalam budaya kampus. Adapun ruang lingkup pancasila dalam budaya kampus sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila: Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, menjadi pedoman moral dalam perilaku dan interaksi dilingkungan kampus.
2. Pendidikan Pancasila: Kampus sering mendorong mahasiswa untuk meahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik maupun sosial.
3. Kegiatan Mahasiswa: Mahasiswa sering mengorganisir kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan pengabdian masyarakat (KKN).
4. Toleransi terhadap keanekaragaman: Pancasila juga mendorong saling menghormati terhadap perbedaan suku, budaya, agama, dan latar belakang mahasiswa di lingkungan kampus.
5. Etika Akademik: Pancasila juga terdapat nilai etika dalam akademik, integritas, kejujuran, dan keadilan dalam menyelesaikan tugas.
6. Dialog dan Diskusi: kampus sering menjadi tempat dialog, diskusi, dan debat terbuka seperti yang telah ditunjukkan dalam nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang mana hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik (Paristiyanti Nurwardani, dkk., 2016:18).

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dipelajari tentang nilai-nilai pancasila. Hal ini juga menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

Pancasila dan Budaya Kampus

Menurut Notonegoro Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai

pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik (Irwan Gesmi, dkk., 2018:1).

Menurut Ir. Soekarno pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. (Ronto, 2012: 1) Tanpa dasar negara, suatu negara tidak dapat eksis karena tidak dapat diketahui dengan jelas kemana tujuan yang harus dicapai. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa akan kuat dalam menghadapi persoalan internal dan eksternal. Peran dan fungsi Pancasila di zaman modern ini masih sangat signifikan karena Pancasila menyangkut semua persoalan-persoalan dalam kehidupan.

Selain itu, Pancasila juga merupakan instrumen keamanan dan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia yang implementasi konkritnya tidak hanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tetapi dilaksanakan secara maksimal karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini belum terwujud. Pancasila juga membentuk kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai luhur tersebut sudah sangat luntur dan tergerus akibat perilaku yang hanya berkutat pada aspek ekonomi dari gaya hidup globalisasi yang buruk. Karena begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka untuk mewujudkan Pancasila dan cita-cita Pancasila, kita harus terus memperjuangkan dan menjunjung tinggi, melestarikan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara etimologis, budaya mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Sementara dalam konteks bahasa Inggris, budaya disebut culture, yang berasal

dari kata Latin colere, yang berarti mengolah atau memelihara, awalnya merujuk pada aktivitas pertanian. Dari makna inilah berkembang pengertian budaya sebagai hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia dalam membentuk peradaban yang kompleks dan berkelanjutan Budaya tidak hanya sekadar ekspresi artistik, tetapi juga menjadi refleksi intelektual dan spiritual masyarakat, yang membentuk sistem nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wilda Bayuningsih, 2019:16).

Pancasila merupkan ajaran gagasan dan keyakinan sebagai acuhan tingkah laku masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan (Hankam), sosial, kebudayaan, keagamaan, maupun pendidikan, sehingga dalam setiap tindakannya, selalu mengacu kepada Pancasila sebagai dasarnya .tapi tidak bisa kita pungkiri, bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa sekarang kurang begitu memehami akan makna serta meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi kita.

Koentjaraningrat (1923-1999) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, dijelaskan pula bahwa budaya mempunyai 3 unsur yaitu pola pikir, ide, dan gagasan.

Jadi budaya merupakan hasil karya manusia baik itu berupa pola pikir, ide, maupun gagasan. Ini juga berarti bahwa budaya merupakan bagian hidup dari masyarakat karena budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan seperti agama, adat istiadat, pakaian, tempat tinggal, hingga karakter masyarakat.

Kampus merupakan tempat para mahasiswa menuntut ilmu. Kampus merupakan tempat bagi mahasiswa untuk meraih cita-cita, harapan, serta impian. Di dalam lingkungan kampus, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan tetapi juga untuk pengembangan bakat dan penanaman nilai-nilai kehidupan, sehingga mampu melahirkan lulusan yang kreatif, kritis, dan bermoral (Andreas Setiawan, 2018:1).

Jadi, budaya kampus adalah kebiasaan hidup yang berkembang dan dimiliki banyak orang dalam lingkungan kampus. Bisa dikatakan bahwa budaya kampus merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Lingkungan kampus tidak hanya tempat untuk kegiatan belajar mengajar saja, tetapi di dalam lingkungan kampus juga akan mengajarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam konteks tersebut menggambarkan bahwa suatu kampus telah melakukan pelestarian budaya serta perkembangan budaya.

Budaya kampus tersebut diterapkan oleh seluruh civitas akademika yang ada di kampus tersebut, tidak hanya mahasiswa saja. Penerapan budaya kampus tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab Pancasila sendiri merupakan nilai nilai luhur yang digali dari kebudayaan bangsa Indonesia. Secara umum budaya atau adat sama dengan kampus lain, namun ada beberapa adat yang berbeda tergantung dari visi dan misi kampus (Febrianti Siska, 2023).

Perwujudan kebudayaan di kampus, ialah diadakannya kegiatan yang dijadikan kebiasaan seperti Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) yang dilaksanakan setiap tahun bagi seluruh mahasiswa baru. Pemilihan pengurus organisasi yang dilaksanakan oleh setiap organisasi di kampus setiap tahun dan masih banyak lagi. Untuk kedepannya akan lebih baik apabila budaya dalam kampus ini terus mengalami peningkatan. Hendaknya semua civitas akademik kampus mempunyai budaya yang baik yang selalu dilaksanakan di kampus.

Budaya kampus dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan di amalkan oleh warga masyarakat akademik, dilembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Budaya kampus sebenarnya adalah budaya universal. Artinya dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik, sehingga terjadi kebisaan di kalangan akademik untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut. Pemilikan budaya kampus ini seharusnya menjadi idola semua insan akademisi perguruan tinggi, yakni dosen dan

mahasiswa (Fajar, 2002). Derajat akademik tertinggi bagi seorang dosen adalah dicapainya kemampuan akademik pada tingkat guru besar (profesor). Sedangkan bagi mahasiswa adalah apabila iya mempu memcapai prestasi akademik yang setinggi-tingginya (Yasser Arafat, 2021:112).

Jadi dapat disimpulkan, Budaya Kampus adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki mahasiswa di lingkungan kampus yang mencakup hal akademik dan non akademik, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Umumnya budaya atau kebiasaan sama dengan kampus lainnya, tapi ada beberapa kebiasaan sama dengan kampus lainnya, tapi ada beberapa kebiasaan yang berbeda sesuai visi dan misi kampus itu sendiri. Budaya kampus bisa terjadi apabila digerakkan dan didukung oleh pihak-pihak yang saling terkait, memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab tinggi terhadap perkembagan dan kemajuan kampus itu sendiri untuk mencapai tujuan menuju masa depan yang cerah.

Penerapan Pancasila dalam Budaya Kampus

Pancasila merupakan dasar falsafah negara dan juga landasan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasil, nilai Pancasila saling berkaitan dan dijadikan suatu pedoman dan keyakinan yang menjadi panutan bagi tiap-tiap warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat berhubungan erat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Pada era saat ini peran generasi muda terutama mahasiswa sangat diperlukan untuk eksistensi identitas bangsa Indonesia. Mahasiswa merupakan aktor perubahan dan pemerataan pembangunan sekaligus sebagai penggerak implementasi nilai-nilai Pancasila.

Menurut Agus Widjojo, pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Pancasila erat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang

berisikan semangat gotong-royong di atas keberagaman yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Namun, implementasi nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih jauh dari yang diharapkan bersama. Dalam peringatan hati lahir pancasila tahun 2021, Agus mengingatkan kepada seluruh keluarga besar lemhannas RI untuk memahami dan menghayati bersama bahwa pancasila telah membuat bangsa ini bersatu. Oleh karenanya, kita harus mengimplementasikan pancasila dalam tindakan sehari-hari untuk membangun Indonesia yang tangguh (Kaelan, 2002:31).

Subagyo (2020) mengungkapkan bahwa di era globalisasi ini, banyak bermunculan berbagai ideologi sehingga menantang dan bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus tetap menjaga dan melestarikan Pancasila dengan cara menerapkan dan menjalani nilai-nilai Pancasila, memahami apa pentingnya Pancasila, serta menanamkan pada diri sendiri bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan kekokohannya. Dengan menjalankan hal tersebut, diharapkan Pancasila tetap menjadi pandangan yang memiliki nilai besar di dalam negara dan tidak akan pernah luntur meski perkembangan zaman terus berubah.

Sanusi (2019) mengungkapkan bahwa Pancasila sangat berperan penting dalam menyikapi perkembangan zaman karena nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan dengan kehidupan Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Namun pelaksanaanya secara spesifik belum dapat dilaksanakan dengan baik karena selama ini keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia belum terwujud. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai landasan negara, maka kita terutama sebagai mahasiswa harus terus berjuang untuk memelihara, melestarikan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari guna mencapai tujuan dan mempertahankan identitas jati diri bangsa Indonesia.

Perguruan tinggi merupakan agen pembelajaran yang menghasilkan penerus bangsa, dituntut mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan, perkelaihan, budaya plagiasi, perilaku menuntut hak mengabaikan kewajiban serta perilaku tidak jujur dalam penyelesaian tugas adalah merupakan bentuk pelanggaran tata nilai yang harus segera dilenyapkan dari perilaku mahasiswa sebagai seorang calon sarjana dan calon penerus tongkat estafet kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi tidak cukup hanya melalui slogan dan moto yang dikeluarkan oleh manajemen Perguruan Tinggi dalam bentuk banner, pernyataan-pernyataan bernilai karakter, namun membutuhkan adanya action yang kongkrit pada konteks kehidupan kampus (Anif Istianah, dkk., 2021:68).

Nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda agar mereka mengetahui bagaimana sikap generasi yang baik, bertanggung jawab, senantiasa menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta kerakyatan. Generasi muda zaman sekarang harus dapat menyadari, memahami, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan kampus. Diperlakukan pendidikan Pancasila karena akan berpengaruh besar terhadap mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, juga agar mahasiswa bisa mengetahui yang salah dan harus dihindari dan yang benar yang harus dipatuhi yang terdapat dalam QS. Asy-Syura' ayat 38 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan)*

dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezekiyang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Di perguruan tinggi, ini dapat diterapkan dalam diskusi kelompok, pengambilan suara untuk pemilihan ketua himpunan, dan lain sebagainya. Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila harus diajarkan dan dihayati sejak dini, walaupun berbeda-beda suku, ras yang ada di Negara Indonesia tidak menjadikan perpecahan ataupun permusuhan tetapi justru dengan adanya perbedaan tersebut menjadi pemersatu anta bangsa, dan menjalin keakraban sau sama lainnya. Pengenalan mana Pancasila yang sejak kecil diberikan kepada generasi dari penerus bangsa yaitu dengan tutur kata dan tingkah laku, artinya mengimplemantasikan kepada masyarakat apa yang sudah diajarkan, karena hal tersebut berkaitan dengan nilai, moral dan norma.

Pada era globalisasi saat ini, kita dapat mengakses internet dengan sangat mudah. Berita atau informasi terbaru dapat kita temukan dalam hitungan detik. Pada saat menemukan informasi baru akan muncul rasa penasaran dan kita akan mencari lebih dalam lagi. Tanpa disadari kita menerapkan apa yang telah kita cari dan menjadi sebuah kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang perlu diberi perhatian lebih bagi kita khususnya mahasiswa yang akan menjadi calon pendidik masa depan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Seorang manusia hidup didunia tidak hanya sekedar untuk menikmati kenikmatan dunia semata, akan tetapi untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya. Dalam sila tersebut tidak disebutkan untuk agama apa. Akan tetapi bersifat universal yang artinya setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama sesuai kepercayaannya. Pada sila ini pula menggambarkan kebebasan untuk beragama selama tidak berlawanan dengan ideologi bangsa. Terkandung pada sila pertama pancasila yakni

ketuhanan yang maha esa yang artinya setiap warna negara Indonesia harus beragama.

2. Suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Yang terkandung pada sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam negara adalah beraneka ragam tetapi meningkatkan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika", yang terkandung pada sila ke tiga yakni persatuan Indonesia.
4. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. yang terkandung pada Pancasila sila ke empat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah: a) keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya), b) keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan c) keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya). Dalam nilai-nilai pancasila terdapat poin-poin kehidupan seperti ketaatan dalam beragama, cara memanusiakan manusia, hidup beradab dan beretika, kerjasama, gotong royong, toleransi, simpati, empati, bersikap bijak dalam segala sesuatu, sampai memimpin dengan adil. Jika semua poin pada nilai pancasila ini mampu diterapkan pada diri setiap warga negara, niscaya negara Indonesia akan maju, mampu bersaing di era globalisasi, dengan kontribusi dari generasi pembangun bangsa yang beradab dan beragama (Dea Delta, dkk., 2022), nilai ini terkandung dalam sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki 3 nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan fungsinya, nilai tersebut diantaranya: Yang pertama Pancasila memiliki nilai Dasar, ini merupakan nilai yang sifatnya tidak dapat dirubah merupakan nilai luhur yang menjadi landasan bagi nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan sosial. Kedua adalah Pancasila memiliki nilai Instrumental, merupakan penjabaran lebih lanjut dan merinci tentang nilai dasar yang bersifat dinamis dan dapat berubah namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur atau nilai dasar, seperti; peraturan perundang-undangan yang setiap saat dapat dirubah mengikuti perkembangan zaman dan kondisi. Dan yang terkahir adalah Pancasila memiliki nilai Praksis, merupakan nilai yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bagus Pradhana Krisnamukti, dkk, 2020:67).

Sedangkan cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila adalah perilaku yang mengharuskan kita bersikap baik terhadap Ideologi Pancasila. Contoh sikap baik yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Menerima pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara,
b. Berusaha mempelajari agar memahami makna pancasila, nilai-nilai pancasila dan kedudukan pancasila sebagai dasar negara,
c. Mempertahankan pancasila agar tetap lestari,
d. Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan pancasila,
e. Menetapkan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
f. Kesetiaan terhadap bangsa dan negara (Habibul Umam Taqiuddin, 2022:19).

Pemahaman nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan aktor perubahan dalam pemerataan pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi nilai-nilai Pancasila namun akhir-akhir ini semangat

itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Sebagai mahasiswa tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu tujuan dari sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat kampus maka mahasiswa perlu merefleksikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kesehariannya.

Di zaman teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, banyak anak muda yang karena kurangnya pemahaman mereka, bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebuah studi mendalam tentang Pancasila memberi kita reputasi sebagai negara Indonesia bersertifikat dan untuk menampilkan berbagai martabat dan budaya (Sepriadinson Saragih, 2022:700). Oleh karena itu, diharapkan pengertian makna Pancasila sebagai konsep yang membangun kesehatan negara. Karakter mahasiswa berkembang dari waktu ke waktu dan mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan, memberi, bertekun, dan akhirnya mengembangkan pengendalian diri. Generasi muda adalah generasi penerus dalam perjuangan untuk dunia, jadi lebih penting lagi jika kita sendiri membenamkan diri dalam budaya bangsa apa yang mereka yakini benar, terima, ikuti, bela dan perjuangkan.

Di Indonesia ini masih banyak mahasiswa yang belum mengenal Pancasila. Apalagi nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi pedoman bangsa Indonesia menjadi ideologi kebanggaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ketika mahasiswa datang ke universitas, biasanya diasumsikan bahwa mereka hanya mempelajari mata kuliah yang menjadi konsentrasi mereka. Hal-hal inilah yang membuat mahasiswa rela mengabaikan ilmu kepancasilaan yang mereka pelajari dari SD hingga SMA. Sehingga terkesan tidak membawa ilmu yang diperolehnya ke perguruan tinggi, sehingga siswa selalu mengabaikan pendidikan Pancasila yang sebenarnya sangat masuk akal, karena pancasila juga dapat mengetahui karakter siswa ketika memahami Pancasila sendiri. Standar-standar dalam Pancasila jika tidak diajarkan kepada siswa sejak awal menyebabkan hilangnya semua standar yang ada di

Indonesia, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang sangat berguna.

Untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat kampus, mahasiswa hendaknya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa iptek dengan pemikiran intelektual yang kuat, kita dapat menggunakan bakat kita dan dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan merupakan realisasi praktis di kampus untuk mencapai tujuan, semua mahasiswa harus berpijak pada hakikat manusia sebagai tujuan pelaksanaan dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri (Muhammad Arizalamri, 2023).

Pancasila bukan hanya rumusan dan pedoman, tetapi juga merupakan falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Indonesia. Kita para akademisi yang juga merupakan agen perubahan dapat menerapkan nilai-nilai pancasila secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan pendidikan. Penerapan atau pelaksanaan pedoman Pancasila adalah kewajiban setiap orang Indonesia. Namun dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila semakin memudar. Penyebabnya adalah masuknya budaya asing dan perkembangan teknologi di tengah kehidupan masyarakat yang terus menerus terpantau dan tidak tersaring yang selalu diikuti oleh masyarakat Indonesia. maka patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia akan semakin tercerai.

Menurut Harcici (2019), ada faktor dan penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila, faktor dan penyebabnya sebagai berikut:

a. Kurangnya pendidikan agama;
b. Kurangnya pendidikan Pancasila;
c. Kurangnya pembinaan moral yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat;
d. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila;
e. Efek dari teknologi

Sebagai mahasiswa dengan gaya intelektual yang baik, kita dapat menggunakan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan dan pelaksanaan praktik internal di kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus berpijak pada hakikat manusia sebagai substansi pelaksanaan dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, fitrah manusia merupakan sumber yang berharga bagi pengembangan diri kampus.

Penerapan nilai Pancasila didalam kampus akan berdampak positif terhadap mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, mahasiswa juga akan tahu bagaimana seharusnya mereka bertindak sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam nilai Pancasila.

Tujuan dan Implementasi Pancasila dalam Budaya Kampus

1. Tujuan Penerapan Pancasila dalam Budaya Kampus

Tujuan penerapan Pancasila dalam budaya kampus yaitu sebagai berikut:

a. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan.
c. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nila-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagi warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945.

e. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskasn Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyaraat bangsa Indonesia (Arini Nuranisa, 2022).

Dalam tujuan pernerapan Pancasila dalam budaya kampus seperti yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil garis besar bahwa tujuan penerapan Pancasila dalam budaya kampus adalah sebagai dasar filsafah negara dan idiologi bangsa, Pancasila sebagai norma dalam kebudayaan lingkungan kampus. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yang diterapkan dalam budaya kampus akan menciptakan suatu lingkungan budaya kampus yang lebih tertata, dan memiliki norma-norma dalam bersikap. Sehingga mahasiswa dalam setiap bertindak dan melakukan keputusan juga lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam pancasila.

2. Implementasi Pancasila dalam Budaya Kampus

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengemasnya dalam suatu kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dilakukan agar generasi muda merasa nyaman dan nilai-nilai Pancasila yang ingin dicapai dapat tertanam dengan mudah di jiwa mereka. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga tidak bisa ditentukan oleh lamanya waktu penyampaian materi. Jika penyampaiannya tidak menarik, justru hal ini akan membuat generasi muda merasa bosan dan jenuh. Berikut ini implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus:

a. Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama. Terlebih lagi kehidupan beragama di Indonesia sangatlah kompleks terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia dari mulai Islam, Budha, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain sebagainya. Dengan cara mendalami perwujudan dari kemanusiaan yang adil dan beradab,

maka dari itu Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya. Cara masyarakat Indonesia untuk beribadah pun berbeda-beda, mereka mempunyai kebiasaan dan aturan sendiri-sendiri sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia yang menghargai apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, jika sebagai mahasiswa tidak dapat merefleksikan sila pertama ini bisa jadi kehidupan kampus akan sangat kacau dan tidak ada nilai toleransi antar umat beragama yang dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pembangunan. merupakan implementasi dari sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa.

b. Sila ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kampus terutama kampus yang memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama dari seluruh penjuru Indonesia. Dari keberagaman tersebut dibutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Rasa menghormati antar mahasiswa dapat menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan kampus dan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. pengimplementasian sila ke dua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi pekerti, serta nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan pada umumnya. Hubungan tersebut baik pada tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan disekitar kita. Selain itu pada sila ini terdapat cita-cita untuk memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusian yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa (Lestari, dkk., 2020).

c. Dapat diimplementasikan di kampus melalui organisasi-organisasi. Implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air dan mengadakan kegiatan-kegiatan

positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh organisasi kemahasiswaan, Para mahasiswa membentuk suatu organisasi atau perkumpulan mahasiswa dari berbagai macam latar belakang dan juga beragam. Hal tersebut menunjukkan salah satu bukti adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan diantara para mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan dan pemuda Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Yakni pengimplementasian dari sila ke tiga yakni persatuan Indonesia.

d. Musyawarah merupakan proses yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan secara mufakat dan dapat diterima oleh seluruh pihak, sehingga keputusan tersebut memberi manfaat bagi kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan kampus, praktik politik sangat penting karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan di lingkungan akademik. Salah satu contoh nyata dari aktivitas politik kampus adalah pelaksanaan forum musyawarah atau diskusi publik—sering disebut hearing—yang membahas isu-isu aktual. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen, guna menghasilkan keputusan yang tepat dan mendukung kelancaran pembangunan kampus, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Praktik ini merupakan perwujudan sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

e. Makna keadilan, yaitu memberikan hak sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Sebagai warga negara, kita dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan demi terciptanya keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kesenjangan dalam proses pembangunan. Dalam konteks kehidupan kampus, nilai keadilan sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi atau ketimpangan antara satu bidang ilmu dengan bidang lainnya. Dengan penerapan prinsip ini, akan terwujud suasana harmonis dalam proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan. Nilai

tersebut merupakan bentuk nyata dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Aktualisasi Pancasila dan Budaya Kampus

Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya, hakikatnya. Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga Negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar *lips service* untuk mencapai keinginan pribadi dengan mengajak orang lain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sementara perilaku sendiri jauh lebih dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Aktualisasi pancasila adalah bagaimana nilai-nilai pancasila benar-benar dapat tercemin dalam sikap dan perilaku seluruh warga Negara mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Nilai-nilai pancasila yang bersumber pada hakikat pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia (A. Sulaiman, 2015:76). Oleh sebab itu, merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sesungguhnya dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

1. Aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hokum terutama

dalam penjabaran kedalam Undang-undang, garis-garis besar haluan Negara, Hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi nilai-nilai pancasila secara objektif terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Aktualisasi subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga Negara biasa, aparat penyelenggara Negara, penguasa Negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, maka dia perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam pancasila. Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku. Perpaduan ciri tersebut didalam kehidupan kampus melahirkan gaya hidup tersendiri yang merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan kampus sebagai pedoman dan harapan masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai pancasila secara subjektif dapat tercapai bila nilai-nilai pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia (A. Sulaiman, 2015:77).

Secara etimologi budaya berarti pikiran, akal budi (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:169). Kemudian ada juga pakar yang menguraikan budaya berasal dari kata “budh” (dalam bahasa sansekerta) yang artinya “akal”. Selanjutnya kata budh tersebut menjadi budhi dan mempunyai jamak budhaya. Kemudian ada juga yang mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi diartikan sebagai kekuatan rohani sedangkan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:170).

Budaya kampus dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, diamalkan oleh warga masyarakat akademik dilembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Penulisan. Budaya kampus sebenarnya adalah budaya universal. Artinya, dimiliki oleh seitap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Membangun budaya akademik bukan perkara yang mudah, diperlukan upaya sosialisasi terhadap kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di akademisi untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya kampus adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki mahasiswa dilingkungan kampus yang mencakup hal akademik dan non akademik, seperti diwariskan dari generasi ke generasi. Umumnya budaya atau kebiasaan sama dengan kampus lainnya, tapi ada beberapa kebiasaan yang berbeda sesuai dengan visi dan misi kampus itu sendiri. Budaya kampus terjadi apabila digerakkan oleh pihak yang saling terkait, memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan kampus untuk mencapai tujuan (Siska Febrianti, 2018). Tujuan dari adanya implementasi pancasila dalam budaya kampus yaitu:

a. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan.
c. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nila-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem

pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945.

e. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Arini Nuranisa, 2022).

Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila karena dapat menjadi fondasi dan juga banteng dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral terutama generasi milenial saat ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghindari perilaku dan sikap yang menyimpang. Berikut pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila (Marshandha Della Ardhani, dkk., 2022):

a. Menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b. Menumbuhkan rasa hormat kepda orang yang lebih tua,
c. Mengembangkan rasa adil terhadap sesama,
d. Menumbuhkan sikap toleransi,
e. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan gotong royong,
f. Membiasakan diri untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat,
g. Meningkatkan rasa persaudaraan.

Dengan adanya aktualisasi Pancasila dalam budaya kampus tentunya tidak akan ada lagi segala tindakan penyimpangan norma-norma dalam lingkungan dikampus. Seluruh lapisan masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila menumbuhkan serta mewujudkan susana lingkungan kampus yang lebih kondusif, dan selalu merasa aman dalam lingkungan kampusnya.

Dalam lingkungan kampus sendiri aktualisasi Pancasila dalam budaya kampus sudah ada dan terlaksana bahkan menjadi wajib, seperti adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila/ Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah ini wajib diikuti oleh seluruh

mahasiswa, ada juga kegiatan upaca peringatan kesaktian/ kelahiran Pancasila. Selain itu juga ada kegiatan lain yang mencerminkan adanya nilai pancasila dalam budaya kampus seperti yang telah dipaparkan diatas.

Nilai Kontekstual Pancasila dalam Budaya Kampus

Dalam pemaparan diatas terdapat beberapa nilai kontekstual pancasila dalam budaya kampus. Adapun nilai-nilai kontekstual sebagai berikut (D. Dwiyanto, dkk., 2012:73):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   Sila Ketuhanan merupakan sila pertama dalam pancasila memiliki konteks dalam budaya kampus sebagai penyedia ruang untuk berbagai bentuk keagamaan dan spiritualitas, dan menghormati keberagaman keyakinan di antara mahasiswa maupun dosen dilingkungan kampus.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
   Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki konstektual dalam budaya kampus untuk dapat menerapkan kebijakan akademis yang adil, mempromosikan etika dalam penelitian dan pembelajaran, serta memupuk budaya kritis dan reflektif diantara mahasiswa.
3. Persatuan Indonesia
   Persatuan Indonesia memiliki nilai kontekstual dalam budaya kampus sebagai pendorong kerjasama lintas disiplin dan kegiatan bersama untuk melancarkan kegiatan mahasiswa maupun kegiatan kampus.
4. Kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan memiliki nilai kontekstual dalam budaya kampus seperti partisipasi mahasiswa dalam pengambilan sebuah keputusan penyelesaian masalah, mendorong diskusi terbuka, dan pemilihan perwakilan mahasisawa baik dalam ketua BEM maupun ketua HMJ.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai kontekstual dalam budaya kampus seperti mewujudkan keadilan sosial melalui program beasiswa kampus maupun pemerintah, memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa yang kurang mampu, memberikan bantual sosial, dan mengimplementasikan kebijakan inklusif.

Adapun pengaruh budaya kampus pada nilai kontekstual Pancasila sebagi berikut:

1. Dinamika kultural dan pluralisme
   Pengaruh pada nilai pancasila: Budaya kampus yang memahami dan menghormati/ toleransi dalam perbedaan dapat menciptakan konteks yang mendukung nilai persatuan dan kesetaraan.
2. Partisipasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan
   Pengaruh pada nilai pancasila: Budaya kampus yang mendorong partisipasi mahasiswa dapat menciptakan konteks dimana nilai demokrasi dalam pancasila dapat terwujudkan.
3. Respons terhadap tantangan sosial
   Pengaruh pada nilai pancasila: Budaya kampus yang responsif terhadap ketidaksetaraan dan ketidak adilan menciptakan konteks dimana nilai keadilan sosial dalam nilai pancasila dapat terwujud.
4. Kegiatan pengambian masyarakat
   Pengaruh pada nilai pancasila: Budaya kampus yang mendorong pengabdian kepada masyarakat dapat menciptakan konteks dimana nilai gotong royong dalam pancasila dapat terlaksakan (D. Dwiyanto, dkk., 2012:74).

Dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam budaya kampus, perguruan tinggi dapat menjadi wadah dalam upaya pembentukan karakter, peningkatan intelektual, dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar.

Penutup

Sebagai mahasiswa yang terlibat dalam kehidupan kampus, marilah kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita. Pancasila mengandung lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mari kita terapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus kita. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam budaya kampus, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan. Mari kita bersama-sama menjadikan Pancasila sebagai panduan dan landasan untuk mengembangkan diri, berinteraksi dengan sesama, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Penerapan nilai Pancasila didalam kampus akan berpengaruh besar terhadap mahasiswa maupun seluruh masyarakat di dalam lingkungan kampus.

Tujuan penyelenggaran pendidikan Pancasila untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila, agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, membentuk sikap mental yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila.

Dengan adanya aktualisai Pancasila dalam budaya kampus tentunya tidak akan ada lagi segala tindakan penyimpangan norma-norma dalam kehidupan dikampus.

BAB IX

KARAKTER PELAJAR PANCASILA DALAM SEKOLAH MERDEKA

Sistem pendidikan di Indonesia sudah melewati perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Perkembangan tersebut tercermin pada perubahan kurikulum yang telah diterapkan mulai dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini dengan adopsi kurikulum merdeka. Kurikulum yang diterapkan disesuaikan dengan keadaan kehidupan dan kemajuan yang terjadi. Karena gaya hidup manusia, moral, seni dan agama akan sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dua hal tersebut berada di posisi tengah (Farah Dina I, 2019:46).

Selain mewujudkan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa juga menambah muatan nilai-nilai karakter yang disebut dengan profil Pelajar Pancasila, kurikulum merdeka juga mewujudkan konsep sekolah merdeka yaitu dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bertanya, mencoba, berpendapat dan berkarya (Fian Nurfajria, 2023).

Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, arus globalisasi muncul sebagai tantangan baru. Peserta didik cenderung terpukau oleh gadget dan teralihkan dari proses belajar, mengakibatkan hilangnya minat mereka terhadap ilmu pengetahuan dan terjadi penurunan karakter untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan kemampuan berpikir yang kritis dan keberanian dari peserta didik agar mereka tidak melupakan kebudayaan Indonesia yang beragam, dan memudarkan rasa cinta tanah air.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik, agar mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berbudaya dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa diwujudkan dalam sekolah merdeka.

Dalam konteks ini siswa diharapkan mampu mengintegrasikan karakter pelajar pancasila dan memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai pancasila sebagai landasan moral dan beretika dalam kehidupan sehari hari melalui penanaman karakter pelajar pancasila dalam sekolah merdeka.

Dari pembahasan diatas, penulis membagi ruang lingkup pembahasan mengenai pengertian pendidikan karakter Pancasila, pengertian kurikulum merdeka dan karakter yang harus dimiliki pelajar Pancasila dalam sekolah merdeka.

Pendidikan Karakter Pancasila

Pendidikan karakter berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan berasal dari bahasa yunani paedagogie yang akar katanya pais yang berarti anak dan again yang artinya bimbingan dalam (Ulfa Fahmanisa 2013:3). Menurut KBBI pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. Jadi pendidikan bisa diartikan sebagai proses pengembangan diri seseorang melalui pengajaran dan pelatihan yang menjadikan sesorang lebih dewasa dari segi pemikiran dan cara bersikap.

Sedangkan kata karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein* yang berarti memahat. Dalam kamus Poerwadaminta karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan seseorang dangan orang lain. Menurut KBBI karakter adalah watak, tabiat, pembawaan, kebiasaan. Maka karakter merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan tabiat, sifat dan kepribadian yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi karakter adalah sifat batin yang

memengaruhi segenap pikiran, perilaku, Budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya Adapun pengertian pendidikan karakter dan pancasila menurut para tokoh-tokoh yaitu sebagai berikut.

1. Pengertian pendidikan karakter menurut Fakri Gafar adalah suatu proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh-kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku orang tersebut.
2. Menurut Scerenko, pendidikan karakter bisa diartikan usaha sungguh-sungguh dengan ciri kepribadian positif yang dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan dan kajian.
3. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
4. Menurut Muhamad Yamin, Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila (2019) karya Ujang Permana, menurut Muhamad Yamin Pancasila berawal dari kata panca yang artinya lima dan sila berati sendi, asas, dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
5. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang turun temurun selama berabad-abad yang terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu filsafat bangsa Indonesia.
6. Menurut Ruslan Abdul Ghani Pengertian Pancasila menurutnya adalah filsafat negara yang diciptakan untuk menjadi ideologi kolektif, yang nantinya harus digunakan sebaik mungkin untuk menyejahterakan rakyat serta bangsa Indonesia.

Maka pendidikan karakter Pancasila adalah pengajaran dan proses perubahan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan pancasila untuk ditanamkan dan dikembangkan dalam diri seseorang sehingga menjadi perilaku dalam kehidupan orang tersebut. Pendidikan karakter Pancasila sangat penting bagi peserta didik untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Pendidikan karkater Pancasila diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pembinaan budi pekerti dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila juga bertujuan untuk mencegah munculnya paham radikalisme yang membahayakan negara. Dengan memiliki karakter Pancasila peserta didik akan menjadi seseorang yang patriotik dan pancasilais sehingga bisa menyaring pengaruh buruk dari globalisasi yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Hal tersebut bisa dilakukan di sekolah, tempat peserta didik menghabiskan sebagian harinya. Pendidikan karakter Pancasila tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, pendidikan karakter Pancasila juga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat.

Kurikulum Merdeka dan Karakter Pelajar Pancasila dalam Sekolah Merdeka

Pengertian kurikulum merdeka adalah strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa, media dan sumber belajar yang bervariasi dan digital, muatan kurikulum yang lebih sederhana dan penilaian yang menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Materi lebih sederhana dan mendalam karena hanya membahas materi yang esensial atau penting, dan megutamakan pemahaman siswa dan lebih mengurangi beban siswa (Pengelola Web Direktorat SMP, 2023).
2. Siswa bisa memahami pelajaran lebih mendalam karena guru dituntut untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kolaboratif dan menyenangkan namun siswa tidak perlu tergesa-gesa karena memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan memahami apa yang dipikirkannya.

3. Lebih merdeka, maksudnya siswa diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang diminatinya sesuai bakat dan kemampuannya. Dan guru bisa mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan. Seperti penerapan pendidikan karakter Pancasila pada pelajar, untuk mewujudkan pelajar yang cinta tanah air dan berkepribadian baik.
4. Lebih relevan dan interaktif (Rizki Agustina, dkk., 2023:75-76), karena pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan projek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila (Linda E, 2023).

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam, agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sebelumnya ada lima nilai karakter pada kurikulum 2013 yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Dalam kurikulum merdeka ini, berubah menjadi enam nilai karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan enam ciri yaitu:

a. Beriman
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
c. Berkebhinekaan global
d. Bernalar kritis
e. Bergotong royong
f. Mandiri
g. Kreatif

Profil Pelajar Pancasila itu setara dengan 20-30 persen Jam Pembelajaran yang berupa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dengan tujuh tema selama SMA dan wajib diselesaikan hingga tuntas.

Tujuh tema P-5 yang wajib diselesaikan selama SMA adalah kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, bhineka tunggal ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, wirausaha, serta berekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Siswa diwajibkan melaksanakan projek secara berkelompok di bawah bimbingan guru, dan produk projek dapat berupa produk yang dipamerkan, dipentaskan, dipresentasikan, dijual sesuai dengan tema yang dikerjakan.

Muara P-5 menegakkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan secara umum cenderung masih memprioritaskan aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan, termasuk nilai karakter. Padahal pendidikan di sekolah harus menerapkan konsep pendidikan karakter dalam kepribadian siswa. Pendidikan yang tidak dapat membentuk siswa yang memiliki kecerdasan rasa dan budi pekerti akan membentuk anak menjadi tidak dewasa dan tidak tanggung jawab. Bila siswa hidup di masyarakat yang majemuk, akan kurang menyesuaikan dengan kondisi kemajemukan masyarakat dan kurang menghargai perbedaan. (Anisa Muthiatul H, 2023)

Dalam konteks ini, profil pelajar Pancasila merupakan hasil dari pembentukan karakter dan kemampuan yang terjadi dalam keseharian anak dan diterapkan melalui berbagai aspek seperti budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Budaya Sekolah. Budaya sekolah menjadi penunjang utama dalam menciptakan atmosfer yang mendukung eksplorasi dan pengembangan diri siswa, budaya sekolah mencakup iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Karena pendidikan merdeka menuntut adanya kebebasan dalam belajar namun siswa tetap dapat mengembangkan karakter positif dalam dirinya.

2. Intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler diimplementasikan melalui muatan pelajaran dan kegiatan belajar yang diarahkan untuk mengembangkan budi pekerti dan potensi anak. Salah satunya dengan pembuatan projek pendidikan dan siswa dilibatkan akan projek tersebut akan sangat membantu terbentuknya karakter siswa.
3. Kokurikuler. Kokurikuler melibatkan kegiatan tambahan di sekolah yang bertujuan untuk menguatkan, memperdalam, atau mengayakan mata pelajaran yang telah dipelajari. Ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan karakter, seperti kegiatan seni, olahraga, dan lainnya.
4. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat mengeksplorasi potensi mereka lebih lanjut dan mengembangkan keterampilan di luar konteks pembelajaran klasikal.

Pendidikan merdeka dalam konteks ini menekankan pada penghargaan pengembangan potensi unik masing-masing siswa, dan mempersiapkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengajarkan materi akademis tetapi juga membentuk karakter Pancasila yang kuat dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Prawidya Lestari, dkk., 2016:82-84).

Sebelum profil pelajar Pancasila ini diterapkan di sekolah perlu adanya pemahaman tentang merdeka belajar yang sekarang ini mulai diperdengarkan dan mulai diterapkan di berbagai sekolah rujukan dalam menciptakan pembeajaran paradigma baru di sekolah. Merdeka belajar dapat dikatakan sebagai langkah awal sebelum profil pelajar Pancasila diterapkan. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan anak dalam belajar yaitu melalui pembebasan terhadap hal-hal yang disukainya atau diminatinya bahkan bakatnya. Konsep merdeka belajar yang

diterapkan dalam kurikulum paradigma baru terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara: *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*.

Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini cukup jelas bahwa pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pembentukan nilai karakter peserta didiknya. Pendidik menjadi teladan apabila berada di depan, menjadi motivator atau penyemangat jika di tengah, pendidik menjadi pendorong dari belakang peserta didik jika di belakang, dengan berbagai dukungan agar peserta didik dapat mandiri (Fajar Rahayuningsih, 2021:182). Hal ini sejalan dengan pancasila yang diterapkan di sekolah, sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *Ya manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal antara sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau ras. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, terutama Sila ke-3 "Persatuan Indonesia", yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks pendidikan, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan antar individu dan membangun sikap toleransi serta kepedulian terhadap sesama, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Jadi inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga

memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan.

Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan (Kurikulum Merdeka, 2023).

Berikut adalah karakter yang harus dimiliki pelajar Pancasila dalam sekolah merdeka menurut Kemendikbud (Elmy Tasya Khairally, 2023):

1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia

Pelajar yang memiliki karakter ini mengetahui ajaran agama serta keyakinannya dan menggunakan pengetahuannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pelajar Pancasila harus memiliki kecintaan terhadap agama, manusia, dan alam. Karakter ini sesuai dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut menjelaskan bahwa semua warga Negara Indonesia harus memiliki keyakinan. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap dengan keyakinan bahwa tuhan itu Esa. Berikut adalah contoh kegiataan yang mencerminkan karakter tersebut:

a. Berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum memulai pelajaran dikelas,
b. Melakukan sholat dengan sungguh-sungguh saat waktunya melaksanakan sholat,
c. Tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah
d. Meyakini bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya
e. Menanamkan jiwa toleransi dalam umat beragama

f. Tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang dalam pertemanan
g. Mengamalkan perintah agama sendiri
h. Berlaku adil kepada teman yang berbeda agama

2. Berkebhinekaan Global

Karakter berkebhinekaan global adalah sikap menghargai keberagaman dan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Berkebhinekaan global tidak hanya terbatas pada Indonesia tetapi luar negeri juga. Sebagai pelajar Pancasila siswa harus menyadari akan indahnya perbedaan yang ada didunia ini, juga harus menghargai perbedaan antar negara. Pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berkebhinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya, memiliki lokalitas dan dan identitas tetapi juga tetap terbuka dalam berinteraksi dengan kebudayaan lain tanpa menjatuhkannya.

Karakter ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Karena implementasi dari sila kedua menerapkan rasa toleransi mengahragai dan menghormati atas perbedaan dalam masyarakat. Yang sesuai dengan arti bhinneka yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu karena sama-sama warga negara Indonesia. Dengan bertoleransi akan perbedaan budaya dan menjaga keluhuran budaya seorang pelajar akan menjadi manusia yang beradab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini berarti pelajar harus bisa menerima perbedaan tanpa merasa menghakimi dan dihakimi juga tidak merasa bahwa dia atau kelompoknya lebih baik daripada orang lain. Contoh perilaku yang mencerminkan karakter berkebhinekaan global adalah sebagai berikut:

a. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras dan agamanya,
b. Dapat bekerjasama dengan semua teman tanpa pilih-pilih baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dunia kerja,
c. Tidak mengikuti konflik negara lain dan berkomentar buruk di sosial media mengenai negara yang sedang berkonflik,

d. Mengikuti pertukaran pelajar dengan maksud mempromosikan penghargaan atas perbedaan,
e. Menghargai minoritas maupun orang asing yang sedang berkunjung di negara kita.

3. Bergotong Royong

Karakter yang harus dimiliki pelajar Pancasila selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, yang artinya gotong royong sudah mendarah daging dan turun temurun dari para leluhur bangsa Indonesia. Dengan gotong royong para pelajar akan saling membantu satu sama lain dan akan ikut bersimpati dengan kondisi orang lain. Hal tersebut akan mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka gotong royong sesuai dengan sila ketiga Pancasila.

Pelajar harus memiliki kemampuan bekerja sama, yaitu kompetensi dalam mengerjakan kegiatan dengan tulus dan ikhlas sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan lancar, mudah dan tidak berat. Pelajar Pancasila harus tahu bagaimana cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu mebutuhkan orang lain. Contoh penerapan gotong royong di sekolah merdeka:

a. Melaksanakan acara kerja bakti dengan sungguh-sungguh, supaya sekolah menjadi bersih dan nyaman ditempati,
b. Memberi kontribusi yang besar pada kelompok saat ada tugas kelompok jangan hanya menumpang nama,
c. Saling bergotong royong menghias kelas saat ada lomba keindahan kelas,
d. Menjadwal kelompok piket dan melaksanakannya sesuai jadwal.
e. Melakukan musyawarah dengan teman sekelas untuk menentukan solusi dari sebuah masalah,
f. Tidak membebankan pekerjaan kepada diri sediri dan merasa bahwa hanya dia yang mampu menyelesaikan tugas kelompok dibanding anggota kelompok lain,
g. Bersama sama menjaga fasilitas sekolah/kelas.

4. Mandiri

Kurikulum merdeka menerapkan sistem pembelajaran yang mandiri, siswa diberi pertanggung jawaban untuk proses dan hasil belajar mereka. Jika mereka menginginkan hasil yang baik maka mereka harus berusaha dengan baik. Unsur utama dari mandiri adalah memahami diri dan kondisi yang sedang dialami dan dapat mengontrol diri dengan baik. Mereka juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan tanpa mengandalkan bantuan orang lain.

Karakter mandiri sesuai dengan Pancasila kedua yang berbunyi kemausiaan yang adil dan beradab. Karena mandiri berhubungan dengan sikap dari seorang manusia. Dengan menjadi mandiri pelajar tidak akan merepotkan orang tua, guru ataupun teman mereka, walaupun manusia adalah mahluk sosial, tetapi tetap dibutuhkan kemandirian untuk mewujudkan manusia yang beradab, yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Berikut adalah contoh perilaku mandiri yang harus diterapkan pelajar Pancasila dalam sekolah merdeka:

a. Rajin belajar untuk mendapat nilai ujian yang baik tanpa mengandalkan contekan dari teman
b. Aktif bertanya dan berpendapat saat dikelas
c. Mencetak banyak prestasi baik akademik maupun non akademik sesuai passion dan bakat yang dimiliki
d. Memiliki kesadaran belajar sendiri tanpa harus disuruh
e. Dapat bertanggung jawab atas kesalahan maupun keputusan yang telah di perbuat
f. Mempunyai cita-cita yang luhur untuk mengubah keadaan dirinya
g. Tidak menggantungkan dirinya kepada teman saat mendapat tugas kelompok

5. Bernalar Kritis

Pelajar dengan penalaran kritis dapat mengolah informasi secara objektif, kualitatif dan kuantitatif, dapat menganilisis berbagai informasi, mengevaluasi dan menarik kesimpulan serta bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan bernalar kritis pelajar akan

bisa memberi argumen yang baik dan bisa membuat keputusan dengan cara yang benar seperti musyawarah, mereka akan menyelesaikan masalah dengan sungguh-sungguh dan mengambil jalan tengah. Jika menjadi pemimpin mereka juga akan menjadi pemimpin yang bijak, dan menjadi pemimpin yang adil yang dapat mengambil keputusan dengan memikirkan anggotanya.

Maka bernalar krirtis sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarata Perwakilan. Juga sesuai dengan sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena untuk mewujudkan keadilan di Indonesia dibutuhkan pemimpin yang bernalar kritis, dan calon-calon pemimpin itu terbentuk dari pelajar yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Contoh perilaku bernalar kritis adalah sebagai berikut:

a. Senang bertanya, dengan pertanyaan yang kritis dan memiliki manfaat
b. Suka berdiskusi dan memberi pendapat yang rasional dan mudah dipahami oleh teman yang lain
c. Tidak menerima informasi mentah-mentah, melainkan menganilisis informasi yang benar melalui fakta-fakta yang ada
d. Memberi argumentasi yang memiliki dasar yang benar
e. Memahami dengan benar apa yang ingin di capai saat menjadi siswa
f. Dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyampaikan pendapat
g. Fokus dan memprioritaskan satu tujuan dibandingkan mempunyai banyak tujuan namun tidak ada satupun yang mulai di kerjakan

6. Kreatif

Pelajar yang memiliki karakter kreatif bisa membuat dan memodifikasi hal-hal yang orisinal, bermakna, berguna dan berpengaruh. Pelajar Pancasila harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah serta mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu secara pro aktif dan mandiri, seperti

menghasilkan sebuah karya dan untuk mendapat metode inovatif yang berbeda setiap hari (Anif Istianah, 2021:205).

Karakter pelajar Pancasila kreatif sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan memiliki kreativitas pelajar bisa menghasilkan karya yang berbeda dari orang lain dan tidak menduplikasi karya orang lain. Maka mereka akan menjadi manusia yang beradap karena tidak mengambil karya orang lain dan bisa menciptakan karya mereka sendiri yang bisa diakui. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan karakter kreatif pelajar Pancasila:

a. Mengolah barang bekas menjadi menjadi keajinan tangan,
b. Bisa memikirkan ide yang inovatif untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat,
c. Menghias kelas dengan pernak pernik yang indah,
d. Memberikan ide yang berbeda dengan teman-teman yang lain,
e. Membuat karya yang orisinal yang berasal dari ide dan pikiran mereka sendiri,
f. Tidak mencontek saat ujian,
g. Terlibat dalam organisasi sosial di sekolah maupun luar sekolah,
h. Mengikuti ekstrakurikuler,
i. Aktif dalam kegiatan literasi.

Nilai Kontekstual

Dapat digarisbawahi bahwa pendidikan karakter Pancasila penting dalam konteks sekolah merdeka. Melalui kurikulum merdeka, siswa diberdayakan dengan enam nilai karakter, termasuk keimanan, akhlak mulia, kebhinekaan, gotong royong, mandiri, dan berpikir kritis-kreatif. Sekolah merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalannya pembelajaran, mengembangkan kemandirian, sambil tetap mengakar pada nilai-nilai Pancasila. Proses merdeka belajar diharapkan tidak hanya membentuk siswa yang cerdas akademis, tetapi juga berakhlak dan berkomitmen pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam karakter pelajar Sekolah Merdeka menciptakan landasan yang kuat bagi pembentukan generasi yang beriman, berkebhinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai kontekstual dapat ditemukan dalam integrasi nilai Pancasila dengan aktivitas sehari-hari pelajar, seperti Beriman dan Bertaqwa; Kontekstual; Berdoa sebelum pelajaran dan menjaga toleransi antar agama meresapi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Berkebhinekaan Global: Nilai Kontekstual: Menjaga kerjasama tanpa memandang perbedaan, serta mengikuti pertukaran pelajar sebagai wujud nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
b. Bergotong Royong: Nilai Kontekstual: Melaksanakan kerja bakti, bekerja sama dalam tugas kelompok, dan saling bergotong royong mencerminkan nilai Persatuan Indonesia.
c. Mandiri: Nilai Kontekstual: Memahami tanggung jawab pribadi dalam pembelajaran, belajar tanpa mengandalkan bantuan, dan memiliki cita-cita luhur sesuai dengan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
d. Bernalar Kritis: Nilai Kontekstual: Bertanya kritis, berdiskusi dengan argumentasi, dan tidak menerima informasi mentah-mantah mencerminkan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.
e. Kreatif: Nilai Kontekstual: Menghasilkan karya orisinal, mengembangkan ide inovatif, dan aktif dalam kegiatan literasi sebagai ekspresi dari nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dengan nilai-nilai ini terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari, pelajar Sekolah Merdeka menjadi lebih dari sekadar penerima informasi, melainkan pembentuk karakter yang kokoh, berkontribusi positif, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Penutup

Pendidikan karakter Pancasila untuk pelajar dalam sekolah merdeka sangat penting, karena dengan adanya pendidikan tersebut pelajar akan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan karakter Pancasila, pelajar akan menjadi generasi penerus bangsa yang berbudaya dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut bisa diwujudkan melalui pembelajaran di sekolah dengan penerapan kurikulum merdeka yang memiliki enam nilai karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menganut prinsip kebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

Dengan memiliki karakter-karakter tersebut, pelajar akan mampu menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara secara positif, memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, dan membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan bangsa ke depan.

Dalam sekolah merdeka belajar, dukungan seperti budaya sekolah, ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun kokurikuler menjadi wadah bagi siswa untuk menanamkan karakter pelajar Pancasila secara lebih efektif. Kebebasan yang diberikan kepada siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran tidak hanya menciptakan kemandirian, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Siswa diajak untuk menjalani pendidikan dengan penuh tanggung jawab, bergotong royong, dan menghargai keberagaman global. Melalui proses merdeka belajar, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan semangat gotong royong.

Dengan demikian, merdeka belajar bukan hanya sekadar memberikan kebebasan kepada siswa, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan karakter pelajar Pancasila. Siswa yang melalui proses ini diharapkan mampu menjadi generasi penerus

bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

GERAKAN PEMUDA ANSOR
NAHDLATUL ULAMA

BAB X

PANCASILA DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hakikatnya Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu dasar tanggung jawab mahasiswa dan kewajiban bagi setiap mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Kewajiban seorang mahasiswa bukan hanya sekedar menuntut ilmu, namun ada kewajiban lain yang harus dipikul oleh mahasiswa yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi merupakan bagian dari pendidikan Nasional. Keberadaan perguruan tinggi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, salah satunya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi karena hal itu merupakan cita- cita pendirian perguruan tinggi yang harus menghasilkan lulusan yang berguna bagi masyarakat Indonesia pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi seluruh mahasiswa sebagai kaum terpelajar, karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa Indonesia menuju era yang lebih baik. Sebagai mahasiswa perlu mengetahui dan menyadari bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu pedoman untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka menjawab tantangan bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

Pendidikan di Indonesia jauh tertinggal oleh negara lain yang disebabkan antara lain kinerja dan kemampuan serta kompetensi sumber daya manusia akademisi, seperti: pimpinan, staf, dosen dan karyawan masih banyak yang belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang diemban. Peran para dosen di Perguruan Tinggi sangat penting bagi kemajuan institusinya. Oleh karena itu pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai unsur dominan dalam proses pembelajaran diarahkan untuk dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme (Yuliawati, dkk., 2012:29).

Pada saat ini kesadaran mahasiswa akan penerapan Tri Dharma di perguruan tinggi masih sangat rendah. Banyak sekali mahasiswa yang tidak peduli terhadap peranan mereka yang begitu berpengaruh dalam mengubah suatu negara. Sementara itu Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan dasar dan landasan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Banyaknya masalah yang ada di Indonesia mulai dari kemiskinan hingga kasus korupsi semakin memprihatinkan dan negara sangat membutuhkan mahasiswa sebagai penggerak yang bisa mengubah Indonesia dapat menjadi lebih baik (Kavabi Zuhri, dkk, 2023).

Hanya sedikit mahasiswa yang mengerti mengenai tanggung jawab mereka yang sesungguhnya sebagai mahasiswa. Masih banyak mahasiswa yang belum berpartisipasi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tingi Negeri. Padahal, Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dasar bagi mahasiswa atau pijakan pertama untuk membentuk kepribadian, menmperbanyak relasi dan pengalaman, serta mampu berinteraksi dengan baik kepada masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan negeri atau swasta berupaya semaksimal mungkin agar Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan dengan baik. Namun dalam praktiknya masih banyak perguruan tinggi yang belum berhasil dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Tri Dharma perguruan tinggi masih belum berjalan dengan semestinya.

Proses pembelajaran harus diawali oleh visi dan misi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Menurut Arifin Anwar, salah satu fungsi pendidikan secara umum yang amat penting dan strategis ialah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkatan sosial yang berbeda. Secara umum pendidikan pada level individu, membantu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang berakhlak mulia, berwatak, cerdas, kreatif, sehat, estetis serta mampu melakukan sosialisasi dan transformasi dari manusia pemain menjadi manusia pekerja dan dari manusia pekerja menjadi manusia pemikir (Arifin Anwar, 2009:92).

Tri Dharma Perguruan Tinggi memuat 3 pokok tanggung jawab yang harus diemban mahasiswa yaitu, Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tentunya partisipasi mahasiswa dalam impelementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat diperlukan. Karena mahasiswa diharapkan untuk menjadi mahasiswa yang lebih termotivasi dan sadar bahwa betapa pentingnya peranan mahasiswa untuk mencapai tujuan nasional bangsa indonesia.

Mahasiswa merupakan peserta didik yang melaksanakan proses belajar dibangku perkuliahan/ universitas, selain itu mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Karena sebagai warga bangsa Indonesia yang menuntut ilmu diperguruan tinggi, sudah seharusnya mampu memberikan kontribusi riil kepada keluarga, masyarakat dan bangsa dalam bentuk perubahan-perubahan yang konstruktif dalam segi hal apapun.

Mahasiswa mempunyai 3 identitas yaitu: *agent of change* (agen perubahan) adalah identitas yang sering dilantunkan oleh mahasiswa pada umumnya. Tujuan dari lantunan itu untuk membangkitkan gairah semangat juang seorang mahasiswa. Dalam arti lebih mendalam, pada semboyan ini adalah mahasiswa sebagian dari banyak aktor perubahan di bangsa Indonesia ini. Dengan bekal

keintelektualan yang tinggi, idealis yang tinggi dan rasa nasionalis yang berkobar. Mahasiswa dipercaya mampu membawa perubahan konstruktif terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Kemudian menjadi *agent of control* (agen kontrol) adalah mahasiswa sebagai *controlling*, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena dalam piramida negara mahasiswa berada ditengah-tengah. Di mana arti dari posisi tersebut yaitu sebagai penyambung lidah rakyat atau penyampaian keluh kesah rakyat pada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu *Iron stock*, mahasiswa dapat menjadi *Iron Stock,* yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan.

Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang dalam proses mewujudkannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Antara poin yang satu dengan poin yang lainnya akan saling mempengaruhi, tidak mungkin penelitian itu dilakukan tanpa adanya pengetahuan yang bisa diperoleh melalui proses pendidikan, dan tidak mungkin seorang mahasiswa akan mengabdi kepada masyarakat jika ia tidak mempunyai suatu penemuan yang bisa dimanfaatkan dalam masyarakat.

Mungkin juga ada beberapa perguruan tinggi yang mampu mewujudkan tiga poin yang terdapat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun dengan demikian sangat jarang ketiga dharma perguruan tinggi itu terwujud sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Padahal pancasila adalah dasar negara yang harus diterapkan dalam segala hal dalam kehidupan. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang sulitnya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut Pancasila (Novita Hapsari, 2023).

Ruang lingkup dari pembahasan di atas disebutkan poin-poin pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penulisan ini hanya sebatas membahas pengertian pancasila dan implementasi pancasila dalam perguruan tinggi. Serta makna dan isi Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang tidak sesuai dengan pancasila, serta hubungan antara pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam ruang lingkup pembahasan pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini mencakup:

a. Pengertian pancasila, sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia. Namun pancasila terdiri dari dua suku kata sansekerta.
b. Nilai-nilai pancasila, dalam silanya seperti nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.
c. Implementasi pancasila dalam dunia perguruan tinggi, di mana semua kegiatan yang dilakukan khususnya mahasiswa harus sesuai dengan semua sila-sila pancasila.

Selain itu mencakup juga analisis Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari:

a. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang merupakan salah satu visi dan misi yang menjadi tujuan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.
b. Pendidikan dan Pengajaran, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan IPTEK, dan seni.
c. Penelitian dan Pengembangan, sebagai upaya dalam memperoleh atau menghasilkan suatu produk tertentu dengan sebaik-baiknya.
d. Pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini juga melibatkan mahasiswa, mahasiswa menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan ini juga dalam rangka melakukan pengabdian ke masyarakat, sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa.

Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut adalah pendidikan dan kewajiban, penelitian dan pengembangan, dan

pengabdian kepada masyarakat sehingga pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan.

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu visi dan misi yang menjadi tujuan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia baik itu Perguruan Tinggi negeri maupun swasta. Setiap poin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang, tidak boleh ada pertentangan atau persaingan dan harus dikembangkan secara simultan atau bersama-sama. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diterapkan mempunyai tujuan akhir yaitu menghasilkan mahasiswa yang bisa berguna bagi perkembangan masyarakat Indonesia.

Menurut Ki Hajar Dewantara pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan artinya memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki seseorang agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat (Bowo Hadi Kuswono, 2023).

Menurut Borg dan Gall menyebutkan bahwa penelitian pengembangan adalah mengembangkan suatu produk pendidikan. Sedangkan menurut Sugiyono ia berpendapat bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil produk tertentu, serta menguji keefektifan dari produk tersebut. Menurut Soenarto penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan *prototipe,* desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran (Abady Risky, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian, kepada masyarakat. Dengan kata lain, Tri Dharma dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai perguruan tinggi dan wajib diterapkan dengan baik (Hakim, 2023).

Mengingat karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan ber tanah air di Indonesia, maka pemerintah membuat Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tujuan dari perguruan tinggi di antaranya membentuk manusia yang berjiwa pancasila, menyiapkan tenaga kerja yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi, serta melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya serta kehidupan kemasyarakatan (Eka Herdit Juningsih, 2023).

Perspektif perjuangan bangsa merupakan tujuan dan fungsi perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bukan juga hanya sekedar dari bagian tanggung jawab mahasiswa saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh dosen atau pendidik, termasuk juga orang-orang atau siapapun yang terlibat didalamnya atau disebut juga dengan sivitas akademika memiliki tanggung jawab yang sama pula. Tri Dharma dari Perguruan Tinggi ini bertujuan agar dapat mengaktualisasikan nila-nilai pancasila dalam masyarakat luas, mahasiswa dapat terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan wawasannya selama berada di perguruan tinggi (Fransiska Novita Eleanora, 2019:127).

Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang sudah didapatkan agar berguna bagi masyarakat, merupakan perwujudan dalam mengaktualisasikan sila ke 2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan pengetahuaannya agar dapat berguna bagi nusa dan bangsa adanya terpancar perwujudan sila ke-3 persatuan Indonesia dan tanpa membeda-bedakan tiap orang, untuk memberikan dan mengajarkannya (Zulfikar Putra, 2018:12).

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Namun pancasila terdiri dari dua suku kata sansekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro pancasila adalah dasar falsafah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi

pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut panitia lima pancasila adalah lima asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas erat sekali dan tidak dapat berdiri sendiri (Erwan Gesmi, dkk., 2018:1).

Oleh karena itu pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa sebagai pemersatu dan pertahanan bangsa negara Indonesia.

Pendidikan Pancasila patut diajarkan lagi khususnya kepada masyarakat umum yang hidup di zaman saat ini. Banyak yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek kehidupannya, karena sudah tercampur dengan budaya-budaya barat yang serba instan. Jiwa sosial antar satu dengan yang lain dalam jarak dekat kian menipis, tergantikan dengan adanya teknologi baru dimana mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia maya.

Pancasila yang merupakan jati diri masyarakat Indonesia yang memiliki ciri khas dan kekhasan pribadi bangsa. Kepribadian bangsa dari niai-nilai luhur Pancasila bangsa Indonesia perlu dilestarikan dengan mewariskan karakter Pancasila kepada generasi muda sebagai pedoman hidup. Tempat untuk mewariskan karakter tersebut salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa jenjang salah satunya ialah jenjang sekolah dasar, dimana jenjang sekolah dasar ini merupakan awal untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan semua aspek lainnya sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari setiap sila dalam pendidikan sekolah dasar (Hesti Hopipah Aliyani, dkk., 2022).

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagi berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Moh. Hatta telah menegaskan bahwa sila pertama ini merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan sesuatu yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai mahluk Tuhan, dengan segala hak dan kewajibannya. Negara tidak *predisposition* memaksa dan tidak akan memaksakan agama karena agama merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati dan tidak dapat dipaksakan, tidak ada satu agamapun yang membenarkan untuk memaksakan kepada orang lain untuk menganutnya. Oleh karena itu, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan sila yang berakar pada dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi landasan moral bagi tiga sila setelahnya. Sila ini memegang peranan penting sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya bersumber dari landasan filosofis-

antropologis, yang memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, bersifat individual sekaligus sosial, serta memiliki kedudukan kodrati sebagai pribadi merdeka dan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Hesti Hopipah Aliyani, dkk., 2022).

Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Sila ini adalah sila yang mengandung nilai suatu kesadaran sikap *ethical* dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Terdapat konsekuensi pada kandungan nilai yang ada dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, keturunan maupun status sosial.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia merupakan sila yang berakar pada dan diilhami oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan pada saat yang sama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Sila ini memuat nilai bahwa negara adalah refleksi dari kodrat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Negara terbentuk dari keberagaman unsur, seperti suku, ras, kelompok, dan golongan yang bersatu dalam satu kesatuan hidup bersama.

Perbedaan dalam masyarakat bukanlah penghalang, melainkan realitas kodrati yang menjadi ciri khas unsur pembentuk bangsa. Konsekuensinya, Indonesia sebagai negara majemuk mengikatkan diri dalam satu kesatuan yang tercermin dalam semboyan Bhinneka

Tunggal Ika. Keberagaman tidak boleh menjadi pemicu konflik atau perpecahan, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. Nilai utama yang terkandung dalam sila ini adalah nasionalisme, yakni nasionalisme yang berlandaskan moralitas ketuhanan (*devout nationalism*) dan menjunjung tinggi kemanusiaan (*humanistic nationalism*) sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Surono, 2010:47).

Oleh sebab itu, nilai-nilai nasionalisme harus terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam dinamika era reformasi saat ini. Jika proses reformasi tidak dibangun di atas landasan etika ketuhanan, kemanusiaan, serta komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, maka sangat mungkin akan membawa disintegrasi dan kehancuran nasional. Sejarah telah mencatat bahwa kegagalan menjaga nilai-nilai tersebut menjadi salah satu penyebab runtuhnya beberapa negara seperti Yugoslavia, Sri Lanka, dan lainnya.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat dengan memuat nilai-nilai yang berakar pada dan terinspirasi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai inti yang terkandung dalam sila ini berkaitan dengan hakikat negara sebagai representasi dari kodrat manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Rakyat, sebagai kumpulan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersatu dengan tujuan mulia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai unsur utama pembentuk negara. Oleh karena itu, sila kerakyatan mengandung nilai-nilai demokrasi yang wajib dijalankan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Adapun nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah:

a. Kebebasan individu harus disertai dengan rasa tanggung jawab, baik secara sosial terhadap masyarakat dan bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai harkat serta martabat setiap manusia.
c. Menjamin serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Mengakui keberagaman individu, kelompok, ras, suku, dan agama sebagai bagian dari realitas sosial.
e. Mengarahkan keberagaman tersebut ke dalam kerja sama yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
f. Mengedepankan prinsip musyawarah sebagai bentuk etika sosial dalam menciptakan kehidupan yang beradab.
g. Mewujudkan keadilan sosial sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan bersama.

Sila kerakyatan mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga seluruh kebijakan negara harus disusun dan dilaksanakan oleh, dari, dan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, rakyat menjadi unsur utama dalam kehidupan bernegara, sehingga kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan individu, kelompok, partai politik, maupun kepentingan sempit lainnya.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang termuat dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berakar dan mendapat ruh dari sila-sila sebelumnya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (Hesti Hopipah Aliyani, 2022).

Sila kelima memuat nilai-nilai fundamental yang mencerminkan tujuan negara dalam mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Di dalamnya terkandung prinsip keadilan yang harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat

Keadilan tersebut harus di dasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan dan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi dari nilai-nilai keadilan ini yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi (Hesti Hopipah Aliyani, 2022):

a. Keadilan distributif adalah bentuk relasi keadilan antara negara dan warga negara, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan melalui distribusi hak, kewajiban, serta sumber daya secara adil kepada seluruh warga negaranya
b. Keadilan legitimate, atau keadilan ketaatan, mengacu pada bentuk relasi keadilan antara warga negara dengan negara, di mana warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip keadilan melalui kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem kenegaraa
c. Keadilan komutatif merujuk pada bentuk keadilan yang terjalin secara timbal balik antar individu dalam masyarakat, di mana hak dan kewajiban dipertukarkan secara seimbang.

Implementasi Pancasila dalam Perguruan Tinggi

Implementasi pancasila dalam perguruan tinggi, di mana semua kegiatan yang dilakukan khususnya mahasiswa harus sesuai dengan semua sila-sila pancasila. Untuk apa pancasila diciptakan kalau bukan sebagai pedoman bagi perilaku manusia. Pancasila akan sangat berperan penting dalam mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik berdasarkan Pancasila seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Ayat 11 dari Surah Ar-Ra'd dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan Pancasila bagi siswa, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya perubahan dalam diri siswa untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, termasuk pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila. Strategi pendidikan Pancasila haruslah mencakup upaya untuk mengubah mindset, sikap, dan perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat.

Berikut adalah implementasi Pancasila dalam Perguruan Tinggi:

a. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap mahasiswa dibebaskan untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan mata kuliah yang ada di setiap fakultas tidak mengganggu jadwal beribadahnya, juga harus ada sikap toleran dalam menghormati antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya yang beda keyakinan. Adapun contoh penerapannya seperti berdo'a sebelum memulai perkuliahan.

b. Sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, setiap mahasiswa harus berpartisipasi atau aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti halnya dengan donor darah, memberikan dana bantuan kepada korban bencana alam. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa simpati mahasiswa tetapi empati dengan membuktikannya ada rasa perhatian terhadap sesama manusia untuk saling meringankan beban penderitaan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu nilai kemanusiaan yang adil disini juga dapat dicerminkan dari pemberian fasilitas yang sama dan merata terhadap semua mahasiswa, memberikan kesempatan yang sama terhadap semua mahasiswa tanpa ada perbedaan maupun pilih kasih.
c. Sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia, mendukung antar berbagai organisasi mahasiswa untuk membentuk jaringan antar perkumpulan mahasiswa yang bertujuan agar mengenal satu sama lain dan membentuk hubungan yang harmonis dan adanya solidaritas di antara mahasiswa. Persatuan dan gotong royong dalam melaksanakan suatu kegiatan mahasiswa maupun kegiatan lainnya. Dalam hal ini persatuan tidak membedakan segala sesuatu tetapi memiliki tujuan yang sama, sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Seperti contohnya ketika mahasiswa akan melaksanakan seminar atau kegiatan kampus yang mana semua panitia dengan bersama-sama berupaya saling membantu dalam melancarkan acara tersebut.
d. Sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dengan adanya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam pemilihan ketua BEM atau Ketua SENAT mahasiswa dan anggotanya, tidak hanya itu dalam pembentukan acara seminar nasional atau kegiatan yang lainnya senantiasa dilakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil berdasarkan suara yang bulat, mendiskusikan tidak terbatas antar mahasiswa tapi berdiskusi dengan dosen. Selain itu juga seperti berdiskusi dalam proses pembelajaran dalam perkulian dan musyawarah pemilihan duta Jurusan.

e. Sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada di perguruan tinggi dan tidak melanggar aturan, datang kuliah tetap waktu dan tidak terlambat, berpakaian yang sopan dan rapi, mengerjakan tugas dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah diberikan, pada saat ujian tidak boleh mencontek dan jika aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan hukuman yang diberikan dan mahasiswa tersebut mau menerima saksi yang berlaku dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi artinya menyadari sepenuhnya bahwa ada tata tertib dan aturan yang berlaku.

Makna dan Isi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Istilah Tri Dharma berasal dari bahasa Sanskerta, *Tri* berarti tiga dan *Dharma* berarti kewajiban. Dengan demikian, Tri Dharma Perguruan Tinggi merujuk pada tiga kewajiban utama yang harus dijalankan oleh institusi pendidikan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan merealisasikan ketiga tugas pokok tersebut.

Komitmen terhadap pelaksanaan Tri Dharma ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga dapat dipahami sebagai landasan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi dalam menjalankan fungsinya (Ana Widiawati, 2023)

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita menuju ke arah yang terbaik. Pernyataan ini menjadi terbukti ketika kita melihat sejarah bangsa ini di mana sebagai perubahan besar pada suatu negara ini dimulai oleh

mahasiswa yang merupakan pemuda-pemudi Indonesia. Adapun bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi terbagi menjadi dari tiga bagian yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran

Menurut Ki Hajar Dewantara pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan artinya memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki seseorang agar mampu meraih tingkat tertinggi dari keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas sosial (Bowo Hadi Kuswono, 2023)

Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan IPTEK, dan seni (Sri Santi Ariani, 2019:71). Pendidikan pada hakikatnya merupakan ajang untuk berbagi ilmu pengetahuan. Pendidikan dan pengajaran disini di artikan sebagai sistem pendidikan yang berkesinambungan atau lebih dikenal dengan istilah *transfer of knowledge*, sehingga mahasiswa akan menjalani pendidikan dan kemudian di kembangkan melalui penelitian. Kualitas penelitian dan pengembangan oleh mahasiswanya saat ini didukung oleh kualitas pendidikan yang baik. Yaitu pendidikan yang bervariasi mulai dari Diploma, Strata, hingga Doktor. Kualitas yang sudah memenuhi standar tersebut diharapkan mampu memenuhi tenaga kerja di bidang penelitian untuk mendorong kualitas negara dengan lebih baik.

Adapun contoh pendidikan dan pengembangan seperti awal mulai mengikuti perkuliahan, tentunya sudah mendapatkan mata kuliah termasuk juga mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan secara bertahap mendapatkan mata kuliah lainnya, seperti contohnya dalam bidang ilmu hukum, adanya hak asasi manusia, perlindungan anak dan perempuan, dan masih banyak lagi yang didapatkan, dengan

mempelajari mata kuliah tersebut, mahasiswa tentunya dapat mengembangkannya sendiri di tengah-tengah masyarakat, karena tidak semuanya masyarakat mengetahui dan memahami akan adanya hak tersebut, dan tidak mengetahui bahwa hak tersebut sudah ada sejak manusia dilahirkan dan karena merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa tentunya bagi yang melanggar hak tersebut akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan juga masyarakat di daerah pedesaan tidak semuanya mengerti akan aturan hukum sehingga perlu adanya pengertian-pengertian yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang ada.

2. Penelitian dan Pengembangan

Borg dan Gall menyebutkan bahwa penelitian pengembangan adalah mengembangkan suatu produk pendidikan. Sedangkan menurut Sugiyono ia berpendapat bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil produk tertentu, serta menguji keefektivan dari produk tersebut. Menurut Soenarto penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan *prototipe*, desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran (Abady Risky, 2023).

Dari pengertian penelitian dan pengembangan yang telah dipaparkan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu upaya dalam memperoleh atau menghasilkan suatu produk tertentu dengan sebaik-baiknya.

Penelitian adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan konsep, teori, atau informasi baru guna memperluas dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Chairuddin P. Lubis, 2014:7). Penelitian dan pengembangan memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa keberlanjutan kegiatan ini, laju perkembangan keilmuan akan mengalami stagnasi. Penelitian juga tidak berdiri secara terpisah, melainkan sering kali dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan proses pembangunan dalam makna yang luas dan berkelanjutan.

Penelitian dapat dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ahli yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Penelitian di Perguruan Tinggi tidak hanya dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat pada saat itu saja, namun penelitian yang dilakukan juga harus mempunyai manfaat yang bisa dirasakan di masa yang akan datang. Perguruan Tinggi harus mampu menjadi tempat yang dapat menghasilkan temuan-temuan inovatif melalui kegiatan-kegiatan penelitian yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam berbagai upaya pembaharuan (Sri Santi Ariani, 2019:71).

Penelitian juga merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan terkait dengan suatu masalah. Ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian terapan dan penelitian terhadap ilmu-ilmu dasar penelitian terapan digunakan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi pada saat itu, sementara penelitian terhadap ilmu-ilmu dasar manfaatnya akan lebih penting di masa depan.

Dalam hal ini contohnya sebagai seorang dosen merupakan keharusan dalam melakukan penelitian dan dari hasil penelitian dipublikasikan artikelnya ke dalam jurnal baik itu jurnal nasional yang terkareditasi atau juga dengan jurnal international untuk menaikkan jabatan fungsional. Dalam melaksanakan penelitian dosen mengikutsertakan mahasiswa artinya ada keterlibatan mahasiswa disini, dengan keikutsertaan ini mahasiswa mengetahui tahap-tahap membuat proposal serta laporan penelitian, proposal dan laporan ini juga dibuat sesuai dengan pemahaman mahasiswa dalam mengembangkan teori dan konsep yang ada. Tidak diperbolehkan melakukan plagiat atau men*copy paste* penelitian milik orang lain, jika mahasiswa sudah paham, akan dapat melakukan penelitian dan biasanya hasilnya juga dipublikasikan ke dalam jurnal mahasiswa. Implikasinya yang lain dikarenakan pada semester akhir akan melaksanakan skripsi atau tugas akhir, dalam melaksanakan seorang mahasiswa akan mengambil data, dengan data tersebut akan diolah dalam hal penyajian data.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk memberikan kontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud peran aktif perguruan tinggi dalam menjalin hubungan langsung dengan masyarakat melalui penerapan keilmuan secara praktis. Setelah implementasi tersebut, kegiatan pengabdian sering kali dilanjutkan dengan penelitian sebagai upaya pengembangan lebih lanjut atas permasalahan yang dihadapi masyarakat (Sri Santi Ariani, 2019:72).

Perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat tergantung pada kemampuan para ilmuwan termasuk para mahasiswa dalam mengembangkan sebuah inovasi baru. Mahasiswa melalui pemikiran-pemikirannya dapat melakukan pembaharuan pola pikir masyarakat menjadi lebih modern tetapi masih berpedoman pada Pancasila.

Pendidikan yang dilanjutkan dengan kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan proses persiapan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan nyata di lapangan. Penelitian sendiri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah, dengan tujuan memperoleh informasi, data, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman maupun pengujian terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga merupakan kontribusi dari perguruan tinggi, khususnya mahasiswanya kepada masyarakat. Adanya secara langsung dari mahasiswa merupakan salah satu contoh dari "Pengabdian Kepada Masyarakat", dengan hal ini diharapkan masyarakat juga memberikan umpan balik yang positif terhadap penelitian yang dilakukan, bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut terkait objek dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga mahasiswa dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat sendiri.

Adapun beberapa bentuk upaya pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

a. Pengembangan desa binaan atau desa mitra, ada beberapa keuntungan pengembangan desa binaan antara lain, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, serta dapat memecahkan masalah secara tuntas
b. Pelatihan di kampus dan luar kampus, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan akan mampu dengan segera mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
c. *Local verifivation trial,* akan mampu menyatukan kegiatan penelitian dengan pengabdian masyarakat. Masyarakat dapat melihat secara langsung cara menghasilkan suatu teknologi karena langsung dilibatkan.
d. Pelaksanaan KKN, yaitu pengabdian masyarakat dalam hal ini juga melibatkan mahasiswa, mahasiswa menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan ini juga dalam rangka melakukan pengabdian ke masyarakat, sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa. Mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), keterlibatan dosen disini bisa sebagai pembimbing KKN, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam penyuluhan sekaligus juga menanamkan rasa persaudaraan dan saling mengenal satu sama lain, adanya persatuan dan kesatuan bangsa, terjalin kekompakan yang harmonis serta rasa solidaritas diantara masyarakat di tempat tersebut dengan mahasiswa (Fransiska Novita Eleanora, 2019:128).

Hubungan Pancasila dengan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika dan moral yang mendasari pelaksanaan ketiga dharma tersebut. Dalam ranah pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam

kurikulum guna membentuk karakter mahasiswa yang mencerminkan identitas kebangsaan. Pada aspek penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar tetap selaras dengan kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Sementara itu, dalam pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berperan aktif memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun hubungan lain antara Pancasila dengan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini akan mendasari setiap perilaku mahasiswa. Mahasiswa yang beriman kepada Tuhan atau memahami agama tidak akan berperilaku yang menyimpang dari aturan agama. Jika mahasiswa tidak berperilaku menyimpang maka secara langsung proses pendidikannya tidak akan terganggu, sehingga nantinya akan bisa melakukan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat. Nilai ketuhanan menjadi landasan dan etika moral dalam pendidikan dengan mengajarkan dan menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, ras, bangsa, dan kepercayaan. Serta menghargai terhadap setiap perbedaan tersebut. Dalam Tri Dharma (penelitian) nilai sila pertama ini dapat mendorong integritas dan tanggung jawab dalam mencari kebenaran ilmiah.
2. Sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pemahaman mahasiswa terhadap sila ini akan mencegah mahasiswa melakukan hal-hal yang semena-mena kepada saudara-saudara sesama mahasiswa. Dalam hal ini relevansi pancasila dengan Tri Daharma yaitu mengedepankan nilai keadilan sosial, menekankan perlakuan yang adil terhadap setiap individu baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sedangkan dalam Tri Dharma (penelitian) sila ini dapat mendorong dalam riset guna memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar.
3. Sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia, dapat menanamkan rasa persatuan dan kesatuan atara sesama mahasiswa sehingga

nantinya dapat mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi yang berlandaskan pancasila secara bersama-sama. Persatuan Indonesia menjadikan dasar untuk membangun solidaritas dan persatuan di lingkungan akademis kampus dari banyaknya perbedaan. Sedangkan dalam pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diarahkan supaya dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mahasiswa yang memahami sila ini akan selalu mendahulukan musyawarah ketika ada banyak pendapat yang masuk tentang suatu masalah agar tidak ada lagi demonstrasi yang berakhir dengan korban jiwa. Menekankan nilai demokratis, dalam pendidikan dimana pengambilan keputusan melibatkan partisipasi dan keterbukaan terhadap setiap individu. Sedangkan dalam penelitian dan pengembangan, etika dalam melakukan riset dan pengembangan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan dengan hasil musyawarah.
5. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suatu keadilan akan tercipta bila didasarkan pada pancasila. Sila kelima pancasila bisa menjadi dasar etika dan moral untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh peluang pendidikan maupun penelitian. Sedangkan dalam pengabdian terhadap masyarakat, perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial maupun dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Hubungan Pancasila dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena dalam melaksanakan atau menjalannkan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri juga harus berpedoman dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang mana ketika Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dilaksanakan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila dapat membentuk lingkungan akademis yang unggul dan juga memiliki landasan etika dan moral

yang kuat, menciptakan mahasiswa dan tenaga akademis yang berkompeten dan juga berkepribadian baik.

Kontekstualisasi Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kontekstualisasi Pancasila dan Tri Dharma perguruan tinggi merupakan upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, keberagaman global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif.

Berikut beberapa contoh kontekstualisasi Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai pedoman Pancasila, seperti menghargai perbedaan, mengutamakan dan memajukan rasa cinta tanah air.
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dengan tetap menghormati hak kekayaan intelektual dan etika penelitian.
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagi ilmu, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki perguruan tinggi, serta ikut serta memecahkan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, kontekstualisasi Pancasila dan Tri Dharma perguruan tinggi dapat menjadi sarana mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Penutup

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pancasila dapat kita artikan sebagai lima prinsip yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa sebagai pemersatu dan pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana semua kegiatan yang dilakukan khususnya

mahasiswa harus sesuai dengan semua sila-sila Pancasila, di mana Pancasila menjadi pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara.

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang ada di perguruan tinggi dan bagi seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini mahasiswa sulit untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bersamaan, apalagi mewujudkan Tri Dharma yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap kegiatan. Seiring berjalannya waktu, para pelajar semakin melupakan Pancasila, yang diharapkan dapat menjadikan negara ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Pancasila memiliki hubungan dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa berlandaskan Pancasila.

Pancasila adalah landasan filosofis dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, berperan sebagai perekat persatuan, simbol kesatuan nasional, serta sebagai benteng pertahanan bagi keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi seluruh mahasiswa sebagai kaum terpelajar, karena mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa Indonesia menuju era yang lebih baik.

Pancasila mengandung nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Apabila nilai-nilai pancasila diterapkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi maka akan dapat membentuk generasi yang unggul, baik unggul dalam intelektual maupun dalam moralnya.

Hubungan Pancasila dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena dalam melaksanakan atau menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri juga harus berpedoman dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

MWCNU
MADANI
TULUNG
AGUNG
N U
MWCNU TULUNGAGUNG
Senin, 16 Juni 2025
TELAH TERBIT BUKU DENGAN JUDUL "KONTEKSTUAL PANCASILA DALAM PENDIDIKAN ISLAM" KARYA DR. H. ZAINI FASYA, M.PD.I DAN MUHSIN KALIDA, S.AG., MA., M.PD.,
Kabar baik untuk kita semua! Alhamdulillah buku yang sudah ditunggu-tunggu semester ini, berjudul "Kontekstual Pancasila dalam Pendidikan Islam" karya Dr. H. Zaini Fasya, M.Pd.I dan Muhsin Kalida, S.Ag., MA., M.Pd., akhirnya telah terbit ber-ISBN bersama Historie Penerbit. Semoga buku ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat, menambah wawasan, dan memperkuat nilai kebangsaan serta keislaman dalam dunia pendidikan Islam. Buku ini sangat layak dan direkomendasikan menjadi bacaan wajib di seluruh program studi, terutama fakultas keguruan dan Prodi Pendidikan Agama Islam.
KONTEKSTUAL PANCASILA DALAM PENDIDIKAN ISLAM
MWCNU Tulungagung Official

BAB XI

PANCASILA DAN KARAKTER TOKOH KEBANGSAAN KI HAJAR DEWANTARA

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia (Safitri, A. O, dkk., 2021:88-94). Pancasila merefleksikan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketika diterapkan, mencerminkan karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Kelima sila dalam Pancasila saling menguatkan dan membentuk kesatuan yang utuh, mengandung makna yang mendalam, serta menjadi dasar bertindak dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa. Lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila merupakan filosofi hidup bangsa yang bersumber dari warisan budaya dan sejarah panjang masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Namun, memasuki era reformasi, keberadaan Pancasila kerap kali dipertanyakan dan menjadi bahan diskusi yang tak berkesudahan. Padahal, Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai esensial yang berakar dari keragaman sistem sosial dan budaya lokal, serta menjadi pijakan utama dalam membangun identitas dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara (Irwan, I., dkk., 2021:512). Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai upaya dan tantangan yang mencoba menggantikan ideologi Pancasila, namun penting untuk disadari bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara sekaligus ideologi autentik yang melekat pada jati diri bangsa dan negara Indonesia.

Segala hal dalam kehidupan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Sejak zaman dahulu, para tokoh nasional menanamkan nilai-nilai pancasila dalam diri mereka ketika berjuang demi negara Indonesia. Tokoh kebangsaan terdapat karakter dan nilai dalam perjuangannya. Dari beberapa perjuangan bisa diambil dari arti perjuangan dengan arti nilai filosofi pancasila dengan nilai karakter pada membangun bangsa. Bangsa Indonesia melalui generasi penerus bangsa perlu mewarisi dan merefleksikan kembali buah pemikiran Ki Hajar Dewantara.

Dari pembahasan diatas penulis membagi ruang lingkup pembahasan mengenai pancasila dan karakter tokoh kebangsaan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai pancasila ditanamkan dalam diri dengan meneladani karakter tokoh kebangsaan. Sikap teladan Ki Hajar Dewantara melibatkan semangat pengabdian kepada pendidikan dan bangsa. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia, dengan konsep "Taman Siswa" yang menekankan pada pendidikan holistik, kebebasan berpikir, dan nilai-nilai moral. Sikap teladannya tercermin dalam dedikasinya untuk menyebarkan pendidikan kepada masyarakat, memerangi buta huruf, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman dalam pendidikan. Pemikiran dan tindakan Ki Hajar Dewantara memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Biografi Ki Hajar Dewantara

Pada dasarnya sejarah adalah hubungan antar biografi yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki Hajar Dewantara (KHD), hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah yang sezaman khususnya di bidang politik, meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan. Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan lingkup temporalnya mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad XIX sampai dengan Pertengahan abad XX (Ki Hadjar Dewantara, 1967:9). Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas

Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama K.P.H. Suryaningrat dan Ibundanya bernama Raden Ayu Sandiyah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke 39 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Lingkungan hidup pada masa Ki Hajar Dewantara kecil sangat besar pengaruhnya terhadap jiwanya yang sangat peka terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun religius. Setelah berganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dapat leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sehingga dengan demikian perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa itu.

Tanggal 4 November 1907 dilangsungkan "Nikah Gantung" antara R.M. Soewardi Soeryaningrat dengan R.A. Soetartinah. Keduanya adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Pada akhir Agustus 1913 beberapa hari sebelum berangkat ke tempat pengasingan di negeri Belanda. Pernikahannya diresmikan secara adat dan sederhana di Puri Suryaningratan Yogyakarta. Jadi Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara adalah sama-sama cucu dari Paku Alam III atau satu garis keturunan. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di kediamannya di Mujamuju, Yogyakarta. Pada 29 April, jenazah beliau dipindahkan ke pendopo Taman Siswa dan diserahkan secara resmi kepada Majelis Luhur Taman Siswa. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan menuju pemakaman Wijaya Brata, Yogyakarta. Prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Diponegoro saat itu, Kolonel Soeharto (Ki Hadjar Dewantara, 1962:137)

Nama Suwardi Suryaningrat kurang dikenal oleh masyarakat, namun dengan nama Ki Hadjar Dewantara, beliau sangat dikenal, dihormati dan disanjung-sanjung sebagai Pendiri Perguruan Taman Siswa, Bapak Pendidikan Nasional, dan Pahlawan Nasional (Ki Hadjar Dewantara, 1962:10). Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai "Pahlawan Nasional". Pada 16 Desember 1959,

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, pemerintah resmi menetapkan tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, dan kemudian diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai tokoh nasional yang dihormati oleh berbagai kalangan, baik pendukung maupun pihak yang berseberangan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, tegas dalam prinsip, serta memiliki keberanian moral yang tinggi. Wawasan beliau sangat luas dan tidak berhenti berjuang untuk bangsanya hingga akhir hayat. Perjuangan beliau dilandasi dengan rasa ikhlas yang mendalam, disertai rasa pengabdian dan pengorbanan yang tinggi dalam mengantarkan bangsanya ke alam merdeka.

Beliau dikenal dan diakui dunia karena kompetensi, keahlian, prestasi dan sumbangsihnya yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Melalui studi kepustakaan baik berupa tulisan-tulisan maupun benda peninggalan Ki Hajar Dewantara, serta buku-buku karya para tokoh Taman Siswa dan simpatisan Taman Siswa yang tersimpan di Museum Taman Siswa "Dewantara Kirti Griya", kami sajikan biografi untuk menggambarkan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai seorang jurnalis, politikus, budayawan, pendidik, dan pemimpin rakyat.

Adapun profesi yang digelutinya adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu: Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara yang melontarkan kritik sosial-politik kaum bumiputra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, halus, mengena, tetapi keras. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dalam sanubarinya direalisasikan dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922) guna mendidik masyarakat bumiputra. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman Ki Hajar Dewantara berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan kawula (rakyat). Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal (Jawa) guna menggapai kesetaraan sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme

kultural sampai dengan nasionalisme politik (Ki Hadjar Dewantara, 1962:146).

Nilai-nilai Pancasila Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara

Terkait dengan makna nilai Pancasila Ki Hajar Dewantara mempertegas bahwa "memang sebenarnya Pancasila merupakan suatu "konfrontasi" antara diri kita dengan pusat budi kita atau "geweten" kita sendiri, seolah-olah kita melihat ke dalam kaca benggala dan melihat disitu gambar badan dan wajah kita sewajarnya, yang menunjukkan beberapa keindahan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, keberhasilan dan kekotoran yang ada pada tubuh kita. Memang sebenarnya Pancasila kita itu mengajarkan dan menunjukkan pada kita, bagaimana seharusnya kita berpendirian, bersikap, dan bertindak, tidak hanya sebagai warga negara yang setia, melainkan juga sebagai manusia yang jujur dan bijaksana" (Ki Hadjar Dewantara, 1994). Sosok Ki Hajar Dewantara tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan pioner dan pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Keberadaannya dalam menentang penjajahan Belanda adalah dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa. Dengan mendirikan perguruan tersebut ia bercita-cita agar bangsa Indonesia merdeka lahir batin. Pemikirannya sangat relevan sebagai sebuah terobosan dalam membangun pendidikan saat ini yang dalam keadaan kritis. Dari tiap tingkat dan lapangan perjuangan yang ditempuh Ki Hajar Dewantara, terdapat tulisan-tulisan beliau di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur. Dari perjuangan Ki Hajar Dewantara di lapangan jurnalistik, ke lapangan politik, dan yang terakhir di lapangan pendidikan dan kebudayaan, ditemukan berbagai tulisan yang menggambarkan gagasan dan konsepsinya. Dengan berbagai ragam dan cara mengemukakan gagasan sesuai dengan masa, jaman, dan objek yang dihadapinya, maka seluruh kegiatan Ki Hajar Dewantara mengandung semangat dan bernafaskan perjuangan menuju cita-cita Indonesia merdeka (Ki Hadjar Dewantara, 1967:147). Semboyannya yang terkenal ialah *Tut*

Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan), *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), *Ing Ngarsa Sung Tulada* (di depan memberi teladan). Dan, salah satu dari semboyan, yaitu *Tut Wuri Handayani*, menjadi slogan Departemen Pendidikan Nasional (Ki Hadjar Dewantara, 1962:215).

Ketiga semboyan ini apabila kita maknai serta hayati bersama merupakan akar dan ujung tombak dari peran serta guru dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Semboyan ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Abidin (2015) bahwa tugas dan fungsi guru didalam kelas tidak hanya transfer knowladge, melainkan inti dari tugas guru adalah mengembangkan, mengarahkan, dan memberimotifasi. Makna *Ing Ngarsa Sung Tulada* (di depan memberi teladan) seyogianya dimaknai sebagai guru mampu memberikan contoh yang baik dalam berbagai dimensi. Sifat, perilaku, penampilan, tutur kata, sopan santun dan lain sebagainya dalam hal ini adalah bagian dari suatu paket yang harus guru contohkan. Semboyan berikutnya adalah *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa). Semboyan ini memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa sebagai guru harus mampu tampil sebagai sosok teman atau sahabat yang baik ditengah-tengah siswa. Apalagi apabila kita berbicara mengenai pendidikan dasar atau lebih spesifik kepada pendidikan sekolah dasar. Anak-anak terkadang jauh lebih peka dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak adalah peniru/imitator ulung.

Hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan lain, yakni salah satunya adalah motivasi. Guru harus mampu membangkitkan semangat dan gairah siswa demi mewujudkan asa dan cita-citanya. Selanjutnya dalam konteks pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengemukakan Panca Dharma. Panca Dharma secara umum berarti "lima asas". Lima asas pemikiran yang terhimpun dalam konsepsi tersebut adalah: asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan (Solehan: 2010). Panca dharma memberikan sebuah gambaran dengan sendirinya mendorongkan asas aliran, haluan, anjuran, tekat, niat,

dan kemauan supaya kita bisa berbuat segala apa yang berdasarkan lima dasar itu.

Karakter Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hal itu karena beliau merupakan seorang tokoh yang tanpa jasa memerdekakan Indonesia. Pengabdian yang ia berikan begitu besar terhadap bangsanya. Banyaknya karya yang membuat Indonesia menjadi bangga pun sering ia lakukan. Bahkan saking begitu banyak membuat Indonesia bangga, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara menjadi hari Pendidikan Nasional. Hari yang dikenal seluruh warga Indonesia. Hari seseorang yang dilahirkan untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia. Dengan kepintaran, kebijaksanaan, tekun dan berani memerdekakan hak dari orang lain dan bangsanya melawan penjajah (Zuriatin, dkk., 2021:49).

Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama RM Soewardi Soerjaningrat (SS), putra GPH Soerjaningrat, atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya Soewardi soerjaningrat adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan. Pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah Pendidikan Nasional. Hal ini diinsyafi benar oleh Ki Hadjar Dewantara, bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa harus didasari jiwa merdeka dan jiwa nasional dari bangsa itu. Hanya orang-orang yang berjiwa merdeka saja yang sanggup berjuang menuntut dan selanjutnya mempertahankan kemerdekaan. Syaratnya ialah Pendidikan Nasional, dan pendidikan merdeka pada anak-anak yang akan dapat memberi bekal kuat untuk membangun karakter bangsa (I. Suwahyu, 2018:201). Hingga beliau mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan di Indonesia. Selain itu, menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan. Beliau terus berupaya membuat metode baru dalam pendidikan dan mencurahkan hidupnya sebagai tenaga pelajar. Sehingga gelar Bapak Pendidikan disandangnya. Seorang guru yang teladan, Dilansir dari buku Kesadaran Nasional dari Kolonialisme

sampai Kemerdekaan, seorang guru harus memiliki tiga sifat yang menjadi semboyan Ki Hadjar Dewantara , yaitu:

1. *Ing ngarsa sung tulada*, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan.
2. *Ing madya mangun karsa*, yaitu seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengahtengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya.
3. *Tut wuri handayani*, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karuya anak-anak didiknya. Perilaku guru akan menjadi sarana penyampaian pesan paling efektif bagi peserta didik. Perilaku ini yang akan menjadi teladan bagi kehidupan sosial peserta didik.

Pembela keadilan dari penindasan Perlawanan ketidakadilan masa penjajahan Belanda membuat Ki Hajar Dewantara bergabung ke organisasi Boedi Oetomo. Beliau membangun kekuatan melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik dan sosial. Perlawanannya dilakukan lewat dunia pendidikan. Beliau memperjuangkan pendidikan kepada kaum pribumi agar dapat melawan penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Dari situlah lahir pejuang-pejuang intelektual dari kaum pribumi. Pemuda pemuda berpendidikan ini menjadi kekuatan baru dalam menghadapi penjajah.

Karakter tokoh kebangsaan Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain sebagai berikut:

a. Nasionalisme: Ki Hajar Dewantara adalah seorang nasionalis yang sangat mencintai bangsanya, Indonesia. Ia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perjuangan kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme Ki Hajar Dewantara tercermin dalam upayanya untuk memajukan pendidikan nasional dan membangkitkan kesadaran bangsa.
b. Kemanusiaan: Ki Hajar Dewantara adalah seorang humanis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ia berjuang untuk memberikan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat

Indonesia tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, agama, atau suku. Ia menekankan pentingnya menghargai dan menghormati martabat manusia.

c. Persatuan: Ki Hajar Dewantara menganut prinsip persatuan. Ia berusaha mengatasi perpecahan dan konflik yang terjadi di Indonesia pada masa itu dengan memperjuangkan pendidikan sebagai sarana untuk mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Ia mendukung adanya pendidikan nasional yang bersifat inklusif dan menyatukan berbagai elemen bangsa.
d. Demokrasi: Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan pada nilai-nilai demokrasi. Ia memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi kepada murid-muridnya, termasuk dalam pengelolaan sekolah dan pendidikan.
e. Keadilan sosial: Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang sangat peduli terhadap keadilan sosial. Ia berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia mendorong model pendidikan yang tidak terbatas pada aspek akademik semata, melainkan juga menekankan pengembangan keterampilan serta pembentukan karakter yang relevan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat.

Sepanjang perjuangannya, Ki Hajar Dewantara berhasil menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam visi dan praktik nyata di bidang pendidikan. Ia melihat pendidikan sebagai alat strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan semangat Pancasila, yakni membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pemikiran Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara

1. Tujuan Pendidikan

Perumusan tujuan pendidikan merupakan elemen kunci dalam proses pendidikan, karena tanpa arah yang jelas, kegiatan pendidikan berisiko kehilangan orientasi bahkan melenceng dari maksud utamanya. Oleh sebab itu, penetapan tujuan pendidikan secara tegas dan terstruktur sejak awal menjadi aspek esensial yang berpengaruh langsung terhadap masa depan bangsa. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah proses pendampingan dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Artinya, pendidikan berfungsi untuk mengarahkan dan membimbing seluruh potensi kodrati yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, sehingga kelak mereka dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Ki Hadjar Dewantara, 2009:15). Pendidikan sebagai proses tuntunan tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter agar terhindar dari perilaku menyimpang. Bagi Ki Hadjar Dewantara, tujuan akhir pendidikan adalah terwujudnya manusia yang merdeka yakni merdeka secara fisik, mental, dan spiritual.

Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi antara lain:

a. Tujuan jasmani (*al-ahdaf al-Jismiyyah*), dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik.
b. Tujuan rohaniah (*al-ahdaf al-ruhaniyyah*), dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi saw dengan berdasarkan pada cita-cita ideal dalam Al-Quran.
c. Tujuan akal (*al-ahdaf alaqliyah*), pada sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan mengarahkan intelegensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah

terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahap pendidikan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah, kebenaran empiris dan kebenaran metaempiris atau filosofis.

d. Tujuan sosial (*al-ahdaf al-Ijtima'iyyah*), (Bukhari Umar, 2010:59-60).

Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh baik roh, tubuh dan akal (Merdeka, 2023).

Terdapat perbedaan dalam penekanan dan perumusan tujuan pendidikan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Kurikulum 2013 pada masing-masing dimensi pembelajaran.

Pertama, dalam dimensi jasmani, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kemerdekaan fisik yang ditandai dengan tubuh yang sehat dan kuat, sedangkan Kurikulum 2013 menargetkan pengembangan jasmani yang produktif, kreatif, dan inovatif.

Kedua, dalam dimensi akal, Ki Hajar Dewantara menitikberatkan pada pengembangan kecerdasan yang luas dan mendalam, sementara Kurikulum 2013 lebih fokus pada penguasaan pengetahuan serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan.

Ketiga, dalam aspek rohani, Ki Hajar Dewantara mengarahkan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan batin melalui kemerdekaan mental dan spiritual, sedangkan Kurikulum 2013 menekankan pembentukan karakter peserta didik sebagai individu yang beriman dan memiliki kecerdasan emosional.

Keempat, dalam dimensi sosial, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab, sementara Kurikulum 2013 lebih menekankan pada kemampuan peserta didik untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta berperan aktif dalam peradaban global.

Menurut Ki Priyo, Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjadikan kata 'merdeka" sebagai subjektifitas, sehingga membawa arah pembelajaran menjadi liar. Inilah yang menjadikan istilah

Merdeka Belajar dirasa kurang pas untuk menjadi dasar pendidikan saat ini.

"Banyak yang belum membaca ajaran Ki Hajar tentang merdeka belajar. Sebetulnya lebih pas belajar merdeka. Merdeka belajar sangat mengganggu orang lain atau golongan lain," ujarnya.

Putra dari Ki Hadi Sukitno, tangan kanan Ki Hajar Dewantara, menuturkan Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman. Serta, menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Angka tidak boleh menjadi tolak ukur dalam pengembangan bakat. Kurikulum jangan dijadikan alat untuk menjajah anak didik. Terjajahnya anak didik dalam kurikulum, malah membunuh pengembangan bakat yang digaungkan oleh pahlawan nasional itu.

"Pikiran kok sampai terjajah? itu artinya terjajah intelektualisme. Ki Hajar anti intelektualisme. Dia bilang, saya tidak suka orang yang terlalu intelek tapi mengabaikan karakter. Artinya belajar itu terlalu kognitif. Tapi afeksinya, rasanya, kadang-kadang hilang," jelas dia, sembari mengenang sosok Ki Hajar Dewantara yang terkenal garang di depan kelas. Ia melanjutkan, pendidikan karakter dalam membangun bakat semakin terasa penting dan tak boleh tersingkirkan. Karakter merupakan kunci utama dalam membangun setiap insan pendidikan.

Guru bisa mengukur kemampuan anak didiknya dengan cara yang lebih deskriptif. Bagi Ki Priyo, uraian kalimat ini bisa menjelaskan seperti apa karakter anak didik yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana Nadiem menentukan kebijakan. Menteri yang belum genap satu tahun memegang kendali pendidikan Indonesia itu harus memutar otak.

"Tidak hanya numeratif, tapi juga uraian kalimat yang bisa menjelaskan karakter si anak itu sesungguhnya bagaimana. Tetapi tidak kemudian memberikan beban berat kepada guru, sehingga saat menilai siswa itu seperti membuat skripsi, kasihan dia. Dibuatlah yang lebih sederhana," paparnya.

Ki Priyo menyatakan, Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan bakat dan minat anak dalam belajar. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Nadiem untuk mempertahankan budaya belajar merdeka yang diusung Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi apa. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anaknya saat belajar apapun, berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dalam membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Indikator negara maju dapat dilihat dari kemampuan lulusan akademiknya dalam membuka lapangan kerja. Sayang, hal ini belum menjadi mindset atau dasar berpikir anak negeri, karena luput dari arti belajar merdeka ala Ki Hajar Dewantara.

2. Pendidik

Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan (tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya) selanjutnya dengan menambahkan awalan pe- hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti pendidik seperti kata teacher artinya pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi, di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Demikian pula dalam bahasa Arab seperti kata *al-mualim* (guru), *murabbi* (mendidik), mudarris (pengajar) dan *uztadz*. Secara terminologi beberapa pakar pendidikan berpendapat, menurut Ahmad Tafsir, bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (*rasa*), kognitif (*cipta*), maupun psikomotorik (*karsa*).

Sedangkan Abdul Mujib mengemukakan bahwa pendidik adalah bapak rohani (*spiritual father*) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia,

dan meluruskan prilakunya yang buruk. Pendidik dapat pula berarti orang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani anak. Secara umum dijelaskan pula oleh Maragustam Siregar, yakni orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan lain-lain baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah (M. Ramli, 2015:62-63).

Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan yang sejati adalah proses memanusiakan manusia, yaitu upaya mengangkat derajat manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat secara insani. Pendidikan harus berorientasi pada pembebasan, terutama dalam dimensi batiniah, seperti kemandirian berpikir, kemampuan mengambil keputusan secara otonom, penghargaan terhadap martabat diri, serta pembentukan mentalitas yang demokratis (Ki Hadjar Dewantara, 2009:3). Ki Hadjar Dewantara merumuskan sejumlah prinsip sebagai panduan dalam membentuk kultur positif bagi seorang pendidik. Melalui semboyan Trilogi Pendidikan, ia menekankan pentingnya peran guru dalam setiap posisi interaksi dengan peserta didik. *Tut Wuri Handayani* mengajarkan bahwa ketika berada di belakang, guru harus mampu memberikan dorongan dan bimbingan. Ing Madya Mangun Karsa berarti saat berada di tengah peserta didik, guru dituntut untuk membangun semangat, menciptakan inisiatif, serta menumbuhkan ide-ide kreatif. Sedangkan Ing Ngarsa Sung Tulada mengandung makna bahwa saat berada di depan, guru harus menjadi panutan, memberikan keteladanan melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai luhur (Wawan Eko Mujito, 2014:69).

Menurut Ki. Hajar dewantara pendidik terdiri dari orang tua, guru atau pemimpin, termasuk pemimpin spiritual, peran pendidik yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Sementara menurut kurikulum 2013 peran pendidik juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran, tetapi sedikit berbeda dengan Ki Hajar dewantara, kurikulum 2013 menjadikan pendidik sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Ki. Hajar Dewantara secara tersirat telah memaparkan empat kompetensi tersebut harus dimiliki seorang pendidik, begitu juga dengan kurikulum 2013, namun terdapat perbedaan dalam penjabaran dan penekanan dalam menjelaskan masing-masing kompetensi, yaitu;

Pertama, Kompetensi pedagogik, sebagaimana digagas oleh Ki Hadjar Dewantara melalui semboyannya *Tut Wuri Handayani*, menekankan bahwa seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Sementara dalam semboyan *Ing Madya Mangun Karsa*, pendidik ketika berada di tengah-tengah peserta didik, dituntut untuk membangun inisiatif dan menciptakan ide-ide kreatif yang mendorong semangat belajar. Melalui kurikulum 2013, kompetensi pedagogik dijabarkan secara lebih komprehensif, meliputi pemahaman pendidik terhadap kompetensi inti yang berkaitan erat dengan profil lulusan yang diharapkan. Pendidik diharapkan mampu merancang proses pembelajaran yang efektif, memberikan motivasi untuk peningkatan hasil belajar, serta responsif terhadap perbedaan karakteristik individu peserta didik. Di samping itu, pendidik juga harus kaya akan pengetahuan, memiliki inisiatif tinggi, kreatif, serta mampu berpikir solutif dalam menghadapi berbagai dinamika pembelajaran.

Kedua, Kompetensi kepribadian, sebagaimana digambarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam semboyannya *Ing Ngarsa Sung Tulada*, mengandung makna bahwa saat seorang pendidik berada di depan, ia harus menjadi teladan melalui perilaku yang mencerminkan integritas dan keteladanan moral. Seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai luhur melalui sikap dan tindakan nyata. Pendidik dituntut untuk membangun etos kerja yang positif, menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga martabat

dalam menjalankan tugas, serta memiliki semangat pelayanan terhadap masyarakat. Kompetensi kepribadian mencakup kemampuan pendidik untuk memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri, memahami kelebihan dan kekurangannya, serta mampu mengendalikan emosi dan menjaga stabilitas kepribadian dalam situasi apa pun. Kombinasi antara keteladanan moral dan kestabilan emosional menjadi fondasi penting dalam membentuk sosok guru yang berwibawa dan inspiratif.

Ketiga, Kompetensi sosial, menurut Ki Hajar Dewantara, tercermin dalam kemampuan pendidik untuk membangun relasi yang harmonis dan komunikatif, baik dengan peserta didik maupun dengan seluruh unsur komunitas sekolah. Selain itu, pendidik juga harus mampu menjalin hubungan yang konstruktif dengan pihak eksternal seperti orang tua, komite sekolah, serta stakeholder pendidikan lainnya. Sementara dalam Kurikulum 2013, kompetensi sosial lebih difokuskan pada kemampuan pendidik dalam berkomunikasi secara efektif dan jelas. Pendidik dituntut untuk mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan cara yang mudah dipahami peserta didik, serta menjauhkan diri dari sikap merendahkan, termasuk penggunaan bahasa sarkastik atau ejekan yang dapat merusak hubungan emosional dan suasana pembelajaran yang sehat.

Keempat, Kompetensi profesional, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut seorang pendidik untuk tampil secara utuh sebagai pribadi yang profesional, baik dari segi fisik, intelektual, kemampuan berelasi sosial, integritas kepribadian, penghayatan nilai-nilai, hingga kedalaman spiritual. Selain itu, pendidik juga harus mampu berperan sebagai sumber inspirasi dan motivator bagi peserta didik. Sementara dalam Kurikulum 2013, aspek profesionalisme tercermin dalam kemampuan pendidik untuk menguasai berbagai metode dan media pembelajaran secara variatif guna mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal.

3. Prinsip pembelajaran

Prinsip pembelajaran merujuk pada asas atau kebenaran fundamental yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak. Dalam proses belajar-mengajar, prinsip-prinsip ini berperan penting dalam menunjukkan batasan-batasan serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama pembelajaran berlangsung. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pembelajaran, pendidik dapat merancang langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif, sekaligus menghindari tindakan yang bersifat spekulatif atau kurang relevan dengan tujuan pembelajaran (Jamil Suprihatiningrum, 2012:99). Ki Hadjar Dewantara merancang pendidikan di Taman Siswa bukan sekadar sebagai proses transfer ilmu, melainkan sebagai gerakan pembebasan yang berakar kuat pada lima prinsip fundamental yang ia sebut *Panca Dharma*. Lima prinsip ini bukan hanya pijakan filosofis, tetapi juga menjadi roh dari seluruh peraturan, tradisi, dan tata laku yang menghidupkan Taman Siswa sejak kelahirannya pada tahun 1922. *Panca Dharma* adalah manifestasi dari cita-cita kemerdekaan dalam Pendidikan yakni sebuah sistem yang menempatkan manusia sebagai subjek merdeka, berpikir kritis, dan tumbuh dalam kebudayaan luhur bangsanya (Ki Hadjar Dewantara, 1964:7).

Berikut *Panca Dharma* yang dirangkai oleh Ki Hajar dalam sebuah kalimat yang berbunyi: "Berilah (Kemerdekaan) dan kebebasan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan (Kodrat alam) yang hak atau nyata dan menuju kearah (Kebudayaan), yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia, agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakainya dasar (Kebangsaan), akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar (Kemanusiaan)". Berikut uraian mengenai *Panca Dharma*, antara lain.

a. Kemerdekaan. Merdeka fisik, mental dan rohani dengan tertib-damainya masayarakat.

b. Kodrat Alam. Manusia tidak bisa lepas dari kehendak alam yang mengandung kemajuan.
c. Kebudayaan. Memelihara kebudayaan kebangsaan kearah kemajuan dunia.
d. Kebangsaan. Rasa satu dengan bangsa sendiri, satu dalam suka-duka menuju kebahagiaan hidup seluruh bangsa.
e. Kemanusiaan. Kemuliaan lahir batin dengan kesucian hati ke arah adab kemanusiaan (Muthoifin, 2015:86-87).

Metode Pembelajaran Ki Hajar Dewantara

Metode Pembelajaran yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Among memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Sistem Among dalam belajar mengajar dengan metode *kinder spellen* (permainan anak) atau belajar sambil bermain secara berkelompok yang bermanfaat untuk mendidik interaksi sosial kepada peserta didik. Ada tiga metode yang dipakai oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengambilan keputusan berbuat artinya kita bertindak sebaiknya berdasarkan urutan yang benar, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tiga metode tersebut adalah: *ngerti, ngrasa* dan *nglakoni*.

Pertama, metode *ngerti* maksudnya adalah memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada anak, di dalam pendidikan budi pekerti anak diberikan pengertian tentang baik dan buruk. Kedua, metode *ngrasa* maksudnya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan merasakan tentang pengetahuan yang diperolehnya, dalam hal ini anak didik untuk dapat memperhitungkan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketiga, metode *nglakoni* maksudnya adalah mengerjakan setiap tindakan, tanggung jawab telah dipikirkan akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya. Metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pola asih, asah, dan asuh. Asih artinya

mencintai, yang berarti antara guru dan anak didik harus ada rasa sayang menyanyangi, antar anak didik juga. Asah yang berarti mendidik, mendidik berarti tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi bisa membentuk anak menjadi berkarakter. Sedangkan Asuh artinya membina, yang berarti guru sebagai fasilitator harus bisa membimbing anak kearah yang lebih baik. Guru harus bisa memberi suri tauladan kepada anak ke dalam hal kebaikan (Ali Mustofa, 2023).

Menurut Dela Khoirul Ainia (2020), seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hadjar Dewantara yakni, *ing ngarsa sung tuladha* (dimuka memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita), *tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya). Hal yang paling utama dalam mendidik, yakni adanya pemahaman yang sama antara guru dan pendidik, sehingga mendidik bersifat "humanisasi", yaitu mendidik merupakan sebuah proses memanusiakan manusia, dengan adanya sistem.

Selain hal tersebut, Ki Hadjar Dewantara memiliki tiga pandangan tentang pendidikan: Pertama, tri pusat pendidikan, yang mengatakan bahwa pendidikan yang diterima oleh peserta didik terjadi dalam tiga ruang lingkup, yakni: lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Kedua, lingkungan tersebut memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Ketiga, sistem among, yaitu suatu sistem Pendidikan yang berjiwa kekeluargaan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem among menurut cara berlakunya disebut sistem *Tut Wuri Handayani*.

Pengembangn teknologi pembelajalaran (PTP) diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif (*highly effective teachingmodel*) karena mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik peserta didik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. PTP pada awalnya dikembangkan untuk anak-anak berbakat dan bertalenta (*gifted and talented*), anak-anak yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik yang belajar cepat. Pendekatan saintifik dipercaya sebagai jalur strategis

dalam membentuk dan mengembangkan sikap, keterampilan, serta pengetahuan peserta didik. Dalam proses yang memenuhi kaidah ilmiah, para ilmuwan cenderung mengutamakan penalaran induktif daripada penalaran deduktif.

Pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) adalah model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (*central*) dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang siswa bekerja, secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris (disadarkan pada data dan fakta yang jelas). Pembelajaran berbasis penemuan (*discovery learning*) adalah proses mental di mana siswa menghasilkan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental, misalnya; mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, membuat hipotesa, membuat kesimpulan, dan sebagainya.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Pancasila

Ki Hajar Dewantara menjadikan sila kemanusiaan sebagai "nada tertinggi" dari pancasila. Dengan demikian, pancasila bukan sekedar dasar negara dan ideology bangsa melainkan keluruhan hidup manusia, yang berkeadaban dan berkeadilan. Bagi Ki Hajar Dewantara, sila kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan karakter kemuliaan manusia, sehingga ketika seseorang ingin menjadi manusia paripurna, ia harus nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dalam kaitan ini, Ki Hajar Dewantara lalu menempatkan sila ketuhanan diatas sila-sila kemanusiaan tersebut. Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, ketuhanan merupakan "Cahaya dan Air" yang menerangi, menghidupkan dan menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sedangkan Sistem among menggambarkan bagaimana sebuah sistem pendidikan dilaksanakan sesuai dengan budaya luhur bangsa yang juga menjiwai tiap sila-sila dalam Pancasila selain itu juga telah dicantumkan dalam Pembukaan

UUD 1945. Pancasila dan Sistem Among juga selaras dengan *panca dharma* yang telah menjadi azas dari perguruan Taman Siswa (W. Noventari, 2016:57).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa terlihat pada Dasar kodrat alam memberi keyakinan akan adanya kekuatan kodrat pada manusia, makhluk Tuhan, sebagai bekal dan dasar yang perlu untuk tumbuh, pemeliharaan dan kemajuan hidupnya, hingga manusia dapat mengusahakan keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin, baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakatnya. Dijelaskan pula oleh Ki Hajar Dewantara "Kodrat Alam itulah petunjuk untuk hidup sempurna" (Tauchid, 1968:53-54) dan Ki Hajar Dewantara juga mengartikan bahwa kodrat alam mengandung dasar Ke-Tuhanan sebagaimana telah dijelaskan bahwa anak-anak adalah titah (makhluk) Tuhan dan dalam usaha pendidikan tidak bisa meninggalkan dasar-dasar kodrat iradat Tuhan, Ki Hajar Dewantara menekankan, bahwa pendidikan budi pekerti haruslah mengutamakan religi, yang dulunya bisa disebut keagamaan.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam prinsip kekeluargaan yang dianut dalam sistem among, yang menanamkan nilai untuk hidup harmonis tanpa diskriminasi, serta saling menghormati antar sesama.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia terlihat pada yang diutamakan dalam konsep pendidikan among adalah menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sendiri. melalui jalur pendidikan yang berjiwakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini maka pendidikan dianggap menjadi pilar utama untuk membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka membangun peradaban bangsa. Selain itu melalui pendidikanlah akan disemaikan jiwa-jiwa nasionalisme pada diri setiap anak didik. Ki Hajar Dewantara dengan gigih menggunakan sistem among untuk menempatkan jiwa nasional kepada putera tunas bangsa, untuk mengabdi dan mendahulukan kepentingan nasional. Kita kenang perjuangannya menentang berlakunya sistem pajak rumah tangga di Taman Siswa (yang hasilnya untuk penjajah Belanda), kita kenang perjuanganya menentang diskriminasi tunjangan anak yang

bersekolah disekolah pemerintah dan sekolah swasta. Seluruhnya didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan rakyat, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan akibat penindasan kolonial dan keterbelakangan pendidikan.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tercermin dalam sistem pendidikan among, peserta didik diajak untuk menghargai potensi dirinya (kodrat alam) sekaligus menyadari dan menerima keterbatasannya secara bijaksana. Bakat anak digunakan untuk melayani sesama dan bukan dibanggakan secara egoistis. Anak didik tidak mengejar kehormatan diri pribadi tetapi lebih mengedepankan azas kekeluargaan dan menghargai orang lain tanpa memaksakan kehendak pribadi. Demikian pula dalam proses pembelajaran setiap hukuman yang diberikan oleh pamong atau guru terhadap anak didik yang melanggar tata tertib sekolah terlebih dahulu telah dimusyawarhkan terlebih dahulu dengan pamong atau guru lainya sehingga setiap keputusan yang diambil disepakati bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam azas kekeluargaan yang dibangun di dalam Taman Siswa antara bapak, ibuk (pamong/guru) dan anak (anak didik). Memiliki kesadaran masing-masing. Misalnya guru atau pamong memiliki kewajiban untuk mendidik anak didik untuk menumbuhkan kesadaran anak akan ilmu pengetahuan, watak serta karakter pribadinya. Pamong atau guru juga harus menjiwai apa yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem among dan dipakai dalam sistem pendidikan di Indonesia sampai sekarang yakni semboyan yang berbunyi *Ing Ngarsa Sungtuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani*. Dengan semakin meratanya pendidikan maka masyarakat Indonesia diharapkan akan memperoleh penghidupan yang lebih baik dalam tujuan kesejahteraan sosial (W. Noventari, 2016:58).

Kontekstualitas Pancasila Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kehidupan

Ki Hajar Dewantara mengartikan Kontekstual Pancasila sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi usaha untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, penghargaan terhadap keberagaman, serta Ketuhanan Yang Maha Esa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan tersebut Pancasila menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang relevan dengan realitas sosial dan budaya saat itu.

Menurut Ki Hajar Dewantara, kontekstualisasi Pancasila dari Sila Pertama hingga Sila Kelima mengacu pada penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari:

1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), kontekstualisasi mencakup penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama, memastikan kebebasan beragama, dan mendorong kerukunan antarumat beragama.
2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan budaya yang bermartabat, dengan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara.
3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia), kontekstualisasi melibatkan upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman suku, dan membangun semangat gotong royong dalam masyarakat.
4. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penerapan prinsip musyawarah dan mufakat.
5. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), kontekstualisasi mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan perlindungan kepada yang lemah, dan

menciptakan kondisi sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kontekstualisasi ini, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa Pancasila tidak hanya menjadi norma atau pedoman, tetapi juga harus diaplikasikan secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila untuk membangun etika berpolitik di Indonesia yang harus dijadikan pedoman oleh Pemimpin Politik atau Masyarakat. Salah satu dalil Al-Quran yang menekankan pada konsep ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan dua nilai utama dalam Pancasila yang bisa dijadikan pedoman dalam membangun etika berpolitik yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

Artinya: *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Penutup

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, pemersatu, serta benteng pertahanan negara. Sebagai lima prinsip dasar, Pancasila memuat nilai-nilai moral dan pedoman perilaku yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara.Perjuangan tokoh-tokoh kebangsaan mencerminkan karakter dan nilai luhur yang sejalan dengan filosofi Pancasila. Oleh karena itu, generasi muda perlu mewarisi dan merefleksikan pemikiran tokoh bangsa seperti Ki Hadjar Dewantara untuk memperkuat karakter nasional dalam membangun masa depan Indonesia.

Metode Pembelajaran yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Among memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Ada tiga metode yang dipakai oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengambilan keputusan berbuat artinya kita bertindak sebaiknya berdasarkan urutan yang benar, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tiga metode tersebut adalah: *ngerti, ngrasa* dan *nglakoni*. Pertama, Metode *ngerti* maksudnya adalah memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada anak. Di dalam pendidikan budi pekerti anak diberikan pengertian tentang baik dan buruk. Kedua, Metode *ngrasa* maksudnya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan merasakan tentang pengetahuan yang diperolehnya. Dalam hal ini anak didik untuk dapat memperhitungkan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Metode *nglakoni* maksudnya adalah mengerjakan setiap tindakan, tanggung jawab telah dipikirkan akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya.

Metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pola asih, asah, dan asuh. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah memajukan bangsa secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status

sosial serta didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan sejati. Tokoh kebangsawanan yang menjunjung arti nilai dalam kemajuan bangsa. Dan menjadikan bangsa Indonesia kemerdekaan dari penjajahan dengan mempertahankan dan membangun Negara dengan mengideologikan bangsa yang menunjung nilai arti Negara berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

"Kajian Teori: Deskripsi Teoritik". Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

"Konsep Dasar dan Pengertian Sistem" - 2 Oktober 2020, https://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

Abady Risky, "8 pengertian penelitian dan pengembangan menurut para Ahli", https://satujam.com/penelitian-dan-pengembangan/. (diakses pada 10 November 2023).

Aca, Davino. *Pancasila Mengandung Konsep Religiusitas, Humanitas, Nasionalitas.* Di akses dari: https://www.scribd.com/document/635002909/Pancasila-mengandung-konsep-religiusitas-humanitas-nasionalitas Di akses pada: 30 september 2023 pukul 20:43

Afrinida. 2021.*"Tantangan Pendidikan Pancasila"*. OSF preprints.

Agustina, Rizki. Fajri Ismail, dkk. 2023. "Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Islam",

Jurnal Pendidikan dan Keguruan, vol. 1, No. 2, April

Ainia, Khoirul Dela. 2020. Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter, vol 3 no 3.

Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Aliyani, Hesti Hopipah & Dewi,Dinie Anggraeni. (2022). "Peran Mahasiswa dalam Mempertahankan Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara". Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.1.

Aminuddin, A. 2022. Pancasila dalam Kerangka Pikir Soekarno (Fondasi Moraldan Karakter Bangsa). *Jurnal Al-Harakah* .

Anwar, Arifin. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arafat,Yasser. 2021. *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indosesia (JPPI). Vol. 1. No. 2.

Ardhani, Marshandha Della, dkk. 2022. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari". Jurnal Gema Keadilan. Vol.9 ed. II.

Ariani, Sri Santi. 2019. "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi". Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal. Vol.3. No.1.

Arini Nuraini, "Tujuan Penerapan Pancasila di Perguruan Tinggi," Pusdatin, https://bpip.go.id/berita/1035/571/tujuan-pendidikan-pancasila-di-perguruan-tingi-ketahui-landasannya.html (diakses 28 Mei 2023).

Arum, Putri Sutrisni. 2020. *Pancasila Sebagai Sistem Nilai*.

Asmarita. *Pentingnya Toleransi Antarumat Beragama*, dalam https://fusa.uinjambi.ac.id/blogi diakses pada 8 November 2023

Asmaroini, A. P. 2017. Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *1*(2).

Asshiddiqie, J. 2008. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaidah-kaidah Undang- undang Dasar Negara RI tahun 1945.* Dokumen Sekretariat Negara.

Azzahrah, Azka Aulia. 2021. *Toleransi Pada Warga Negara Di Indonesia Berlandaskan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.* DeCive.

Bowo Hadi Kuswono, "Kesimpulan dari Refleksi Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara" (diakses pada 10 November 2023).

Bukhari, Umar. 2010. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah.

Dani, Ram, 2013. "*Pancasila sebagai Sumber dari Segalaa Sumber Hukum* ", dalam

http://pedabuntung.blogspot.com/2013/10/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala.html, diakses tgl 10 juni 2014

Darmadi, Hamid. R Masri Sareb Putra. 2020. *Membangun Moral Dan Etika SiswaSekolah Dasar.*

Dekker, Nyoman.1997. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.*Malang: IKIP Malang

Dewantara K H. 1994. Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Dua Kebudayaan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Dewantara, K. H. 1967. Jogjakarta: Majelis Leluhur Taman Siswa.

Dewantara, Ki Hadjar. 1962. Karya Bagian l: Pendidikan, Yogyakarta: MLPTS.

Dewantara, Ki Hadjar. 1964. Asas-asas dan Dasar-dasar Taman Siswa, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa

Dewantara, Ki Hadjar. 2009. Menuju Manusia Merdeka, Yogyakarta: Leutika.

Dinie Anggraeni Dwi, Nur Syamsa Mutiara Tawan, (2022), *"Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern",* Mahaguru: *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 3 (1).

Dwiyanto,D. & Saksono,G. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Negara Pancasila: Agama atau Sekuler, Sosialis atau Kapitalis.*Yogyakarta: Ampera Utama.

Dzakwan, Ghaizan. *Hubungan Kristen Katolik dengan Pancasila di Indonesia*, diakses pada 7 November 2023, ghaizan dzakwan - Academia.edu

Eddy,I.W.T. 2018. "*Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*". Denpasar. Universitas Udayana.

Eleanora, Fransiska Novita & Sari, Andang. 2019. "Relevansi Pendidkan Pancasila dan Potret Mahasiswa di Perguruan Tinggi". Jurnal Civic Hukum. Vol.4. No.2.

Elmy Tasya Khairally, "12 Ciri dan Profil Pelajar Pancasila yang Kreatif, Mandiri, dan Beriman" dalam https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6880708/12-ciri-dan-profil-pelajar-pancasila-yang-kreatif-mandiri-dan-beriman. Artikel, Diakses pada 1 November 2023.

F, Fuad. 2013. Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *13*(1).

Fatma Ulfatun Najicha, Keysa Afgrinadika wibowo. 2022. *Aktualisasi pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi.* Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (1).

Febrianti, Siska. 2018. *Budaya Kampus Berbasis Karakter*.

Fria, Sumitro. *Contoh Penerapan Pancasila Sila 1-5 dalam Kehidupan Sehari-hari"* Di akses dari: https://www.detik.com/sumut/berita/d-6913747/125-contoh-penerapan-pancasila-sila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari Di akses pada tanggal 30 september 2023 pukul 20.45

G, Subadi. 2018. *Peran Agama Memperkuat dan Menyatukan Masyarakat dengan Nilai-Nilai Pancasila*. Kegiatan Belajar 2:(ut.ac.id) diakses pada 7 November 2023.

Gesmi, Irwan dan Yun Hendri. 2018. *Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Gesmi, Irwan, dkk. 2018. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

H, Anisa Muthiatul. *Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka,* https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/opini/26/01/2023/pendidikan-karakter-dalam-kurikulum-merdeka/ diakses pada 31 Mei 2023.

Hadisi, La. 2015. "Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini", *Jurnal Al-Ta'dib,* vol. 8, No. 2, Juli-Desember

Hakim, "Apa Itu Tri Dharma Perguruan Tinggi." quipper.com, https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-life/ntri-dharma-perguruan-tinggi/ (diakses 3 Juni 2023).

Hamzah Ja'kub. 1978. *Etika Islam*. Jakarta: Publicita

Hapsari, Novita. "Makalah Tri Darma Perguruan Tinggi." http://nofitahapsari.blogspot.com/2014/06/makalah-tri-darmaperguruan-tinggi_2.html (diakses 3 Juni 2023).

Harianto, G. Seto. 2015. *IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA*. Jakarta, 8 Maret.

Harruma, Issha. 2022. *Pancasila sebagai Sistem Etika.* Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 30 November 2023.

Herwan Parwiyanto. 2022. *Pancasila Sebagai Sumber Nilai,* dalam http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id, diakses 20 September 2022.

Hudiarini, Sri.2000. *Pancasila.*Malang: Politeknik Negeri Malang

Hukum online.com,2002." *Pemerintah Dukung UKM Gunakan Infrastruktur TI* ", dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5733/pemerintah-dukung-ukm-gunakan-infrastruktur-ti. Diakses tgl 10 juni 2014

Husein, La Ode.2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*Bandung: CV. Utomo.

I, Farah Dina. 2019. "Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal hingga Saat Ini", *As-Salam,* vol. 8, No. 1.

Irene, Y. 2022. Implementasi Nilai-nilai Sila Pancasila dalam Kehidupan Kampus, terdapat dalam situs https://suarausu.or.id/implementasi-nilai-nilai-sila-pancasila-dalam- kehidupan-kampus/, diakses pada tanggal 28 Mei pada pukul 08.35.

Irwan, I., dkk. 2021. Penyuluhan Makna Nilai-nilai Pancasila Sebagai Perwujudan Integrasi Bangsa.

Islamy, Athoillah. 2021. Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.*

Isnaini, Muhammad. Khojir. 2021. *Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember. IAIN Sambas.*

Istianah, Anif. Hakim, Sholihun. Astuti,Rini Puji. "Integrasi Nilai-nilai Pancasila Untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila di Lingkungan Kampus". Vol. 19 (2021): 68.

Istianah, Anif. Rini Puji S, dkk. 2021. "Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Pelajar Pancasila", *Gatranusantara*, vol. 19, No. 2, Oktober

Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma Syahrial Syarbani.

Kasil dan Christine. 2004. *Ilmu Negara.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemanusiaan.

Kopong, Kristoforus. 2021. *Membumikan Pancasila: Upaya Meredam Radikalisme Di Ende-Indonesia.* Atma Reksa : *Jurnal Pastoral dan Kateketik*

Krisnamukti, Bagus Pradhana dkk. 2020. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang, Jurnal Rontal KeIlmuan Pkn. Vol.6. No.1.

Kusumawati, Devi. *Keberagaman Agama dan Budaya di Indonesia. dalam* https://fasya.uinsi.ac.id/2021/09/01/keberagaman-agama-dan-budaya-di-indonesia/. Diakses tanggal 7 November 2023

Kuswono, Bowo Hadi. "Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara." https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/kesimpulan-danrefleksi-pemikiran-pemikiran-ki-hajar-dewantara/ (diakses 3 Juni 2023).

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2023. *Menteri RI: Nilai dalam Sila-Sila Pancasila Sejalan dengan Ajaran Semua Agama*. Dalam Menteri Agama RI: Nilai dalam Sila-Sila Pancasila Sejalan dengan Ajaran Semua Agama (lemhannas.go.id), diakses pada 8 November 2023.

Lestari, Puji, Sunarto, Hadi Cahyono. 2020. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran, Sosial Horizon*: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 7. No. 2.

Lickona, T. 2012. *Educating for character: Mendidik untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggungjawab.* Jakarta: Bumi Aksara.

Linda E, dalam "Kurikulum Merdeka degan Berbagai Keunggulan" https://pskp.kemdikbud.go.id/berita/detail/313037/kurikulum-merdeka-dengan-berbagai-keunggulan jurnal kemdikbudristek, diakses pada 14 November 2023.

Lisniasari, dan Ismoyo, Tejo. 2020. *Pañca-sīla Buddhis*, dalam PAÑCA-SĪLA BUDDHIS | Jurnal Pendidikan Buddha dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK) (e-journal.id), diakses pada 7 November 2023.

Louise, Elizabeth, 2013. " *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa"*, dalam http://elizabethlouise-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81925-Studi%20Strategis%20Indonesia%20I%20%20Negara%20%20Bangsa%20dan%20Struktur%20Dasar-Pancasila%20Sebagai%20Ideologi%20Bangsa.html, Diakses tgl 10 Juni 2014.

Lubis, Chairuddin P. 2014. "Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Disiplin Nasional". e-USU Repository Universitas Sumatra Utara.

M. Saifullah, Rohman. 2023. *Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila*.

M. Yusuf ,Aris, *"Makna Trias Politica dan Penerapannya dalam Sistem Pemerintahan RI*", dalam https://www.gramedia.com/literasi/trias-politica/, diakses tanggal 23 November 2023

Maftuh, B. 2008. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, *2*(2)

Mastuki, 2023. *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Jakarta, Kementrian Agama RI.

Merdeka, *"Mengenal Tujuan Pendidikan Islam dan Konsepnya dalam Membangun Kapasitas Diri"*, https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-pendidikan-islam . diakses pada 21 November 2023. Pukul 13.34.

Miliano, Nurva, & Dewi, Dinie Anggraeni. 2021. Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora. Kaderi, M. Alwi. (2015). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Aswaja Presindo.

Mufidah, Lily. 2017. "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah." *Badamai Law Journal* 2.1

Muhdina, Darwis dan Taufik, Muhammad. 2020. *Ajaran Persaudaraan dalam Agama Khonghucu dan Implementasinya di Kota Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar

Mulyasa. 2012.*" Konsep implementasi":*Jurnal Lex Justitia.

Musthofa Ali, *"Konsep 3A Asih, Asah dan Asuh"*, https://radarkudus.jawapos.com/pendidikan/amp/691640726/. diakses pada 21 November 2023, pukul 13.45

Muthoifin. 2015. *"Pemikiran Panca Dharma Ki Hajar Dewantara Perspektif Pendidikan Islam"*, (Surakarta: Publikas iIlmiah).

Muzamil, Ika Nur. 2021. Implementasi Nilai Pancasila di Masyarakat sebagai Wujud Cinta Tanah Air. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3.

Nainggolan, Perobahan M. Th.,. 2019. *Peran Gereja dalam Masyarakat dan Negara Pamcasila*, Jurnal Teologi Anugerah. diakses pada 7 November 2023

Najicha, Wibowo. *Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi, Edupsycounsjoirna.* 4 (1), 2022 – 23) .

Ningsih, Rahmah. 2019. *Pancasila sebagai Sistem Etika.* Universitas Esa Unggul

Noventari, W. 2016. Harmonisasi nilai-nilai pancasila dalam sistem among sesuai dengan alam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 1(1).

Nugroho, David, dkk. 2019. *Etika Pendidikan dan Pendidikan Karakter.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Nur Syamsa Mutiara Tarwan. *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern.* Di akses dari file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3443-Article%20Text-5918-1-10-20220604%20(1).pdf Diakses pada 15 oktober 2023. Pukul 10.08

Nurcahya, M. A., & Dewi, D. A. 2021. Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di

Kehidupan Sehari-Hari. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(3), 631639.

Nurfajria, Fian "Kurikulum Merdeka" dalam https://bdkpalembang.kemenag.go.id/artikel/kurikulum-merdeka. Artikel, Diakses tanggal 14 November 2023

Nurlaily, Estri Dwi. 2020. *Aktualisasi Nilai Nilai.* FKIP UMP.

Nurwardani,Paristiyanti dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila: untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Olfiyani, Geni Aufana, and Fatma Ulfatun Najicha. "PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI."

Pengelola Web Direktorat SMP, dalam jurnal berita "Mengenal Tiga Keunggulan Kurikulum Merdeka" https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-tiga-keunggulan-kurikulum-merdeka/ . diakses pada 14 November 2023.

Prasetya, Angga Dwi. 2022. *Buku Ajar Pendidikan PPKn MI.* Surakarta: Guepedia.

Prawidya Lestari dan Sukanti. 2016. *Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler Ekstrakurikuler, Dan Hidden curriculum,* Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 1, Februari

Prof. Dr. H.Suprayogo, Imam. 2014. *Agama di Negara Pancasila*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), dalam Agama Di Negara Pancasila (uin-malang.ac.id), diakses pada 8 November

Purwa, Al. Hadiwardoyo. 2013. *Pancasila dan Gereja Katolik Indonesia*.

Putra, Zulfikar ."Implemetasi Pendidikan Pancasila Sebagai Character Building Mahasiswa Di Universitas Sembilan belas November Kolaka". Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.1. No. 1.

Putri, Fannia Sulistiani, dkk. 2021. *Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika*, (Uinversitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru), Vol. 3 No.1.

Rahayuningsih, Fajar. 2021. "Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila", *Jurnal Pendidikan IPS*, vol. 1, No. 3, Desember.

Rahmadani, Desilia. "*Radikalisme Tidak Sesuai Dengan Nilai- Nilai Pancasila*.

Ramadhan, Muhammad Ramzy, and Zaenul Islam. 2022. "Peran Pancasila sebagai Pedoman dalam Moderasi Beragama di Indonesia." *CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)*.

Ramli. M, 2015. *"Hakikat Pendidik dan Peserta Didik"*, volume 5, Banjarmasin.

Rhifky, Arfiansyah, Ir. Endang Puji W. *Toleransi Antarumat Agama Di Masyarakat Desa Jarak* Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur

Risky, Abdy. "8 Pegertian Penelitian dan Pengembangan Menurut Para Ahli." Https://Satujam.Com/Penelitian-dan-Pengembangan/ (diakses 3 Juni 2023).

Riswadi. *"Berpancasila dan Bergama dengan benar"* dalam https://kemenag.go.id/kolom/berpancasilao diakses pada 8 November 2023

Rizki, Amalia dan Anggraeni, Dinie. 2021. "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat". *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 2.

Safitri, A. O., & Dewi, D. A. 2021. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasiannya Dalam Berbagai Bidang. Edupsycouns: Journal of Education, Psychology and Counseling.

Santika,I.G.N. "*Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", dalam https://id.scribd.com/doc/216275672/Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia,diakses tanggal 23 November 2023

Saragih, Sepriadinson. "Sosialisasi Pentingnya Nilai-nilai Pancasila dan Eksistensinya bagi Mahasiswa." Vol. 4 No. 2 (2022): 700.

Sari, Annisa Medina. 2023. *Apa Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia.* Agustus 9, https://fahum.umsu.ac.id/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/. Diakses pada 02 Desember 2023.

Savitri, A. S., & Dewi, D. A. 2021. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *5*(2).

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam MembangunMasyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Silvi, "*PANCASILA SEBAGAI PONDASI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA" dalam https://www.researchgate.net/publication*.diakses pada 7 November 2023

SMK Negeri 2 Purwodadi dalam artikel Kurikulum Merdeka, https://www.smkn2purwodadi.sch.id/p/kurikulum-merdeka.html?m=1. Artikel, diakses pada tanggal 1 November 2023.

Sulaiman, A. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Arfino.

Suprihatiningrum, Jamil. 2012. Strategi Pembelajaran (Teori dan Aplikasi), Yogyakarta; Arr-Ruzz Media.

Surono. 2010. *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Press.

Sutono, A., & Purwosaputro, S. 2019. Aksiologi Pancasila. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2).

Suwahyu, I. 2018. Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, *23*(2).

Syahira, Salsabila. *Pengertian Pancasila Menurut Tokoh Sejarah Dan Ahli.* Diakses dari: https://umsu.ac.id/berita/pengertian-pancasila-menurut-tokoh-sejarah-dan-ahli/ Di akses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 21.13

Tamalili, Rahmanuddin. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Deepublish.

Taqiuddin, Habibul Umam & Suriadiata,Irpan. 2022. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*. Journal of Law, Social, and Humanities. Vol. 1 No. 1.

Tarwan, N. S. M. 2022. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *3*(1).

Tim Mimbar Khonghucu. (2022). *Ajaran Khonghucu dan Penguatan Pengamalan Nilai Pancasila*. Jakarta. Kementerian Agama RI.

Universitas Terbuka, *Peranan Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Kegiatan Belajar 2: Peranan Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (ut.ac.id), diakses pada 7 November 2023.

Wendi. 2011. *Makna setiap Sila Pancasila*", dalam http://bozwen.blogspot.com/2011/03/makna-setiap-sila-pancasila.html. Diakses pada tgl 10 Juni 2015

Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. 2022. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, *4*(1).

Widiawati, Ana. "Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi: Makna dan Implementasinya." https://deepublishstore.com/pengertian-tridharma-perguruan-tinggi/ (diakses 3 Juni 2023).

Wilujeng, Sri Rahayu. 2011. *Filsafat, Etika, dan Ilmu:Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks KeIndonesiaan.*

Yani, Fitri dan Erni, Darmayanti. 2020. "*Nilai- Nilai Pancsila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi."*

Yanuarti, .Eka. 2017. PEMIKIRAN PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA DAN RELEVASINYA DENGAN KURIKULUM 13, jurnal penelitian, vol.11,No.2

Yuliawati & Sri. 2012. "Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendiidkan Tinggi di Indonesia". Program Pasca sarja UHAMKA.

Yusuf, Mochammad Aris. *"Contoh Nilai Kerakyatan dan Memahami Nilai Sila Keempat Pancasila"*- https://www.gramedia.com/literasi/contoh-nilai kerakyatan/. Diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

Zilfaroni*, Hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia* (*Studi Atas Pemikiran T.B. Simatupang),* (2018), dalam https://www.zilfaroni.web.id diakses pada 7 November

Zuhri, Kavabi, et. "TRIDARMA PERGURUAN TINGGI." https:academia.edu/TRIDARMA_PERGURUAN_TINGGI (diakses 3 Juni 2023).

Zulfikar, Alya. *Nilai Nilai Pancasila Indonesia* diakses dari https://m.mediaindonesia.com/humaniora/539619/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-dari-sila-1-sampai-5 diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 21.17

Zuriatin, Z., Nurhasanah, N., & Nurlaila, N. 2021. Pandangan Dan Perjuangan Ki Hadjar Dewantara Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Ips*, *11* (1).

PROFIL PENULIS

Zaini Fasya, lahir di Madiun pada 8 April 1970. Menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Tambakmas, Kebonsari, Madiun, lulus tahun 1983. Setelah itu melanjutkan studi di MTsN Kembangsawit, Kebonsari, Madiun lulus tahun 1986. Selanjutnya studi di PGAN Keniten, Babadan, Ponorogo lulus tahun 1989. Jenjang S-l diselesaikan di IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Tulungagung lulus tahun 1994. Jenjang S-2 diselesaikan di PPS UNISMA angkatan Tahun 2000/2001 Yudisium Bulan September 2003. Jenjang S3 Dirosah Islamiyah (*Islam Studies*) ditempuh di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 2017.

Menikah dengan Atik Nurhayati, M.PdI., dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Moh. Iwa Sambada Dzikrullah dan Iqbal Muhammad Dzikrullah.

Pengalaman organisasinya, antara lain, menjadi Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah IAIN "Sunan Ampel" Tahun 1991-1992, Pengurus PMII Cabang Tulungagung tahun 1992-1993, Ketua Dewan Racana Pramuka IAIN Sunan Ampel tahun 1992-1993, Pengurus DPD II KNPI Tulungagung tahun 1997-2000, Komandan Banser Cabang Tulungagung tahun 1994-1996, Pengurus PKB Cabang Tulungagung tahun 1998-2002, Sekretaris II GP Ansor Tulungagung 1999 s/d sekarang, dan Ketua Ranting Kota Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2006 s/d 2009. Sekretaris PSHT Cabang Tulungagung tahun 2006 s/d 2018, Anggota Dewan Cabang PSHT Tulungagung pereode 2018 s/d 2022, Anggota Dewan Pertimbangan IPSI Kabupaten Tulungagung tahun 2014 s/d 2022, Katib Nadlatul Ulama Ranting Kutoanyar Tulunaung Pereode 2018-

2024, 2024-sekarang, Wakil Rois Syuriah Nadlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Tulungagung 2018-2026

Sedangkan pengalaman pengabdiannya adalah; menjadi Staf mengajar di TPQ "Hasan Al-Mimbar" tahun 1991-1992, Staf mengajar MTs/MA Pondok Modern Darul Hikmah 1992-1994, Staf Akademik STIT Diponegoro Tulungagung tahun 1992-1994, Staf Umum STIT Diponegoro Tulungagung tahun 1994-1996, Bendaharawan Pondok Modern Darul Hikmah tahun 1993-1996, Kasubag Umum STIT Diponegoro Tulungagung tahun 1996-1998, Kasubag KU STAI Diponegoro Tulungagung tahun 1998-2001, Kepala Madrasah Aliyah PM. Darul Hikmah Tahun 1996-1998, Kepala MTs Pondok Pesantren Salafiyah Modern Raden Paku Trenggalek tahun 1998-2000, Staf Pengajar STAI Diponegoro Tulungagung 1998-sekarang, Staf Pengajar STAIN Tulungagung tahun 2000-sekarang, Staf Pengajar STIT Sunan Giri Trenggalek tahun 2000-sekarang, dan anggota KPU Kabupaten Tulungagung periode 2003-2008. Sekretaris Jurusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Strata Satu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) tahun 2017, Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) dan Staf Mengajar di Pascsarjana IAIN Tulungagung tahun 2018-2022, Ketua Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Staf Mengajar di Pascsarjana UIN SATU Tulungagung tahun 2022-2023, Ketua Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Staf Mengajar di Pascsarjana UIN SATU Tulungagung tahun 2023-2029, Menjadi Instruktur Guru Penggerak Kurikulum Merdeka Belajar di lingkungan P4TK Wilayah Malang tahun 2021-2023, Menagajar Pendidikan Pancasila di beberapa program studi sebagai kuliah wajib Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) S1 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Muhsin Kalida, dikenal sebagai pegiat literasi nasional dan *psychowriter*, pemilik motto *datang menyenangkan, pergi dirindukan* ini juga juga seorang dosen pada Prodi Magister Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pria kelahiran Tulungagung Jawa Timur (1970) dari pasangan H. Mustamar dan Hj. Siin Imro'ah ini, memiliki latar belakang pendidikan, Madrasah Ibtida'iyyah (lulus 1984), Madrasah Tsanawiyyah (1987), MAN 1 Tulungagung (1990), kemudian menyelesaikan S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Sunan Kalijaga (1997), kemudian mendapat beberapa kali beasiswa untuk menyelesaikan program pascasarjana, diantaranya menyelesaikan Magister Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dilanjut Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam. Dalam menyelesaikan program doktoral, nyaris bersamaan penulis juga menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Pengalaman organisasi, pernah menjabat Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) DIY selama dua periode, yaitu tahun 2007-2011 & 2011-2016, pernah menjadi salah satu Wakil Ketua PW GP Ansor DIY (2022-2016), Koordinator Pembinaan TPQ dan Pondok Pesantren PW *Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh* (JQH) NU DIY (2022-2027), Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Sleman (2021-2025), pengelola *community library* Cakuk Pintar Jogja dan *khadimul ma'had* PP Bil-Qolam Nologaten, Jogjakarta.

Beberapa pelatihan pernah diikuti diantaranya: *Networking and Fundraising* (Depsos RI), *Social Work* (UIN Suka-McGill University), *Family Counseling Methods and Techniques* (Childhope Asia Philippines), *International Training in Community Learning Centre (CLC) Planning and Management,* (Sirindhorn Institute, Bangkok), *International Training and Overseas Visit Study on Community Learning Centre and Non Formal Education Management* (Singapura), *Non-formal Education Training* (Kualalumpur), *Entrepreneurship Education* (Universitas Ciputra, Jakarta), *International Conference on Islamic*

Counselling (IIUM), *International Training on Community Learning Centre* (Taiwan), *dll.*

Buku yang sudah diterbitkan diantaranya: *Budaya Santri Memang Ditinggalkan, Sahabatku Anak Jalanan, Konseling Islam; Solusi Problematika Anak dan Remaja, Model Jaringan Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat, Strategi Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat, Menggalang Dana melalui Taman Bacaan Masyarakat, Pengantar Psikologi: Perspektif Konseling Islam, Indahnya Hidup di Jalanan, Fundraising TBM, Strategi Networking TBM, Jejak Kaki Kecil di Jalanan, Jogja TBM Kreatif, TBM di PKBM; Model dan Strategi Pengembangannya, Menggiring Arus Literasi, Gerakan Literasi; Mencerdaskan Negeri, Capacity Building Perpustakaan, Gagasan & Tantangan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 (bunga rampai), Tutorial Psychowriting Methods, Penguatan Kelembagaan Perpustakaan, Networking & Fundraising GPMB, Langkah-langkah Bimbingan & Konseling Islam (BKI) Anak-Remaja, Penguatan Lembaga Komunitas Literasi,* dll. Beberapa artikel jurnal, diantaranya adalah: *Model Pembelajaran Kreatif dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak di Luar Sekolah, Gerakan Literasi Melalui Pembelajaran Kreatif di Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Gerakan Literasi Melalui Pembelajaran Kreatif di Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Anticipation of Corruption through Literation Based Honest Behaviour Learning in Early Childhood Education, Implementation of The Psychowriting Methods to Improve Linguistic Intelligence for Children in the Field of Writing Interest, Implementation of Psychowriting Program to Improve Writing Competence for Senior High School Students (SLTA) in Sukamara, Central Kalimantan, How is the Psychological Well-Being of the Prospective Counselor: The PERMA-Profiler,* dll.

Penulis pernah menerima penghargaan di bidang literasi diantaranya: Pegiat Literasi Kota Yogyakarta (2017), *Nugra Jasadharma Pustaloka,* Kategori Penulis, (dari Kepala Perpusnas RI, 2018), Insan Peduli PAUD & Pendidikan Masyarakat, (dari Mendikbud, 2019).

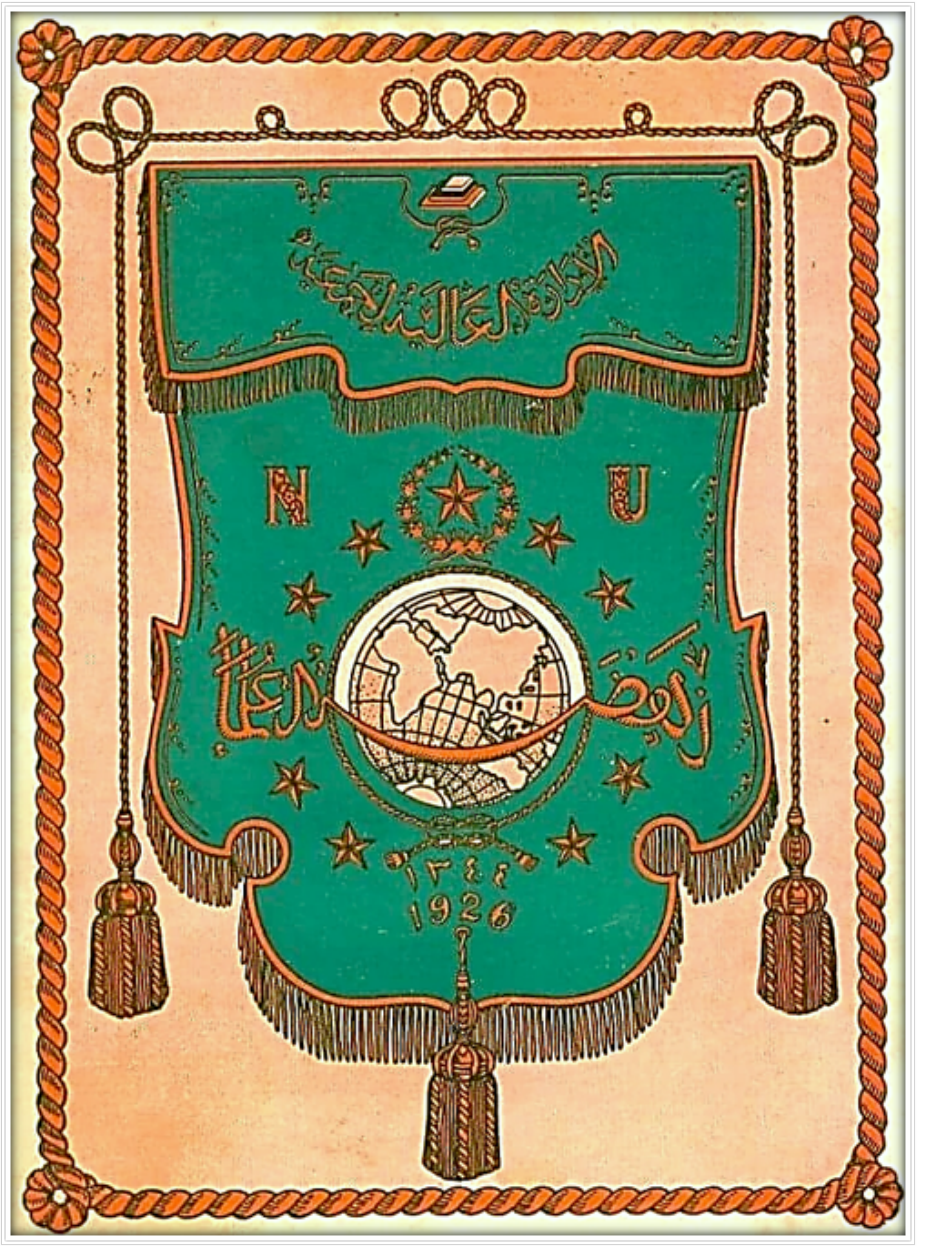
الإدارة العالية لجمعية
N U
زهرة العلماء
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

KONTEKSTUAL PANCASILA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Buku yang ada di hadapan pembaca saat ini, menggambarkan betapa Indonesia memiliki dasar kebangsaan dan kenegaraan yang kuat dan kokoh dalam berbagai aspek kehidupan baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai pranata bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila di nilai sangat elastis, fleksibel dan implementatif dalam semua norma-norma dan nilai-nilai lintas etnis, suku, bangsa dan agama. Kehadiran buku ini menunjukkan betapa nilai-nilai Pancasila sangat relevan dengan sendi-sendi etika dan moral dalam banyak agama di Indonesia terlebih dalam perspektif agama Islam, karena tema yang penulis cantumkan setiap Bab dalam buku "Konstektual Pancasila Dalam Pendidikan Islam" dibahas dan dikaji lalu disandarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang kontekstual dan integral dalam praktek-praktik kehidupan sehari-hari terutama kaum muslimin dan muslimat terutama dalam praktek pelaksanaan Pendidikan agama Islam.

Kontekstual pancasila diharapkan menjadi role model berfalsafah dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berorganisasi, bernegara dan khususnya dalam pelaksanaan Pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat muslim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Buku kontekstualisasi pancasila ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terciptanya lingkungan pendidikan Islam yang harmonis ciri khas ketimuran dalam bingkaian Islam yang rahmatan lil'alamin.

Historie Media

historiemedia.com
@historie_media
Historie Media

ISBN 978-623-10-9501-5
9 786231 095015
Harga P. Jawa Rp105.000